



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Secara umum tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi laporan keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, yaitu:

1. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara umum pula Laporan Keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumberdaya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumberdaya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi apakah sumberdaya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Komponen Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ini, disajikan pula informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain :

- a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan, ekonomi regional/ ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporannya;



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Laporan Keuangan yang disusun ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk periode 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. SAL merupakan saldo yang berasal dari akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun – tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LP-SAL) penyusunan bersifat pilihan bagi pemerintah daerah, dalam arti jika pemda memasukkan seluruh SILPA awal tahun ke dalam anggaran penerimaan pembiayaan APBD, maka LP-SAL tidak perlu dibuat. Akan tetapi, jika SILPA awal tahun yang dimasukkan ke dalam anggaran penerimaan pembiayaan APBD hanya sebagian saja, maka LP-SAL perlu dibuat, karena SILPA akhir tahun belum menunjukkan SAL akhir.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca ini adalah menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2022, dan telah disesuaikan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mandatory

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang menyajikan informasi data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK menjelaskan naratif analisis atau daftar terinci atas nilai yang disajikan dari LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Kinerja Keuangan sesuai bidang pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2022 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/202 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrua Nomor 17
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022;
29. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.5/2022 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk Nontunai;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Inventerisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
31. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

32. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;
34. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
35. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
36. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022
37. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022
38. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
39. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022;
40. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

**Bab II: Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
Kabupaten Penajam Paser Utara Beserta Hambatan dan Kendala Pencapaiannya**

- 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.1.1 Tingkat Kemiskinan
 - 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)
 - 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi
- 2.1.6 Inflasi
- 2.1.7 Struktural Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara
- 2.1.8 Kemandirian Fiskal Daerah
- 2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan
 - 2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 2.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 2.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 2.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 2.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III: Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target keuangan Pemerintah Daerah

Bab IV: Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Bab V: Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Rincian Dari Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan LRA
 - 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
 - 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
 - 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - 5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - 5.1.1.2 Pendapatan Transfer
 - 5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan
 - 5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil
 - 5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik
 - 5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik
 - 5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
 - 5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)
 - 5.1.1.2.2.2 Dana Desa
 - 5.1.1.2.3 Transfer Antar Daerah
 - 5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
 - 5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan
 - 5.1.1.3 Lain – Lain Pendapatan Yang Salah



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- 5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah
- 5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya
- 5.1.2 Belanja Daerah
 - 5.1.2.1 Belanja Operasi
 - 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai
 - 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
 - 5.1.2.1.3 Belanja Bunga
 - 5.1.2.1.4 Belanja Hibah
 - 5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial
 - 5.1.2.2 Belanja Modal
 - 5.1.2.2.1 Belanja Tanah
 - 5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin
 - 5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan
 - 5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya
 - 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga
 - 5.1.2.4 Belanja Transfer
 - 5.1.2.4.1 Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa
- 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan
 - 5.1.3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
 - 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan
 - 5.1.3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - 5.1.3.2.2 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
- 5.1.4 Pembiayaan Netto
 - 5.1.4.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan
- 5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5 Lain-lain
- 5.3. Penjelasan Atas Akun-Akun Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.1.1 Aset lancar
 - 5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.3.1.1.2	Kas di BLUD
5.3.1.1.3	Kas Dana BOS
5.3.1.1.4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
5.3.1.1.5	Kas Lainnya
5.3.1.1.6	Piutang Pajak
5.3.1.1.7	Piutang Retribusi
5.3.1.1.8	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
5.3.1.1.9	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
5.3.1.1.10	Penyisihan Piutang
5.3.1.1.11	Persediaan
5.3.1.1.12	Belanja dibayar di muka
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang
5.3.1.2.1	Investasi Non Permanen
5.3.1.2.1.1	Investasi Dana Bergulir
5.3.1.2.2	Investasi Permanen
5.3.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah
5.3.1.3	Aset Tetap
5.3.1.3.1	Tanah
5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin
5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan
5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya
5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan
5.3.1.4	Aset Lainnya
5.3.1.4.1	Aset Tidak Berwujud
5.3.1.4.2	Aset Lain-lain
5.3.1.4.2.1	Aset Lain-Lain - Dinas Koperasi Ukm dan Perindag
5.3.1.4.2.2	Aset Lain-Lain - Ternak Sapi dan Kerbau Gaduhan
5.3.1.4.2.3	Aset Lain-Lain - Aset Tetap yang Rusak
5.3.1.4.2.4	Aset Lain-Lain - Aset Tetap yang Hilang
5.3.1.4.2.5	Aset Lain-Lain - Aset Tetap Yang Akan Dihapuskan
5.3.1.4.2.6	Aset Lain-Lain - Aset Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D)
5.3.1.4.2.7	Aset Lain-Lain - Aset BMD Yang Dimanfaatkan Pihak Lain
5.3.1.4.2.8	Aset Lain-Lain - Treasury Deposit Facility (TDF)
5.3.1.5	Kewajiban
5.3.1.5.1	Kewajiban Jangka Pendek
5.3.1.5.1.1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.3.1.5.1.2	Pendapatan diterima dimuka
5.3.1.5.1.3	Utang Belanja
5.3.1.5.2	Kewajiban Jangka Panjang
5.3.1.5.2.1	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5.3.1.6	Ekuitas
5.3.1.6.1	Ekuitas
5.4	Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional
5.4.1	Pendapatan-LO
5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah – LO
5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO
5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO
5.4.1.1.3	Pendapatan dari Pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan – LO
5.4.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO
5.4.1.2	Pendapatan Transfer – LO
5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO
5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO
5.4.1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO
5.4.1.2.4	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO
5.4.1.2.4.1	Pendapatan Hibah – LO
5.4.1.2.4.2	Pendapatan Lainnya – LO
5.4.2	Beban Daerah
5.4.2.1	Beban Operasi – LO
5.4.2.1.1	Beban Pegawai
5.4.2.1.2	Beban Barang dan Jasa
5.4.2.1.3	Beban Bunga
5.4.2.1.4	Beban Hibah
5.4.2.1.5	Beban Bantuan Sosial
5.4.2.1.6	Beban Penyisihan Piutang
5.4.2.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi
5.4.2.3	Beban Transfer
5.4.2.3.1	Beban Bantuan Keuangan
5.4.2.4	Beban Tidak Terduga
5.4.3	Surplus / Defisit dari Operasi
5.4.4	Surplus Non Operasional
5.4.4.1	Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya
5.4.5	Defisit Non Operasional
5.4.5.1	Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya
5.4.6	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional
5.4.7	Surplus / Defisit LO



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- 5.5 Penjelasan Atas Pos Pos Arus Kas
 - 5.5.1 Saldo Awal Kas
 - 5.5.2 Perubahan Arus Kas
 - 5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.3.1 Arus Masuk Kas
 - 5.5.3.2 Arus Keluar Kas
 - 5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.4.1 Arus Keluar Kas
 - 5.5.5 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.5.1 Arus Keluar Kas
 - 5.5.6 Arus Kas Dari Aktivitar Transistoris
 - 5.5.6.1 Arus Masuk Kas
 - 5.5.6.2 Arus Keluar Kas
 - 5.5.7 Kenaikan/Penurunan Kas
 - 5.5.8 Saldo Awal Kas Di Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan Bos
 - 5.5.9 Saldo Akhir Dana Non Kapitasi
 - 5.5.10 Saldo Akhir Di Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan Bos
 - 5.5.11 Saldo Akhir Kas
 - 5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Surlus/Defisit – LO
 - 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir
 - 5.7 Informasi Nonkeuangan
 - 5.7.1 Aset Milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang disewakan, pinjam pakai dan Hibah ke Intansi Vertikal, Pihak Ketiga, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat
 - 5.7.1.1 Tanah
 - 5.7.1.2 Peralatan dan Mesin
 - 5.7.1.3 Gedung dan Bangunan
 - 5.7.1.4 Jalan Irigasi dan Jaringan
 - 5.7.1.5 Aset yang Disewakan
 - 5.7.1.6 Daftar Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Memiliki dan Belum Memiliki Bukti Kepemilikan Yang Sah
 - 5.8 Persetujuan Laporan Keuangan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

**Bab VI : Pengungkapan Lainnya dan Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non
Keuangan**

- 6.1 Pengungkapan Penting Lainnya
- 6.2 Entitas Pelaporan
- 6.3 Ketentuan Peraturan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional
- 6.4 Kebijakan Penanganan Dampak Inflasi Pada APBD TA 2022
- 6.5 Permasalahan Hukum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Bab VII : Penutup



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BESERTA HAMBATAN DAN KENDALA PENCAPAIANNYA

2.1 Ekonomi Makro

Secara geografis, Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00^o 48'29" - 01^o 36'37" Lintang Selatan (LS) dan 116^o 19'30" dan 116^o 56'35" Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah seluas 3.333,06 Km². Kabupaten Penajam Paser Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara disebelah utara, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat disebelah barat, Selat Makassar disebelah selatan serta Kota Balikpapan disebelah timur. Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 4 Kecamatan yaitu: Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku. Terdiri dari 24 Kelurahan dan 30 Desa.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara jumlah penduduk Kabupaten Paser Utara pada tahun 2022 semester pertama tercatat sebanyak 188.923 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terakhir menunjukkan Laju pertumbuhan penduduk Penajam Paser Utara pada periode 5 tahun terakhir atau sejak 2017-2021 sebesar 2,52%. Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB dibedakan menjadi dua yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 mencapai Rp10,08 triliun dan PDRB ADHK tahun 2021 mencapai Rp6,49 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 sementara masih nihil. Data terakhir masih menunjukkan bahwa ditahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, meskipun masih dalam kondisi minus. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar -1,69% atau mengalami peningkatan sebesar 0,65% dari tahun 2020. Struktur perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan tahun 2020, dimana struktur pembentuk perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan lapangan usaha masih didominasi oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 23,51%, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 22,89% serta Industri Pengolahan sebesar 16,21%.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,25%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,12%
- c. Gini Ratio sebesar 0,274%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,55%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar – 1,69%
- f. Tingkat Inflasi sebesar nihil atau 0%



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) sebesar Rp10.087.318,4 (Juta Rupiah)

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan akan mencerminkan nilai rupiah minimum yang harus dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Memetakan kemiskinan juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan tingkat keparahan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) adalah ukuran rata – rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) merupakan gambaran sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dimana melalui P_2 akan diketahui ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tingkat Kedalaman dan Tingkat Keparahan menjadi salah satu indicator dalam perumusan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan serta menjadi indikator dalam menilai keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

**Tabel 2.1.1 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2019 - 2022**

No	Kondisi Kemiskinan	Tahun 2019	Tahn 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Persentase Kemiskinan (%)	7,18	7,36	7,61	7,25	↑ 0,56
2	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	11.520	11.930	12.126	11.590	↓ 536
3	Persentase Kemiskinan Kaltim (%)	5,94	6,10	6,54	6,31	↓ 0,23

Sumber Dokumen: <https://ppukab.bps.go.id/>. BPS Penajam Paser Utara, 2022

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah 11.590 jiwa. Jumlah ini menurun 536 jiwa dibandingkan tahun 2021. Meningkatnya jumlah penduduk miskin ini memicu menurunnya persentase penduduk miskin menjadi 7,25% pada tahun 2022 atau meningkat sekitar 0,56% dibandingkan tahun 2021. Meskipun menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 7,61%, namun tingkat kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara masih berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 6,31% tahun 2022. Tren penurunan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Provinsi Kalimantan Timur tergolong kecil tiap tahunnya.

Tabel 2.1.1.1 Tingkat Kedalam Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	1,00	0,87	1,18	1,07	↓ 0,11



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

	Kabupaten					
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,91	1,02	1,22	0,78	↓ 0,44
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1.50	1,61	1,67	0,67	↓ 1,00

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kondisi P_1 di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan sebesar 0,11 pada tahun 2022 seiring dengan menurunnya garis kemiskinan yang berdampak pada menurunnya jumlah kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kondisi P_1 Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 sebesar 1.07 dan kondisi P_1 tahun 2022 mengalami penurunan dari kondisi P_1 tahun 2021 dengan angka sebesar 1.87. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan tidak hanya terjadi pada Kabupaten Penajam Paser Utara, namun juga hingga lingkup terluas yaitu tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur menurun sebesar 0,44 pada tahun 2022 menjadi 0,78, sedangkan untuk tingkat Nasional menurun sebesar 1,00 menjadi 0,67. Penurunan yang signifikan ini terjadi tidak lepas dari penurunan yang juga terjadi pada garis kemiskinan yang menyebabkan menurunnya jumlah penduduk miskin.

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,28	0,17	0,30	0,25	↓ 0,05
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,21	0,24	0,34	0,11	↓ 0,23
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,37	0,38	0,42	0,15	↓ 0,27

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Sejalan dengan menurunnya kondisi P_1 Kabupaten Penajam Paser Utara, kondisi P_2 juga mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu menjadi 0,25 dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 0.30 atau mengalamai penurunan sebesar 0,05. Angka ini menandakan adanya penurunan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun kondisi ini tidak lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi P_2 Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional yang juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar 0,23 menjadi 0.11 untuk Provinsi Kalimantan Timur dan 0,27 menjadi 0,15 untuk Nasional.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) angkatan kerja yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten (%)	6,26	6,22	2,95	2,12	↓ 0,83
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	6,09	6,87	6,83	5,17	↓ 1,66
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,23	7,07	6,49	5,38	↓ 1,11

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 terbilang menurun dengan cukup signifikan. TPT Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 sebesar 2,12% menurun 0,83% dibanding tahun 2021. TPT Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional juga mengalami penurunan capaian TPT. TPT Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sebesar 5,17% atau menurun sebesar 1,66%, dimana penurunan TPT Provinsi Kalimantan Timur ini tergolong besar jika dibandingkan dengan penurunan TPT Nasional. TPT Nasional pada tahun 2022 menurun sebesar 1,11% menjadi 5,38%. Penurunan TPT ini menandakan bahwa terdapat penurunan lapangan kerja di lingkungan masyarakat yang mampu menyerap tenaga kerja lokal yang cukup signifikan.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Tabel 2.1.3 Gini Ratio Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kabupaten	0,322	0,292	0,263	0,274	↑ 0,011
2	Tingkat Provinsi	0,330	0,328	0,331	0,317	↑ 0,014
3	Tingkat Nasional	0,380	0,381	0,381	0,381	-

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Indeks Gini Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 yang tersedia pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,274. Capaian indeks gini tersebut masih tergolong tinggi, dimana



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

masih melebihi 0 yang menandakan masih terdapat ketimpangan di lingkungan masyarakat. Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 menurun 0,014 poin dibandingkan tahun 2021 menjadi 0,317. Penurunan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur ini menandakan ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur menurun pada tahun 2022. Sedangkan Indeks Gini Nasional pada tahun 2021 tidak berubah dari tahun 2020, yaitu sebesar 0,381. Capaian Indeks Gini Nasional tersebut juga masih tergolong tinggi, atau lebih tinggi dibandingkan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu usia harapan hidup (UHH), rata – rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS), serta pengeluaran per kapita. Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (>80).

Tabel.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	71,64	71,41	72,01	72,55	↑ 0,54
2	Provinsi	76,61	76,24	76,88	77,44	↑ 0,64
3	Indonesia/Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	↑ 0,62

Sumber dokumen: Badan Pusat Statistik

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 secara Nasional mengalami peningkatan. Peningkatan ini juga diikuti pada tingkat provinsi, khususnya Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2022, capaian IPM Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 72,55 atau meningkat 0,54 dibanding tahun 2021. Capaian IPM Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan sebesar 0,64 menjadi 77,44. Peningkatan pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur terbilang tidak terlalu signifikan, namun capaian IPM Provinsi Kalimantan Timur ini lebih baik dibandingkan capaian IPM Nasional sebesar 72,91. Peningkatan secara global disegala tingkatan ini menandakan bahwa komponen pembentuk IPM mengalami perbaikan kondisi setiap tahunnya, yaitu dari sektor Kesehatan, Pendidikan dan perekonomian masyarakat.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, karena masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	6.604,22	6.492,34	Nihil	128,66	2.976,8
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	(2,34)	(1,69)	2,48	2,51	5,27

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Timur

PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2022 pada triwulan III berada pada angka 128,66 triliun dan 2.976,8 triliun. Pada tahun 2021, PDRB ADHK Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 masih bernilai nihil karena data dari BPS Kabupaten Penajam Paser Utara masih belum rilis. Data yang tersedia masih PDRB ADHK tahun 2021. Meskipun capaian PDRB ADHK Kabupaten Penajam Paser Utara menurun pada tahun 2021, namun Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan walaupun masih berada pada kondisi minus. LPE Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat menjadi -1,69% dari sebelumnya sebesar -2,34%. PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 484,29 miliar, dimana capaian PDRB tersebut lebih tinggi dibandingkan PDRB ADHK Nasional yang sebesar Rp 11,11 miliar. LPE Provinsi dan Nasional pada tahun 2021 telah mencapai nilai positif, dimana LPE Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 sebesar 2,48% dan Nasional sebesar 2,51%.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi perekonomian, namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara tidak ada menjelaskan Tingkat Inflasi dikarenakan tidak ada dananya Prov/Kab/Kota. Tingkat Inflasi Penajam Paser Utara sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.6 Tingkat Inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	0,30	0,780	2,15	0,23	↓ 1,92
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	-0,27		1,87	0,66	↓ 1,21

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

Kabupaten Penajam Paser Utara tidak termasuk dalam daerah yang dihitung tingkat inflasinya pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dimana pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur daerah yang menjadi lokasi penilaian inflasi adalah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur (Gabungan 2 Kota Samarinda dan Balikpapan) Inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 sebesar 0,23% atau menurun sebesar 1,92%. Penurunan inflasi juga terjadi pada tingkat Nasional, dimana secara Nasional inflasi tahun 2022 sebesar 0,66%. Pada tahun sebelumnya atau pada tahun 2021, inflasi nasional sebesar 0,66 atau turun sebesar 1,21%.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara.

Struktur pembentuk perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan lapangan usaha terdapat 18 jenis lapangan usaha. Setiap komponen atau jenis lapangan usaha memiliki besaran peran masing – masing dalam membentuk perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut struktur pembentuk perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara:

Tabel.2.1.7 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1.330,89	1.362,87	1.987,74	2.308,77
2	Pertambangan dan Penggalian	2.162,73	2.170,65	2.338,51	2.371,19
3	Industri Pengolahan	1.017,02	1.042,10	1.490,39	1.635,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,11	5,22	7,68	8,11
5	Pengadaan Air	5,93	6,17	8,53	8,95
6	Bangunan / Kontruksi	608,09	651,95	1.071,47	1.440,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran	573,99	593,51	852,19	913,82
8	Transportasi dan Pergudangan	107,70	112,00	149,91	164,39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	29,34	30,42	50,09	51,46
10	Informasi dan Komunikasi	97,14	105,96	131,09	141,93
11	Jasa Keuangan	45,93	48,82	77,84	82,97
12	Real Estate	86,91	90,05	116,33	123,50
13	Jasa Perusahaan	1,12	1,13	1,64	1,71
14	Administrasi Pemerintahan	238,85	247,03	332,93	352,01



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
15	Jasa Pendidikan	219.14	225.64	345,87	383,55
16	Jasa Kesehatan	1.74	1.82	3,29	4,03
17	Jasa Lainnya	55.70	58.19	86,75	94,91
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	658.37	6753.52	9.052,13	10.087,31

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.1.8 Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Dalam Peraturan Menteri Nomor 193/PMK.07/2022 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang dimaksud Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$KFD_{kabupaten/kota-I} = (\text{pendapatan} + \text{penerimaan pembiayaan tertentu}) - (\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu})$. KFD kabupaten/kota-I = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota. Pendapatan sendiri terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja tertentu dalam formula tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil dan alokasi dana desa. Pengeluaran pembiayaan tertentu yang dimaksud adalah pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah. Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dapat dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$RKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{\text{Belanja Pegawai}_{kabupaten/kota-i}}$$

Keterangan:

- RKFD kabupaten/kota-i = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota
- KFD kabupaten/kota-I = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota
- Pegawai kabupaten/kota-i = Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Rentang RFKD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
Rentang RFKD < 1.171	Sangat Rendah
1,171 ≤ RFKD < 1,504	Rendah
1,504 ≤ RFKD < 1,838	Sedang
1,838 ≤ RFKD < 2,171	Tinggi
2,171 ≤ RFKD	Sangat Tinggi

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2022 bahwa Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan seperti tabel berikut:

Kabupaten/Kota	Rentang RKFD 2022	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
Tingkat Kabupaten	1,1501	Rendah
Provinsi Kalimantan Timur	2,786	Sangat Tinggi

Makin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan kemampuan keuangan yang berasal dari daerah lokal serta mengurangi ketergantungan pada bantuan dana pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan PAD terhadap total pendapatan daerah.

2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Dasar hukum kebijakan anggaran Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi tahun 2021. Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2022 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka sasaran ekonomi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Mendorong peningkatan perekonomian masyarakat melalui kerjasama perekonomian salah satunya dengan cara mempermudah proses perijinan, perluasan lapangan kerja, pemilihan potensi komoditas unggulan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi. Kebijakan – kebijakan ini akan dilaksanakan dengan diikuti peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitas kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- b. Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja yang berusaha pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.
- c. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan produksi pangan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan pertanian yang berbasis masyarakat, pengembangan produk pertanian unggulan daerah.
- d. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dibidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Secara umum kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mampu membiayai seluruh kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Kondisi keuangan daerah yang ada saat ini, dimana masih tingginya tingkat ketergantungan kepada dana perimbangan keuangan daerah (dana transfer) disamping dana pembangunan dari APBN.

Kondisi tersebut mengharuskan pada internal daerah untuk mengupayakan intensifikasi sumber pemungutan pajak-pajak dan ekstensifikasi retribusi daerah. Disamping hal tersebut perlu pengembangan usaha perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk mampu meningkatkan kemampuan PAD guna pembiayaan rutin pemerintah yang dapat digunakan bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Besarnya pembiayaan pembangunan yang harus disediakan pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari perencanaan pembangunan disegala bidang, mengharuskan upaya peningkatan dana pembangunan dari APBN, karena keterbatasan dana PAD dan Dana Perimbangan Keuangan yang diterima oleh pemerintah daerah. Hal tersebut menuntut Pemerintah Daerah memiliki kemampuan menyusun perencanaan yang berkualitas dan komprehensif dengan tetap memperhatikan skala prioritas pembangunan.

Pengelolaan keuangan dan investasi pemerintah diarahkan pada pemberian dukungan pendanaan bagi pengembangan sektor-sektor unggulan, penguatan keunggulan komparatif, peningkatan sumberdaya manusia dan pengembangan infrastruktur dan penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran secara cermat, efisien dan efektif, penataan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta. Selain itu pengelolaan keuangan dan investasi pemerintah daerah tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan kemajuan dan kemandirian daerah, serta kebijakan alokasi anggaran belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan tetap memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

2.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.668.794.657.312,00 termasuk bantuan keuangan provinsi dan dana alokasi khusus. Adapun pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Target tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp93.777.232.265,00 mengalami penurunan dibanding target tahun 2021 sebesar Rp147.987.898.737,00

2. Dana Perimbangan

Proporsi dana perimbangan terhadap APBD Kabupaten Penajam Paser Utara sangat besar, bahkan dapat dikatakan masih sangat dominan. Dana perimbangan diproyeksikan Tahun 2022 sebesar Rp1.276.181.058.678,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp43.769.455.544,00 mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Secara lebih rinci target pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 : Proyeksi target pendapatan tahun 2022 dan tahun 2021

No.	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target (Rp)	
		2021	2022
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1.901.444.220.132,00	1.688.794.657.312,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	147.987.898.737,00	93.777.232.265,00
4.1.1	Pajak Daerah	52.107.703.388,00	38.474.739.374,00
4.1.2	Retribusi Daerah	13.432.294.020,00	9.214.137.518,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.078.067.000,00	2.318.899.829,00
No.	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target (Rp)	
		2021	2022
4.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.369.834.329,00	43.769.455.544,00
4.2	Dana Perimbangan	1.402.583.550.821,00	1.276.181.058.678,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	981.077.174.821,00	872.065.039.678,00



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	280.388.087.000,00	272.437.796.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	77.268.475.000,00	94.670.308.500,00
4.3	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	46.146.652.524,00	25.786.386.369,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	18.582.140.000,00	5.852.000.000,00
4.3.2	Dana Darurat	-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	99.310.832.050,00	146.172.416.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	27.564.512.524,00	112.844.950.000,00

Sumber Dokumen: RKPD Tahun 2022

2.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020 pedoman pengelolaan keuangan daerah meliputi:

a. Pendapatan asli daerah (PAD):

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana perimbangan:

- 1). Dana bagi hasil;
- 2). Dana alokasi umum (DAU);
- 3). Dana alokasi khusus (DAK);

c. Lain-lain pendapatan daerah:

- 1). Hibah berasal dari pemerintah, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- 2). Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- 3). Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- 4). Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 5). Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Rencana Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Anggaran Pendapatan Tahun 2022 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian global, Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Secara umum kinerja Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi nasional yang ditunjang dengan membaiknya kondisi

sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Namun perlu disadari bahwa dalam mencapai target pendapatan, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi secara berkala oleh seluruh aparat, yang didukung dengan kesadaran pelaku dunia usaha dan masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Yang dibarengi dengan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara agar dapat memenuhi dan atau melampaui target yang telah ditetapkan, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupa:

- a. Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi;
- b. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku.
- c. Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah.
- d. Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru melalui pemutakhiran data serta analisis potensi daerah.
- e. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- f. Peningkatan kualitas aparatur pemungut pajak melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknis pemungut pajak.
- g. Merumuskan berbagai peraturan daerah terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah.
- h. Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan daerah sektor SDA dan Dana Perimbangan maka perlu langkah-langkah berikut:
 - Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa iuran tetap dan iuran produksi kepada pemegang izin usaha pertambangan batubara sesuai kewenangan.
 - Melakukan rekonsiliasi secara berkala penerimaan iuran tetap dan iuran produksi dari pemegang izin usaha pertambangan.
 - Melakukan validasi data dalam penetapan Pendapatan Daerah
 - Melakukan Kegiatan DAK Fisik/Non Fisik secara tepat waktu, serta melakukan verifikasi kelengkapan data dengan SKPD terkait mengenai pengusulan DAK Fisik/Non Fisik ke Pemerintah Pusat.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

2.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022, akan meliputi:

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan 20% anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu 10% anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif;
3. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agrobisnis yang berdaya saing dan pematapan pasar yang jelas dan prospektif;
4. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan peran UKM dan Koperasi dalam perekonomian masyarakat;
5. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin;
6. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Memantapkan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana pelayanan dasar;
8. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa/kelurahan yang terpadu dan holistik yang mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat;
9. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa total belanja daerah tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp1.660.000.000.000,00. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Pada Tahun 2022 Belanja operasi dialokasikan sebesar Rp1.108.320.927.034,00 meliputi:

- a. Belanja pegawai sebesar Rp541.200.337.323,00 dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah.



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- b. Belanja barang sebesar Rp502.485.115.402,00 adalah pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan termasuk untuk biaya pemeliharaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan perjalanan dinas.
- c. Belanja bunga sebesar Rp22.654.756.633,00 merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kota seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- d. Belanja subsidi merupakan belanja yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum.
- e. Belanja hibah merupakan pemberian hibah dalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi pemerintah sebesar Rp31.209.557.676,00 yaitu pemberian hibah untuk kegiatan yang berkaitan pemilihan umum kepala daerah, serta penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat *cross cutting issue*.
- f. Bantuan bantuan sosial sebesar Rp10.771.160.000,00 yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik.

Belanja Modal pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 sebesar Rp381.153.673.161,00. Belanja modal meliputi belanja modal untuk pengeluaran pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Belanja tak terduga, direncanakan sebesar Rp18.365.066.073,00 untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang. Seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Bantuan Keuangan adalah belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan daerah Kabupaten direncanakan sebesar Rp152.868.862.864,00 yang bersifat umum maupun khusus kepada Kabupaten / Kota /Pemerintahan Desa.

Tabel 2.8 : Proyeksi Belanja tahun 2021 dan tahun 2022

URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
BELANJA	1.956.052.588.040,00	1.660.708.529.132,00
BELANJA OPERASI	1.272.029.848.404,00	1.108.320.927.034,00
Belanja Pegawai	511.203.026.470,00	541.200.337.323,00
Belanja Barang	694.444.692.377,00	502.485.115.402,00
Belanja Bunga	21.663.420.907,00	22.654.756.633,00
Belanja Hibah	41.573.108.650,00	31.209.557.676,00
Belanja Bantuan Sosial	3.145.600.000,00	10.771.160.000,00
BELANJA MODAL	533.769.691.822,00	381.153.673.161,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
Belanja Tanah	24.594.646.608,00	8.431.445.371,00
Belanja Peralatan dan Mesin	76.207.027.483,00	51.185.360.360,00
Belanja Gedung dan Bangunan	84.541.603.962,00	58.449.742.193,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	342.687.463.231,00	259.192.806.262,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.738.950.538,00	3.894.318.975,00
Belanja Aset Lainnya	-	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	9.599.988.300,00	18.365.066.073,00
BELANJA TRANSFER	140.653.059.514,00	152.868.862.864,00
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/kota	5.000.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	121.930.994.839,00	152.868.862.864,00 -
Belanja Transfer Dana Otonomi - Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	13.722.064.675,00	
JUMLAH BELANJA	1.956.052.588.040,00	1.660.708.529.132,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(54.608.367.908,00)	28.086.128.180,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	155.839.043.548,00	41.679.216.371,00
Penggunaan SILPA	5.839.043.548,00	41.679.216.371,00
JUMLAH PENERIMAAN	155.839.043.548,00	41.679.216.371,00
PENGELUARAN DAERAH	101.230.657.640,00	69.765.344.551,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	46.100.000.000,00	5.852.000.000,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	55.130.675.640,00	63.913.344.551,00
Jumlah Pengeluaran	101.230.657.640,00	69.765.344.551,00
PEMBIAYAAN NETTO	54.608.367.908	(28.086.128.180,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		

2.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah sebagai satu kesatuan dalam struktur APBD, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pemberian dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kondisi penganggaran daerah apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah, atau surplus APBD, maka pembiayaan daerah diarahkan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja jaminan sosial. Apabila terjadi pendapatan daerah lebih rendah dibanding dengan belanja daerah atau terjadi defisit APBD, sebisa mungkin dapat



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

dicukupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu. Alternatif lain adalah dengan melakukan pinjaman daerah, menjual aset daerah atau dengan alternatif kebijakan lain. Dalam menutup defisit anggaran harus jelas, transparan dan penuh kehati-hatian, karena konsekuensinya sangat berhubungan erat dengan beban pembangunan di masa-masa mendatang.

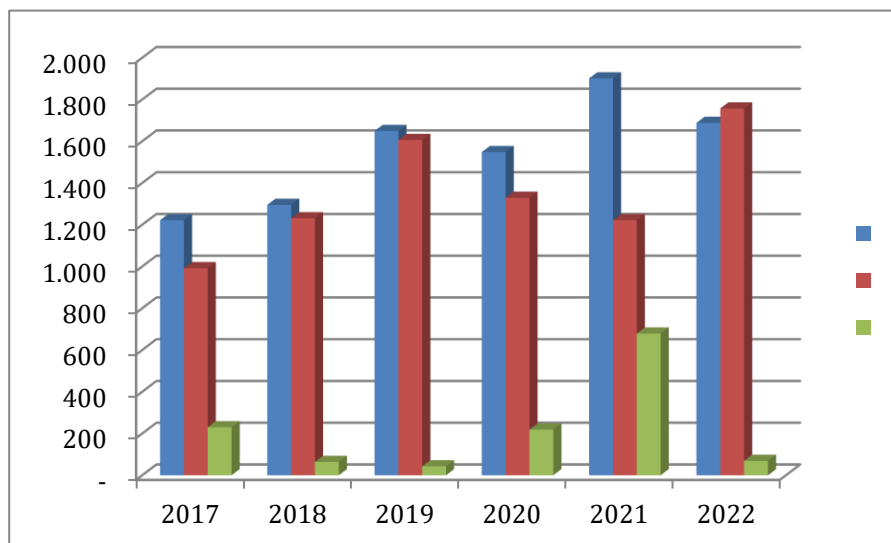
Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2022 di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain diarahkan untuk:

- Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi seimbang, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun lalu.
- Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis.
- Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Perkembangan APBD dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan baik dari nilai belanja maupun dari nilai pendapatan, tetapi dalam tahun anggaran 2021 mengalami penurunan dari nilai pendapatan maupun belanja, hal ini dapat dilihat dari perkembangan grafik dibawah

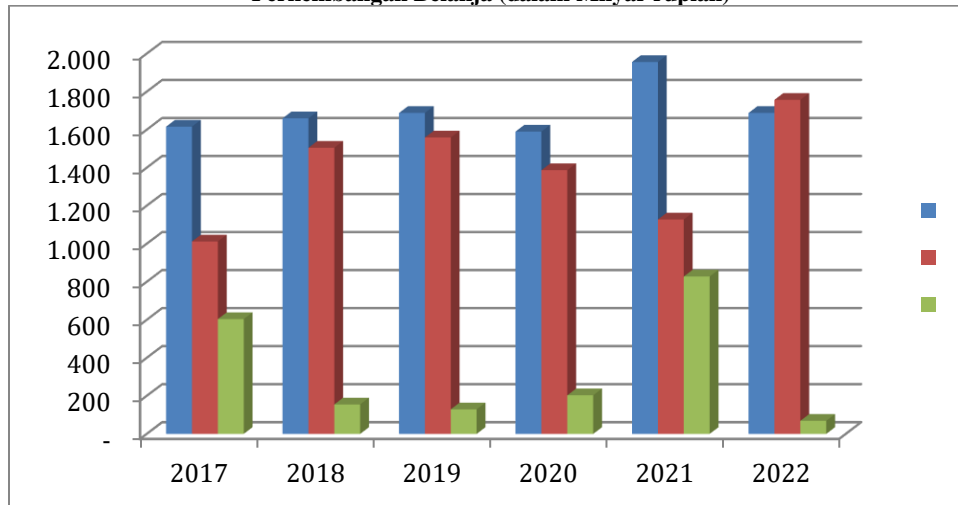
Grafik 2.1
Perkembangan Pendapatan (dalam Milyar rupiah)





**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

**Grafik 2.2
Perkembangan Belanja (dalam Milyar rupiah)**





Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

BAB III IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Berikut akan dijelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan selama kurun waktu tahun 2022.

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 dengan menggunakan metode analisis digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perhitungan Kinerja Keuangan untuk tahun yang Berakhir 31 Desember 2022				
No.	Uraian	Rasio		Kinerja
		(%)	Rekening	
1	Rasio cair (<i>quick ratio</i>) = (Aset Lancar - Persediaan) : Hutang Jangka Pendek	304,02%	Neraca	Secara umum diatas 100% yang menunjukkan kinerja keuangan baik, atau Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menjamin pembayaran kewajiban jangka pendeknya..
2	Rasio hutang terhadap total aset (<i>debt ratio</i>) = Total Hutang : Total Aset	4,27%	Neraca	Diatas nol persen yang menunjukkan tingkat rasio yang tidak baik, atau pembiayaan pembangunan sebagian besar tidak dapat ditanggung oleh kemampuan sendiri.
3	Rasio ekuitas dana terhadap total aset = Total Ekuitas : Total Aset	95,73%	Neraca	Belum mendekati 100% atau cukup baik berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar belum ditanggung oleh kemampuan sendiri.
4	Rasio belanja operasi terhadap total belanja = Belanja Operasi : Total Belanja	68,31%	LRA	Sebagian besar dana APBD Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara digunakan untuk membiayai kegiatan belanja operasional.
5	Rasio belanja modal terhadap total belanja = Belanja Modal : Total Belanja	22,21%	LRA	Dibawah 50% sebagian kecil dana APBD diperuntukkan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur
6	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan = PAD : Total Pendapatan	7,13%	LRA	Tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada pemerintah pusat/pemerintah provinsi sangat tinggi.
7	<i>Debt service coverage ratio</i> = (PAD + Bagi Hasil Pajak/Non Pajak + DAU) - (Belanja Pegawai + Belanja Barang Jasa) : Pokok Pinjaman + Bunga Pinjaman	398,14%	LRA	Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah ditetapkan paling sedikit 2,5 (dua koma lima).Pasal 7 PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjamam Daerah
8	Rasio Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan = Dana Transfer : Total Pendapatan	91,01%	LRA	tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi masih sangat tinggi.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, perlu disampaikan beberapa hal yang merupakan keberhasilan pelaksanaan APBD dan beberapa catatan penting untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022. Pengelolaan keuangan di Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilaksanakan dengan peningkatan pengendalian dalam penggunaan dana yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2022. Upaya peningkatan pengendalian dilaksanakan dengan memperketat prioritas kebutuhan dan penghematan biaya (efisiensi anggaran) dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip disiplin anggaran.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

Sebagai akibat dari kebijaksanaan pengendalian anggaran tersebut terdapat penghematan atas perencanaan dan program kerja tahunan yang telah dituangkan dalam APBD. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Unaudited disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022

Realisasi Pendapatan dan Belanja				
Realisasi Pendapatan			Rp	1.757.844.430.423,32
Realisasi Belanja			Rp	1.542.125.982.201,20
Surplus Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022			Rp	215.718.448.222,12
Realisasi Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan			Rp	41.679.216.371,11
Pengeluaran Pembiayaan			Rp	69.765.344.550,00
Pembiayaan Netto			Rp	(28.086.128.178,89)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022			Rp	187.632.320.043,23
terdiri dari :				
Kas di Kas Daerah	Rp	183.214.068.746,13		
Kas di BLUD	Rp	3.686.008.700,15		
Kas Dana BOS	Rp	529.058.204,15		
Kas Dana Kapitasi	Rp	203.184.392,80		
JUMLAH	Rp	187.632.320.043,23		

Berikut rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Fungsi Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara di sajikan pada *tabel 3.3*



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi TA 2022

No	Uraian		%Sesuai Regulasi	Jumlah Belanja pada APBD	%Dalam APBD	Realisasi	%Realisasi
1	2			3	4	5	6
A	BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN		20	342.617.005.370,00	24,95	320.631.108.213,78	25,03
A.1	Pendidikan	Belanja Pegawai		208.793.828.442,00		203.479.125.113,00	
		Belanja Barang dan Jasa		66.656.942.020,00		58.942.702.082,34	
		Belanja Hibah		28.900.244.200,00		24.788.936.800,00	
		Belanja Modal		27.303.044.141,00		23.394.626.964,44	
A.2	Kepemudaan dan Olahraga	Belanja Pegawai		-		-	
		Belanja Barang dan Jasa		3.883.961.398,00		3.424.090.583,00	
		Belanja Hibah		872.500.000,00		862.500.000,00	
		Belanja Modal		88.634.330,00		80.767.780,00	
A.3	Perpustakaan	Belanja Pegawai		4.207.731.274,00		3.823.486.179,00	
		Belanja Barang dan Jasa		1.202.428.765,00		1.168.586.932,00	
		Belanja Hibah		-		-	
		Belanja Modal		707.690.800,00		666.285.780,00	
B	BELANJA FUNGSI KESEHATAN		10	273.211.990.527,00	19,90	268.099.303.037,60	20,93
B.1	Kesehatan	Belanja Pegawai		112.380.099.929,00		101.909.801.092,60	
		Belanja Barang dan Jasa		128.372.934.628,00		137.398.943.561,00	
		Belanja Hibah		150.000.000,00		149.900.000,00	
		Belanja Modal		29.407.911.094,00		26.007.858.340,00	
B.2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belanja Pegawai		1.240.030,00		1.240.000,00	
		Belanja Barang dan Jasa		2.254.908.746,00		2.000.006.219,00	
		Belanja Hibah		-		-	
		Belanja Modal		644.896.100,00		631.553.825,00	
C	BELANJA FUNGSI PENGAWASAN		0,75	10.556.251.770,00	0,77	8.967.777.205,00	0,70
C.1	Inspektorat	Belanja Pegawai		6.580.413.605,00		5.684.533.207,00	
		Belanja Barang dan Jasa		3.458.529.585,00		2.804.526.188,00	
		Belanja Modal		517.308.580,00		478.717.810,00	
D	Dana Transfer Umum (DTU)		25	593.758.284.071,00	43,24	539.178.812.002,26	42,09
D.1	Rincian	Belanja Barang dan Jasa (Belanja Pemeliharaan)		17.755.030.370,00		15.766.622.933,00	
		Belanja Hibah		31.209.557.676,00		26.723.150.276,00	
		Belanja Bantuan Keuangan		152.868.862.864,00		144.145.459.332,00	
		Belanja Bantuan Sosial		10.771.160.000,00		10.013.670.000,00	
		Belanja Modal		381.153.673.161,00		342.529.909.461,26	
E	ALOKASI DANA DESA (ADD)		10	152.868.862.864,00	11,13	144.145.459.332,00	11,25
E.1	Keuangan	Belanja Transfer ADD		125.935.500.864,00		117.116.097.332,00	
		Belanja Transfer DD		26.933.362.000,00		27.029.362.000,00	
	TOTAL		100	1.373.012.394.602,00		1.281.022.459.790,64	93,30

Berikut rincian pencapaian program/kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terkait dengan penanganan *Stunting* di sajikan pada *tabel 3.4 dan lampiran 3.1*

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Penanganan Stunting TA2022

No	SKPD	Anggaran	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	36.920.894.217,00	36.392.999.036,00
2	Dinas Ketahanan Pangan	150.000.000,00	131.489.800,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.154.336.000,00	4.122.323.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pend	1.224.351.963,00	984.179.668,00
5	Dinas Perikanan	49.012.761,00	-
6	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanian	21.529.770.254,00	20.293.667.121,00
7	Dinas Sosial	23.234.636,00	23.165.636,00
	Jumlah	64.051.599.831,00	61.947.824.261,00



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Sumber daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap bagian. Kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat krusial untuk keberhasilan sebuah organisasi.

2) Sarana dan prasarana belum memadai

Sarana dan prasarana dalam bekerja akan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Badan Keuangan dan Aset Daerah belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai sehingga masih perlu perhatian dari semua pihak, hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai.

3) Budaya organisasi yang belum kondusif

Budaya organisasi dalam lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah masih perlu untuk ditingkatkan guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Misalnya masalah disiplin pegawai, etos kerja, ketekunan, tanggung jawab, dan seterusnya sangat esensial untuk meningkatkan kinerja.

4) Dalam hal pengelolaan pendapatan perlu peningkatan koordinasi dengan pihak - pihak terkait dan mensosialisasikan kepada masyarakat luas akan pentingnya pajak serta menggali potensi pendapatan baru, hal ini akan berdampak terhadap penetapan target pendapatan sehingga target yang ditetapkan akan tercapai.

5) Dalam hal pengelolaan keuangan diperlukan peningkatan, perbaikan tata kelola keuangan dan pelaporan pengelolaan keuangan sehingga target memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian akan tercapai.

6) Dalam hal pengelolaan aset, masih banyak yang perlu ditingkatkan terkait dengan inventarisasi aset, pemanfaatan asset, pengamanan asset dan pengawasan sehingga target memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian akan tercapai.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum. Kebijakan Akuntansi berlaku untuk setiap entitas akuntansi (SKPD dan PPKD) yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD dan entitas pelaporan (Pemerintah Daerah), dan tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan telah di lakukan perubahan melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan perubahan kedua melalui Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Kebijakan akuntansi yang di terapkan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menerapkan perhitungan berbasis Akrua.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih dalam proses penyusunan Kebijakan Akuntansi terkait pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 85/PMK.05/2021 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi, sehingga dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2022 ini Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum menerapkan dan melaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Sehingga dalam penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memerlukan koordinasi antara Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan yang disebut sebagai entitas Pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Entitas pelaporan pada pemerintah daerah terdiri dari satu entitas, yaitu Pemerintah Daerah itu sendiri.

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Termasuk entitas akuntansi Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 dipimpin oleh seorang Bupati dan memiliki seorang Sekretaris Daerah, 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seluruhnya merupakan Entitas Akuntansi. Berikut daftar SKPD tahun 2022 :

Tabel 4.1. Daftar SKPD Tahun 2022 Sebagai Entitas Akuntansi

No	--Nama OPD
1	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DPRD
3	INSPEKTORAT DAERAH
4	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
5	DINAS KESEHATAN
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKINAN DAN PERTANAHAN
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
9	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
13	DINAS KETAHANAN PANGAN
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
19	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
23	DINAS PERIKANAN
24	DINAS PERTANIAN
25	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH
28	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
31	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
32	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
33	KECAMATAN PENAJAM
34	KECAMATAN WARU
35	KECAMATAN BABULU
36	KECAMATAN SEPAKU

Selain itu, terdapat 24 UPTD dibawah Dinas Kesehatan , Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Disdikpora, Disperindag dan Dinas Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Daftar UPT OPD Tahun 2022 Sebagai Entitas Akuntansi

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN	
1	UPT JAMKESDA
2	UPT PUSKESMAS PENAJAM
3	UPT PUSKESMAS PETUNG
4	UPT PUSKESMAS BABULU
5	UPT PUSKEMAS WARU
6	UPT PUSKESMAS SEPAKU I
7	UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN
8	UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA
9	UPT PUSKESMAS SOTEK
10	UPT PUSKESMAS SEPAKU III
11	UPT PUSKESMAS MARIDAN
12	UPT PUSKESMAS SEMOI III
DINAS PERTANIAN	
1	UPT BALAI BENIH
2	UPT RUMAH POTONG HEWAN
3	UPT PEMBIBITAN DAN PENGGEMUKAN TERNAK SAPI
DINAS PEKERJAAN UMUM	
1	UPT PU KECAMATAN PENAJAM
2	UPT PU KECAMATAN BABULU
3	UPT PU KECAMATAN SEPAKU
4	UPT LABORATORIUM DAN ALAT BERAT
5	UPT PU KECAMATAN WARU
DISDIKPORA	
1	UPT PEMUDA DAN OLAH RAGA
DISPERINDAG	
1	UPT PASAR INDUK PENAJAM
DINAS PERHUBUNGAN	



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

1	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2	UPT PELABUHAN PENAJAM BULUMINUNG

Berikut tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara :

Tabel 4.3 Daftar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2022

No	Uraian	Presentase Kepemilikan
1	Perumda Air Minum Danum Taka	100 %
2	Perumda Benuo Taka	100 %
3	Perumda Penajam Benuo Taka Energi	100 %

4.2 Komponen Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

1. Komponen-komponen Laporan keuangan yang disusun oleh entitas pelaporan yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Operasional;
 - e) Laporan Arus Kas;
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Komponen laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh entitas akuntansi dalam satu set laporan keuangan pokok adalah :
 - a) Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD;
 - b) Laporan Operasional SKPD/PPKD;
 - c) Neraca SKPD/PPKD;
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas SKPD/PPKD;
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

4.4 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

1. Berbasis Kas

Basis akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (PP No.71 tahun 2010).

2. Berbasis Akrua

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, yaitu mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual (*accrual basis*), serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrua untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi. SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010).

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan Akuntansi PPU sudah menerapkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

1. Pendapatan

Pendapatan – LRA menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas di terima. Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Belanja

Belanja menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas di bayarkan. Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3. Pembiayaan

Pembiayaan menggunakan basis kas yang seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

4. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika :



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- a. Diharapkan segera untuk dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - b. Berupa kas atau setara kas
5. Aset Tidak Lancar
- Aset tidak lancar mencakup asset yang bersifat jangka Panjang untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Suatu asset diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar jika menjadi investasi jangka Panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.
6. Penyusutan
- Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan. Metode garis lurus merupakan suatu metode penyusutan dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
7. Kewajiban
- Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban disajikan berdasarkan klasifikasi jangka waktu pembayarannya, yaitu:
- a. Kewajiban jangka pendek
 - b. Kewajiban jangka panjang
8. Ekuitas
- Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
9. Pendapatan – LO
- Pendapatan – LO menggunakan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pendapatan pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau direalisasi. Pendapatan – LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
10. Beban – LO
- Beban – LO menggunakan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui beban pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban – LO merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Penjelasan lebih lanjut masing-masing Laporan Keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

5.1 RINCIAN DARI PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN LRA

Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.757.844.430.423,32 atau 104,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.688.794.657.312,00. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp535.121.119.807,53 atau 43,76% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.222.723.310.615,79.

Realisasi pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp125.386.713.912,32 Pendapatan Transfer sebesar Rp1.599.731.712.080,00 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp32.726.004.431,00. Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan pada *tabel 5.1* sebagai berikut.

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	APBD Perubahan TA.2022		%	Realisasi APBD
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		TA.2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	93.777.232.265,00	125.386.713.912,32	133,71	87.892.163.416,35
2	Pendapatan Transfer	1.569.231.038.678,0	1.599.731.712.080,00	101,94	1.105.167.350.576,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang sah	25.786.386.369,00	32.726.004.431,00	126,91	29.663.796.623,44
Jumlah		1.688.794.657.312,00	1.757.844.430.423,32	104,9	1.222.723.310.615,79

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp125.386.713.912,32 atau 133,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp93.777.232.265,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp37.505.301.095,97 atau sebesar 42,67%



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp87.892.163.416,35 adapun rincian Pendapatan Asli Daerah disajikan pada *tabel 5.2* sebagai berikut.

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Pajak Daerah	38.474.739.374,00	46.010.036.795,00	119,59	25.627.497.245,00
Pendapatan Retribusi Daerah	9.214.137.518,00	8.306.854.374,00	90,15	6.726.318.073,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.318.899.829,00	2.671.835.979,53	115,22	2.487.623.482,61
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	43.769.455.544,00	68.397.986.763,79	156,27	53.050.724.615,74
Jumlah	93.777.232.265,00	125.386.713.912,32	133,71	87.892.163.416,35

5.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp46.010.036.795,00 atau 119,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp38.474.739.374,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp20.382.539.550,00 atau 79,53% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp25.627.497.245,00. Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah disajikan pada *tabel 5.3* sebagai berikut.

Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Hotel	220.000.000,00	229.327.530,00	104,24	255.000.221,00
Pajak Restoran	1.500.000.000,00	3.231.079.208,00	215,41	2.680.477.638,00
Pajak Hiburan	22.000.000,00	37.828.925,00	171,95	37.195.999,00
Pajak Reklame	641.022.094,00	805.184.028,00	125,61	698.444.966,00
Pajak Penerangan Jalan	2.977.392.030,00	3.092.363.867,00	103,86	3.320.589.109,00
Pajak Parkir	12.000.000,00	17.883.500,00	149,03	5.827.000,00
Pajak Air Tanah	50.000.000,00	94.544.057,00	189,09	80.887.009,00
Pajak Sarang Burung Walet	52.325.250,00	24.322.000,00	46,48	60.610.500,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	1.859.248.165,00	185,92	1.425.372.843,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000.000,00	11.038.144.540,00	110,38	11.103.975.766,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	22.000.000.000,00	25.580.110.975,00	116,27	5.959.116.194,00
Jumlah	38.474.739.374,00	46.010.036.795,00	119,58	25.627.497.245,00

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
2. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
3. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pajak Sarang Burung Walet Di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pendapatan dari hasil pemungutan pajak yang merupakan Pajak Daerah yaitu :

1) Pajak Hotel

Realisasi pendapatan dari Pajak Hotel tahun anggaran 2022 sebesar Rp229.327.530,00 atau 104,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp220.000.000,00 dan mengalami **penurunan** Rp25.672.691,00 atau 10,07% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp255.000.221,00. Hal ini disebabkan adanya penurunan omset pengusaha hotel dan penurunan jumlah kunjungan tamu hotel pada masa pandemi Covid 19

2) Pajak Restoran

Realisasi pendapatan dari Pajak Restoran tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.231.079.208,00 atau 215,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Realisasi pendapatan Pajak Restoran tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp550.601.570,00 atau 20,54% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.680.477.638,00. Hal ini disebabkan adanya upaya intensifikasi pemungutan pajak restoran serta hasil pendataan wajib pajak tahun 2022.

3) Pajak Hiburan

Realisasi pendapatan dari Pajak Hiburan tahun anggaran 2022 sebesar Rp37.828.925,00 atau 171,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.000.000,00. Realisasi pendapatan dari Pajak Hiburan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp632.926,00 atau 1,70%



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp37.195.000,00. Hal ini disebabkan adanya penambahan tempat hiburan yang beroperasi sepanjang Tahun 2022

4) Pajak Reklame

Realisasi pendapatan Pajak Reklame tahun anggaran 2022 sebesar Rp805.184.028,00 atau 125,61% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp641.022.094,00. Realisasi pendapatan Pajak Reklame tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp106.739.062,00 atau 15,28% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 yang berjumlah Rp698.444.966,00. Hal ini disebabkan bertambahnya usaha-usaha mikro serta meningkatnya jenis bahan pemasangan reklame yang semula hanya berupa papan dan spanduk menjadi neon box dan bertambahnya objek pajak reklame sehingga menambah Pendapatan Asli Daerah.

5) Pajak Penerangan Jalan

Realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.092.363.867,00 atau 103,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.977.392.030,00. Realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp228.225.242,00 atau 6,87% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.320.589.109,00. Hal tersebut disebabkan adanya pembayaran atas penagihan tidak tepat waktu

6) Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp17.883.500,00 atau 149,03% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00. Realisasi Pajak Parkir tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp12.056.500,00 atau 206,91% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp5.827.000,00 hal ini disebabkan bertambahnya penggunaan fasilitas parkir di seluruh Kab Penajam Paser Utara

7) Pajak Air Tanah

Realisasi Pendapatan dari Pajak Air Tanah tahun anggaran 2022 sebesar Rp94.544.057,00 atau 189,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00. Realisasi Pendapatan dari Pajak Air Tanah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp13.657.048,00 atau 16,88% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp80.887.009,00. Hal ini disebabkan adanya upaya intensifikasi baik penyampaian SPTPD, SKP, maupun penagihan tepat waktu Pajak air Tanah.

8) Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet tahun anggaran 2022 sebesar Rp24.322.000,00 atau 46,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp52.325.250,00. Realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp36.288.500,00 atau 59,87% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp.60.610.500,00. Hal ini disebabkan adanya penurunan hasil produksi sarang burung walet dan kurang kepatuhan wajib pajak sarang burung walet.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Berdasarkan *database* dari DPMPTSP terdapat 710 bangunan Gedung sarang burung wallet yang sudah memiliki IMB/PBG. Berdasarkan *Website* Badan Pendapatan Daerah Kab. Penajam Paser Utara jumlah wajib Pajak Sarang burung wallet yang sudah memiliki NPWPD sebanyak 92 wajib pajak sehingga masih terdapat potensi Pajak Sarang burung wallet yang belum tergali/diterima secara optimal.

9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.859.248.165,00 atau 185,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp433.875.322,00 atau 30,44% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.425.372.843,00. Hal ini disebabkan bertambahnya pembangunan fisik infrastruktur dan pembangunan perumahan sehingga pemakaian bahan mineral bukan logam dan batuan semakin meningkat.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tahun anggaran 2022 sebesar Rp11.038.144.540,00 atau 110,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00. Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tersebut mengalami **penurunan** Rp65.831.226,00 atau 0,59% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp11.103.975.766,00.

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun anggaran 2022 sebesar Rp25.580.110.975,00 atau 116,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.000.000.000,00 Realisasi pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp19.620.994.781,00 atau 329,26% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp5.959.116.194,00. Hal ini disebabkan Peningkatan Pemohon BPHTB dari Masyarakat dikarenakan adanya program Gratis dalam hal pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Peningkatan Permohonan Masyarakat dalam Pembuatan Segel dan Sertifikat Tanah.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp8.306.854.374,00 atau 90,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.214.137.518,00. Realisasi pendapatan Retribusi Daerah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp1.580.536.301,00 atau 23,50% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp6.726.318.073,00. Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun anggaran 2022 disajikan pada *tabel 5.4* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.4 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1. Retribusi Jasa Umum	5.460.714.020,00	2.302.420.254,00	42,16	1.876.319.607,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.263.714.020,00	2.084.287.826,00	39,60	1.697.852.800,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	22.000.000,00	11.993.927,00	54,57	8.453.407,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum	5.000.000,00	550.000,00	11,00	25.400.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	170.000.000,00	205.576.501,00	120,93	144.613.400,00
2. Retribusi Jasa Usaha	3.483.440.000,00	5.589.723.623,00	160,47	3.014.739.591,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	732.402.650,00	0,00	571.949.250,00
Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau pertokoan	302.090.000,00	433.703.391,00	143,57	292.675.000,00
Retribusi Terminal	3.000.000,00	3.980.000,00	132,67	3.580.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	24.750.000,00	16.110.000,00	65,09	16.710.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	3.120.000.000,00	4.369.927.582,00	140,06	2.129.825.341,00
3. Retribusi Perizinan Tertentu	269.983.498,00	414.722.497,00	153,61	1.835.258.875,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	269.983.498,00	414.697.497,00	153,60	1.833.633.875,00
Retribusi Ijin trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	25.000,00	0,00	1.625.000,00
JUMLAH (1+2+3)	9.214.137.518,00	8.306.854.374,00	90,15	6.726.318.073,00

Dasar hukum pemungutan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah No.3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
3. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
4. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
7. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

9. Peraturan Bupati No.24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Jumlah tersebut merupakan pendapatan/penerimaan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang bersumber dari pengenaan retribusi atas pemberian jasa kepada para pihak terkait.

Realisasi Retribusi Daerah yang melampaui target yang ditetapkan diantaranya adalah realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sejumlah Rp414.697.497,00 atau 153,60% dari target yang ditetapkan Rp269.983.498,00.

1. Retribusi Jasa Umum

1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.084.287.826,00 atau 39,60% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.263.714.020,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp386.435.026,00 atau 22,76% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.697.852.800,00, hal ini disebabkan Pandemi Covid sudah menurun sehingga kunjungan pasien ke Puskesmas mulai meningkat lalu Perda Retribusi sudah di tetapkan secara menyeluruh dan adanya tambahan Retribusi dari Rumah Sakit Sepaku

1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp11.993.927,00 atau 54,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp3.540.520,00 atau 41,88% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp8.453.407,00 disebabkan bertambahnya subjek retribusi/wajib retribusi dalam Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

1.3 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp550.000,00 atau 11,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp24.850.000,00 atau 97,83% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp25.400.000,00. Disebabkan berkurangnya setoran oleh pemungut dipasar induk penajam,

1.4 Retribusi Pelayanan Pasar

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar pada tahun anggaran 2022 sebesar *Nihil* dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar *Nihil*.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

1.5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp205.576.501,00 atau 120,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp170.000.000,00. Realisasi Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp60.963.101,00 atau 42,16% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp144.613.400,00 disebabkan kesadaran pemilik kendaraan yang telah patuh melakukan uji berkala sehingga mempengaruhi penerimaan retribusi menjadi meningkat

2. Retribusi Jasa Usaha

2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp732.402.650,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp160.453.400,00 atau 28,05% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp571.949.250. Faktor Dominan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami peningkatan di karenakan adanya penerimaan sewa atas kerjasama dengan Universitas Guna Darma dan Sewa lahan oleh PT. Krakatau Bandar Samudera.

2.2 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp433.703.391,00 atau 143,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp302.090.000,00. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp141.028.391,00 atau 48,19% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp292.675.000. Hal ini disebabkan 1. Geliat perekonomian yang meningkat pasca Pandemi Covid 19 berakhir. Aktivitas perdagangan di pasar-pasar mulai ramai terkait pelonggaran status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah. 2. Beroperasinya Gedung dan Lokasi Pasar Babulu yang baru menjadi salah satu sumber peningkatan Pendapatan melalui retribusi pasar. 3. Bertambahnya jumlah Pedagang dan hari-hari Operasional pasar yang tidak lagi terpaku pada hari pasaran (Senin dan Jum'at) dan sumber lain dari aktivitas di Pasar Babulu diantaranya Sampah dan parkir yang pengelolaannya bekerjasama dengan Bumdes Babulu Darat.

2.3 Retribusi Terminal

Realisasi Retribusi Terminal pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.980.000,00 atau 132,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00. Realisasi Retribusi Terminal tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp400.000,00 atau 11,17% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.580.000. Hal tersebut disebabkan Peningkatan Jumlah Penumpang sama dengan peningkatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Speed boat



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

2.4 Retribusi Tempat Khusus Parkir

Realisasi Tempat Khusus Parkir pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp33.600.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp33.600.000,00. Realisasi Retribusi Terminal tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp0,00 atau 100% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar *Nihil*

2.5 Retribusi Rumah Potong Hewan

Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 16.110.000,00 atau 65,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp24.750.000,00. Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp600.000,00 atau 3,59% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp16.710.000,00. Hal ini disebabkan karena tahun 2022 sapi terkena penyakit mulut dan kaki (PMK) dan sapi yang dipotong harus di vaksin terlebih dahulu.

2.6 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.369.927.582,00 atau 140,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.120.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tersebut mengalami **Peningkatan** sebesar Rp2.240.102.241,00 atau 105,18% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.129.825.341,00. disebabkan meningkatnya kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

3.1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp414.697.497,00 atau 153,60% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp269.983.498,00. Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tersebut mengalami **Penurunan** sebesar Rp1.418.936.378,00 atau 77,38% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.833.633.875,00. Penurunan tersebut disebabkan adanya peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Tentang perubahan dari IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

3.2 Retribusi Izin Angkutan Umum di jalan

Realisasi Retribusi Izin Angkutan Umum di Jalan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp25.000,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar *Nihil*. Realisasi Retribusi Izin Angkutan Umum di Jalan tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp1.600.000,00 atau 98,46% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.625.000,00.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.671.835.979,53 atau 115,22% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.318.899.829,00. Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp184.212.496,92 atau 7,41% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.487.623.482,61. Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun anggaran 2021 disajikan pada *tabel 5.5* sebagai berikut.

Tabel 5.5 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.318.899.829,00	2.671.835.979,53	115,22	2.487.623.482,61
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.318.899.829,00	2.671.835.979,53	115,22	2.487.623.482,61
JUMLAH	2.318.899.829,00	2.671.835.979,53	115,22	2.487.623.482,61

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berupa Dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Bank Kaltimara yang terealisasi sebesar Rp2.671.835.979,53 atau 115,22% dari target yang ditetapkan Rp2.318.899.829,00. Pada tahun anggaran 2022 Perumda Benuo Taka tidak memberikan Dividen kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp68.397.986.763,79 atau 156,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp43.769.455.544,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp15.347.262.148,05 atau 28,93% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp53.050.724.615,74.

Faktor dominan kenaikan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tersebut utamanya disebabkan oleh realisasi pendapatan dari pengembalian meningkat sebesar Rp7.229.788.799,83. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun anggaran 2022 disajikan pada *tabel 5.6* sebagai berikut.

Tabel 5.6 Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
a. Penerimaan Jasa Giro	1.815.868.227,00	931.322.909,99	51,29	222.895.938,42
b. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	111.971.833,54	0,00	138.163.904,52
c. Pendapatan Denda	185.954.917,00	342.479.980,00	184,17	411.495.375,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Daerah				
d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	167.632.400,00	16.900,00	0,01	136.677.965,00
e. Pendapatan dari Pengembalian	6.500.000.000,00	7.229.788.799,83	0,00	4.063.388.889,15
f. Pendapatan BLUD	35.000.000.000,00	59.752.452.594,43	170,72	39.678.913.538,65
g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	8.371.757.808,00
h. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000.000,00	29.953.746,00	29,95	27.431.197,00
JUMLAH	43.769.455.544,00	68.397.986.763,79	156,27	53.050.724.615,74

Pendapatan Lain-Lain Yang Sah terdiri sebagai berikut.

1. Penerimaan Jasa Giro

Realisasi Penerimaan Jasa Giro pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp931.322.909,99 atau 51,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.815.868.227,00 Realisasi Penerimaan Jasa giro tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp708.426.971,57 atau 317,83% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp222.895.938,42. Penerimaan Jasa Giro bersumber dari Jasa Giro Kasda dan Jasa Giro Pemda Lainnya. Realisasi penerimaan Jasa Giro Kasda Sebesar Rp858.078.675,67 dan Realisasi penerimaan Jasa Giro Pemda Lainnya yang bersumber dari rekening SKPD, rekening Sekolah dan rekening Desa sebesar Rp73.244.234,32.

2. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp111.971.833,54 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar *Nihil*. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp26.192.070,98 atau 18,96% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp138.163.904,52.

3. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp342.479.980,00 atau 184,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp185.954.917,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp69.015.395,00 atau 16,77% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp411.495.375,00.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

4. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp16.900,00 atau 0,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp167.632.400,00. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp136.661.065,00 atau 99,99% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp136.677.965,00. Penurunan tersebut dikarenakan pembayaran retribusi dilakukan sebelum jatuh tempo.

5. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp7.229.788.799,83 atau 111,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.500.000.000,00. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian tersebut mengalami **Peningkatan** sebesar Rp3.166.399.910,68 atau 77,93% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.063.388.889,15.

6. Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp59.752.452.594,43 atau 170,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35.000.000.000,00. Realisasi Pendapatan BLUD tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp20.073.539.055,78 atau 50,59% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp39.678.913.538,65.

7. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada tahun anggaran 2022 sebesar *Nihil* atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar *Nihil*. Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp8.371.757.808,00 atau 100% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp8.371.757.808,00 hal ini disebabkan realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP berpindah pos rekening ke rekening Hibah.

8. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp29.953.746,00 atau 29,95% yang terdiri dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, UKM sebesar Rp16.815.550,00 dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Alsintan sebesar Rp13.138.196,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp2.522.549,00 atau 9,20% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp27.431.197,00

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Realisasi Pendapatan Transfer tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.599.731.712.080,00 atau 101,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.569.231.038.678,00. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp494.564.361.504,00 atau 44,75% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.105.167.350.576,00. Faktor dominan peningkatan pendapatan transfer tersebut utamanya disebabkan meningkatnya realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

perimbangan sebesar Rp455.541.962.637,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer disajikan pada *tabel 5.7* sebagai berikut.

Tabel 5.7 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Transfer	1.569.231.038.678,00	1.599.731.712.080,00	101,94	1.105.167.350.576,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.276.181.058.678,00	1.293.635.932.822,00	101,37	789.105.756.185,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	34.032.614.000,00	45.430.588.000,00	133,49	94.418.802.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah	259.017.366.000,00	260.665.191.258,00	100,64	221.642.792.391,00
JUMLAH	1.569.231.038.678,00	1.599.731.712.080,00	101,94	1.105.167.350.576,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.293.635.932.822,00 atau 101,37% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.276.181.058.678,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp504.530.176.637,00 atau 63,94% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp789.105.756.185,00.

Faktor dominan peningkatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan tersebut utamanya disebabkan peningkatan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebesar Rp80.646.923.776,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan disajikan pada *tabel 5.8* sebagai berikut.

Tabel 5.8 Realisasi Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	872.065.039.678,00	951.130.704.178,00	109,07	390.052.289.418,00
Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)	272.437.796.000,00	262.161.465.209,00	96,23	271.407.999.000,00
Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	41.119.905.000,00	34.399.833.646,00	83,66	75.661.142.165,00
Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	90.558.318.000,00	45.943.929.789,00	50,73	51.984.325.602,00
JUMLAH	1.276.181.058.678,00	1.293.635.932.822,00	101,37	789.105.756.185,00

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Realisasi Dana Transfer Umum Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2022 sebesar Rp951.130.704.178,00 atau 109,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp872.065.039.678,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp561.078.414.760,00 atau 143,85% dibandingkan dengan Realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp390.052.289.418,00. Dana Bagi



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Hasil yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2022.

Faktor dominan peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak tersebut utamanya disebabkan peningkatan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti sebesar Rp419.809.032.383,00 Rincian realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak disajikan pada *tabel 5.9* dan *lampiran 5.1* sebagai berikut.

Tabel 5.9 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	39.900.304.000,00	41.005.701.758,00	102,77	45.879.045.663,00
DBH PPh Pasal 21	17.941.322.000,00	17.941.322.000,00	100,00	16.996.221.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	471.977.000,00	471.977.000,00	100,00	390.099.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	261.000,00	0,00	0,00	4.150,00
DBH SDA Minyak Bumi	56.652.742.737,00	99.301.028.476,00	175,28	18.654.104.700,00
DBH SDA Gas Bumi	79.822.442.775,00	105.437.369.583,00	132,09	32.833.335.625,00
DBH SDA Mineral dan Batu Bara Land Rent	1.893.335.752,00	2.389.061.174,00	126,18	1.112.442.165,00
DBH SDA Mineral dan Batubara Royalty	665.797.274.414,00	674.998.864.187,00	101,38	255.189.831.804,00
DBH SDA Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.627.069.000,00	7.627.069.000,00	100,00	16.073.400.236,00
DBH SDA Kehutanan – Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0,00	0,00	0,00	1.566.185.925,00
DBH SDA Sumber Daya Alam Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.357.619.150,00
JUMLAH	872.065.039.678,00	951.130.704.178,00	109,07	390.052.289.418,00

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2022 sebesar Rp262.161.465.209,00 atau 96,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp272.437.796.000,00. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp9.246.533.791,00 atau sebesar 3,41% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp 271.407.999.000,00. Rincian realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum disajikan pada *tabel 5.10* sebagai berikut.

Tabel 5.10 Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Dana Alokasi Umum	272.437.796.000,00	262.161.465.209,00	96,23	271.407.999.000,00
JUMLAH	272.437.796.000,00	262.161.465.209,00	96,23	271.407.999.000,00

Pada tahun anggaran 2022 Dana Alokasi Umum sebesar Rp262.161.465.209,00 diperuntukkan untuk pembayaran belanja pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah Provinsi Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Besaran alokasi Dana Alokasi Umum telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2022 sebesar Rp34.399.833.646,00 atau 83,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp41.119.905.000,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp41.261.308.519,00 atau sebesar 54,53% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp75.661.142.165,00. Rincian realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus disajikan pada *tabel 5.11* dan *lampiran 5.2* sebagai berikut.

Tabel 5.11 Realisasi Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.534.123.000,00	1.534.123.000,00	100,00	1.042.361.250,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.081.263.000,00	2.970.027.630,00	96,39	3.737.351.550,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	507.691.000,00	466.529.580,00	91,89	9.938.660.800,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	17.968.175.000,00	0,00	0,00	1.982.383.161,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	2.751.169.556,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	1.572.851.330,00	0,00	2.050.320.393,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	9.633.700.401,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	2.246.671.035,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	215.628.940,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	628.073.825,00	0,00	1.361.643.900,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	848.750.000,00	0,00	298.040.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.155.959.435,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.593.813.367,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.725.945.000,00	7.562.492.355,00	86,67	13.195.247.700,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	5.148.372.000,00	4.165.703.000,00	80,91	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	17.175.611.269,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.154.336.000,00	4.154.336.000,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	8.165.203.849,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	8.966.704.900,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	647.617.585,00	0,00	0,00
JUMLAH	41.119.905.000,00	34.399.833.646,00	83,66	75.661.142.165,00



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik

Realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun anggaran 2022 sebesar Rp45.943.929.789,00 atau 50,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp90.558.318.000,00 sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp6.040.395.813,00 atau 11,62% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp51.984.325.602,00. Rincian realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik disajikan pada *tabel 5.12* dan *lampiran 5.3* sebagai berikut.

Tabel 5.12 Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	30.294.460.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.145.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	44.084.221.000,00	42.918.712.860,00	97,36	44.972.031.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.437.000.000,00	833.000.000,00	57,97	742.500.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.410.040.000,00	0,00	0,00	2.820.164.360,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	340.910.000,00	0,00	0,00	188.550.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.975.626.000,00	449.638.338,00	6,45	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	104.335.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.106.772.000,00	1.494.265.868,00	70,93	1.558.764.153,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	981.453.089,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	388.654.000,00	49.669.750,00	12,78	167.586.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	172.527.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	271.300.000,00	198.642.973,00	73,22	380.750.000,00
JUMLAH	90.558.318.000,00	45.943.929.789,00	50,73	51.984.325.602,00

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun anggaran 2022 sebesar Rp45.430.588.000,00 atau 133,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp34.032.614.000,00. Sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp48.988.214.000,00 atau 51,88% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp94.418.802.000,00.

Faktor dominan penurunan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tersebut utamanya disebabkan penurunan realisasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp37.242.465.000,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya disajikan pada *tabel 5.13* sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

Tabel 5.13 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Dana Insentif Daerah	7.003.252.000,00	18.401.226.000,00	262,75	55.643.691.000,00
Dana Desa	27.029.362.000,00	27.029.362.000,00	100,00	38.775.111.000,00
JUMLAH	34.032.614.000,00	45.430.588.000,00	133,49	94.418.802.000,00

5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp18.401.226.000,00 atau 262,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.003.252.000,00. Realisasi Dana Insentif Daerah tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp37.242.465.000,00 atau sebesar 66,93% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp55.643.691.000,00. Rincian realisasi Dana Insentif Daerah (DID) disajikan pada *tabel 5.14* sebagai berikut.

Tabel 5.14 Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Dana Insentif Daerah	7.003.252.000,00	18.401.226.000,00	262,75	55.643.691.000,00
JUMLAH	7.003.252.000,00	18.401.226.000,00	262,75	55.643.691.000,00

Rincian Realisasi penerimaan Dana Insentif Daerah sebesar Rp18.401.226.000,00 dapat dirinci sebagai berikut

1. Penyaluran Tahap 1 disalurkan pada tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp3.501.626,00
2. Penyaluran Tahap 2 disalurkan pada tanggal 28 Nopember 2022 sebesar Rp3.501.626,00
3. Dana Insentif Daerah Kinerja disalurkan pada tanggal 9 Desember 2022 sebesar Rp11.397.974.000,00

5.1.1.2.2.2 Dana Desa

Realisasi Pendapatan Dana Desa tahun anggaran 2022 sebesar Rp27.029.362.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp27.029.362.000,00 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Realisasi Pendapatan Dana Desa tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp11.745.749.000,00 atau 30,29% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp38.775.111.000,00. Rincian Realisasi Dana Desa disajikan pada *tabel 5.15* dan *lampiran 5.4 sbb* :

Tabel 5.15 Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Dana Desa	27.029.362.000,00	27.029.362.000,00	100,00	38.775.111.000,00
JUMLAH	27.029.362.000,00	27.029.362.000,00	100,00	38.775.111.000,00



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

5.1.1.2.3 Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp260.665.191.258,00 atau 100,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp259.017.366.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp39.022.398.867,00 atau 17,61% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp221.642.792.391,00

Faktor dominan peningkatan Transfer Antar Daerah tersebut utamanya disebabkan peningkatan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp37.269.932.867,00 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah disajikan pada tabel 5.16 sebagai berikut.

Tabel 5.16 Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	146.172.416.000,00	147.916.241.258,00	101,19	110.646.308.391,00
Bantuan Keuangan	112.844.950.000,00	112.748.950.000,00	99,91	110.996.484.000,00
JUMLAH	259.017.366.000,00	260.665.191.258,00	100,64	221.642.792.391,00

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun anggaran 2022 sebesar Rp147.916.241.258,00 atau 101,19% dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp146.172.416.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp37.269.932.867,00 atau 33,68% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp110.646.308.391,00. Rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi disajikan pada *tabel 5.17* dan *lampiran 5.5* sebagai berikut:

Tabel 5.17 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	20.811.951.000,00	19.963.296.000,00	95,92	15.802.428.000,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	20.468.568.000,00	18.355.725.000,00	89,68	15.993.385.000,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	94.233.318.000,00	96.068.848.000,00	101,95	67.365.926.000,00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan	319.281.000,00	241.591.000,00	75,67	225.703.000,00
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	10.339.298.000,00	13.286.781.258,00	128,51	11.258.866.391,00
JUMLAH	146.172.416.000,00	147.916.241.258,00	101,19	110.646.308.391,00

Jumlah alokasi pendapatan bagi hasil pajak provinsi telah di atur dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 900/7205/2913-III/BPKAD tanggal 6 Desember 2021 tentang Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kab/Kota APBD Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2021



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan tahun anggaran 2022 sebesar Rp112.748.950.000,00 atau 99,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp112.844.950.000,00. Realisasi Bantuan Keuangan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp1.752.466.000,00 atau 1,58% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp110.996.484.000,00. Rincian realisasi Bantuan Keuangan Provinsi disajikan pada *tabel 5.18 dan lampiran 5.6* sebagai berikut.

Tabel 5.18 Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	112.844.950.000,00	112.748.950.000,00	99,91	110.996.484.000,00
JUMLAH	112.844.950.000,00	112.748.950.000,00	99,91	110.996.484.000,00

Tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah daerah telah di atur dalam Peraturan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah tanggal 24 Agustus 2020. Untuk jumlah alokasi pendapatan dari Bantuan Keuangan Propinsi telah di atur dalam Surat Ketetapan Gubernur Nomor 998/3841/1004-III/BPKAD tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan pada APBD TA 2022 setelah Klarifikasi tanggal 28 April 2022.

5.1.1.3 LAIN – LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp32.726.004.431,00 atau 126,91% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp25.786.386.369,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp3.062.207.807,56 atau 10,32% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp29.663.796.623,44. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah disajikan pada *tabel 5.19* sebagai berikut.

Tabel 5.19 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Hibah	5.852.000.000,00	1.641.068.478,00	28,04	2.661.500.000,00
Pendapatan Lainnya	19.934.386.369,00	31.084.935.953,00	155,94	27.002.296.623,44
JUMLAH	25.786.386.369,00	32.726.004.431,00	126,91	29.663.796.623,44

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.641.068.478,00 atau 28,04% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp5.852.000.000,00. Realisasi Pendapatan Hibah tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp1.020.431.522,00 atau 38,34% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.661.500.000,00. Rincian realisasi Pendapatan Hibah disajikan pada *tabel 5.20* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.20 Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.852.000.000,00	1.641.068.478,00	28,04	2.661.500.000,00
JUMLAH	5.852.000.000,00	1.641.068.478,00	28,04	2.661.500.000,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.641.068.478,00 merupakan hibah berupa uang yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Danum Taka.

5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya

Realisasi Pendapatan Lainnya terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp8.958.752.511,00 atau 44,94% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp19.934.386.369,00 dan Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp22.126.183.442,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp4.082.639.329,56 atau 15,12% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp27.002.296.623,44. Rincian realisasi Pendapatan Lainnya disajikan pada *tabel 5.21* sebagai berikut.

Tabel 5.21 Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	22.126.183.442,00	0,00	27.002.296.623,44
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	19.934.386.369,00	8.958.752.511,00	44,94	0,00
JUMLAH	19.934.386.369,00	31.084.935.953,00	155,94	27.002.296.623,44

Pendapatan Hibah Dana BOS

Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp22.126.183.443 per jenjang sekolah dapat dirinci sebagai berikut :

Sekolah Dasar (SD)	Rp15.888.017.346,00
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Rp6.238.166.096,00

Rincian Realisasi Pendapatan dan belanja BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tersaji pada *lampiran 5.7*.

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 tentang penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan biaya Operasional Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah menyebutkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat Non Spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. Dan Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP tingkat pertama sebesar Rp8.958.752.511,00 terdapat pada sebelas (11) puskesmas yang tersebar di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dirinci sebagai berikut :

1. UPT Puskesmas Penajam	Rp1.886.238.736,00
2. UPT Puskesmas Petung	Rp1.725.058.579,00
3. UPT Puskesmas Waru	Rp 920.036.432,00
4. UPT Puskesmas Babulu	Rp1.448.601.946,00
5. UPT Puskesmas Sebakung Jaya	Rp 269.688.978,00
6. UPT Puskesmas Gunung Intan	Rp 358.413.931,00
7. UPT Puskesmas Sotek	Rp 561.429.799,00
8. UPT Puskesmas Maridan	Rp 533.618.024,00
9. UPT Puskesmas Sepaku I	Rp 554.140.343,00
10. UPT Puskesmas Sepaku III	Rp 418.417.263,00
11. UPT Puskesmas Semoi II	Rp 283.108.480,00

5.1.2 BELANJA

Realisasi belanja dan transfer tahun anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp1.542.125.982.201,20 atau 92,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.660.708.529.132,00. Realisasi belanja dan transfer tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp413.813.179.804,12 atau 36,68% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.128.312.802.397,08. Realisasi belanja tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.542.125.982.201,20 terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp1.053.409.040.915,94, Belanja Modal sebesar Rp342.529.909.461,26, Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.041.572.492,00. Belanja Transfer sebesar Rp144.145.459.332,00. Peningkatan belanja daerah tersebut disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer Bantuan Keuangan dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian belanja disajikan pada *tabel 5.22* sebagai berikut.

Tabel 5.22 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO.	Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		TA 2021 (Rp)
1.	Belanja Operasi	1.108.320.927.034,00	1.053.409.040.915,94	95,05	790.298.231.505,26
	Belanja Pegawai	541.230.638.823,00	511.854.352.851,60	94,57	380.071.503.726,00
	Belanja Barang	502.454.813.902,00	482.164.061.155,34	95,96	382.521.030.936,26
	Belanja Bunga	22.654.756.633,00	22.653.806.633,00	100,00	16.637.316.584,00
	Belanja Hibah	31.209.557.676,00	26.723.150.276,00	85,62	8.375.936.894,00
	Belanja Bantuan Sosial	10.771.160.000,00	10.013.670.000,00	92,97	2.692.443.365,00
2.	Belanja Modal	381.153.673.161,00	342.529.909.461,26	89,87	235.384.436.356,82
	Belanja Tanah	8.431.445.371,00	7.503.359.371,00	88,99	292.827.035,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	51.185.360.360,00	46.866.781.838,72	91,56	48.618.407.921,82
	Belanja Bangunan dan Gedung	58.449.742.193,00	53.251.596.734,72	91,11	29.110.006.350,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	259.192.806.262,00	231.938.512.822,82	89,48	152.007.787.009,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.894.318.975,00	2.969.658.694,00	76,26	5.355.408.041,00



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

NO.	Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		TA 2021 (Rp)
3.	Belanja Tak Terduga	18.365.066.073,00	2.041.572.492,00	11,12	6.108.404.841,00
	Belanja Tak Terduga	18.365.066.073,00	2.041.572.492,00	11,12	6.108.404.841,00
4.	TRANSFER	152.868.862.864,00	144.145.459.332,00	94,29	96.521.729.694,00
	Transfer Bantuan Keuangan	152.868.862.864,00	144.145.459.332,00	94,29	96.521.729.694,00
	JUMLAH	1.660.708.529.132,00	1.542.125.982.201,20	92,86	1.128.312.802.397,08

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.053.409.040.915,94 atau 95,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.108.320.927.034,00. Realisasi Belanja Operasi tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp263.110.809.410,68 atau 33,29% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp790.298.231.505,26.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp511.854.352.851,60 atau 94,57% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp541.230.638.823,00. Realisasi Belanja Pegawai tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp131.782.849.125,60 atau sebesar 34,67% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp380.071.503.726,00. Faktor dominan kenaikan Belanja Pegawai tersebut utamanya disebabkan adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pembayaran utang belanja pegawai sebesar Rp80.539.610.065. Rincian Belanja Pegawai disajikan pada *tabel 5.23* dan *lampiran 5.8* sebagai berikut.

Tabel 5.23 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Rekening	Anggaran APBD TA 2022	Realisasi APBD TA 2022		Jumlah	%	Realisasi APBD TA 2021
		Realisasi Tahun Berjalan	Realisasi Utang			
Gaji dan Tunjangan	246.793.616.945,00	239.408.417.361,00	0,00	239.408.417.361,00	97,01%	224.813.100.672,00
Tambahan Penghasilan PNS	201.194.743.619,00	111.532.107.228,00	75.900.372.525,00	187.432.479.753,00	93,16%	78.394.755.212,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	69.129.407.572,00	58.370.600.584,60	4.290.144.000,00	62.660.744.584,60	90,64%	58.001.635.489,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.083.917.300,00	18.381.902.205,00	323.053.540,00	18.704.955.745,00	98,01%	14.552.491.258,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	171.606.036,00	91.111.254,00	0,00	91.111.254,00	53,09%	168.917.298,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	738.579.911,00	705.980.000,00	26.040.000,00	732.020.000,00	99,11%	686.440.000,00
Belanja Pegawai BLUD	4.118.767.440,00	2.824.624.154,00	0,00	2.824.624.154,00	68,58%	3.454.163.797,00
Jumlah	541.230.638.823,00	431.314.742.786,60	80.539.610.065,00	511.854.352.851,60	94,57%	380.071.503.726,00



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Perkembangan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Penajam Paser Utara selama Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1 Jumlah ASN awal Tahun 2022			
	Pegawai Negeri Sipil		3424 Orang
	PPPK		11 Orang
2 Penambahan selama Tahun 2022			
a.	Pegawai yang masuk ke PPU	5	Orang
b.	CPNS	258	Orang
c.	PPPK (jika ada)	222	Orang
	Jumlah Penambahan		485 Orang
3 Pengurangan selama Tahun 2022			
a.	Pegawai yang meninggal	19	Orang
b.	Pegawai pindah keluar PPU	26	Orang
c.	Pegawai yang pensiun/diberhentikan	80	Orang
	Jumlah Pengurangan		125 Orang
4 Jumlah ASN per 31 Desember 2022			3795 Orang

5.1.2.1.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp482.164.061.155,34 atau 95,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp502.454.813.902,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp99.643.030.219,08 atau 26,05% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp382.521.030.936,26. Faktor dominan kenaikan Belanja Barang dan Jasa tersebut utamanya disebabkan adanya pembayaran utang belanja Barang dan Jasa sebesar Rp124.149.004.352,00 dan meningkatnya realisasi belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp23.358.268.689,00 dikarenakan adanya pembayaran utang belanja BLUD dan peningkatan belanja operasional untuk pembelian obat. Rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan pada *tabel 5.24* dan *lampiran 5.9, lampiran 5.10, lampiran 5.11, lampiran 5.12* sebagai berikut.

Tabel 5.24 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Rekening	Anggaran 2022	Realisasi TA 2022		Jumlah	%	Realisasi TA 2021
		Realisasi Tahun Berjalan	Realisasi Utang			
Belanja Barang	80.036.263.859,00	47.747.864.019,00	24.386.428.087,00	72.134.292.106,00	90,13%	63.649.505.334,60
Belanja Jasa	278.674.445.999,00	194.155.486.260,00	65.767.189.844,00	259.922.676.104,00	93,27%	224.935.860.140,00
Belanja Pemeliharaan	17.755.030.370,00	11.594.408.085,00	4.172.214.848,00	15.766.622.933,00	88,80%	6.910.555.755,00
Belanja Perjalanan Dinas	57.506.401.728,00	45.864.804.556,00	6.447.776.322,00	52.312.580.878,00	90,97%	30.145.585.659,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.115.377.033,00	9.421.904.142,00	2.516.768.725,00	11.938.672.867,00	78,98%	5.816.292.063,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	21.677.870.400,00	16.188.670.018,34	-	16.188.670.018,34	74,68%	20.520.954.424,66
Belanja Barang Dan Jasa BLUD	31.689.424.513,00	33.041.919.723,00	20.858.626.526,00	53.900.546.249,00	170,09%	30.542.277.560,00
Jumlah	502.454.813.902,00	358.015.056.803,34	124.149.004.352,00	482.164.061.155,34	95,96%	382.521.030.936,26



5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga tahun anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp22.653.806.633,00 atau 100,00% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.654.756.633,00. Realisasi Bunga tersebut diperuntukan untuk pembayaran bunga pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Rincian Belanja Bunga disajikan pada *tabel 5.25* sebagai berikut.

Tabel 5.25 Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	22.654.756.633,00	22.653.806.633,00	100,00	16.637.316.584,00
JUMLAH	22.654.756.633,00	22.653.806.633,00	100,00	16.637.316.584,00

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp26.723.150.276,00 atau 85,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp31.209.557.676,00. Realisasi Belanja Hibah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp18.347.213.382,00 atau 219,05% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp8.375.936.894,00.

Faktor dominan kenaikan belanja hibah tersebut utamanya disebabkan meningkatnya Belanja Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial untuk mendanai kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang tidak terbayar. Rincian realisasi belanja hibah disajikan pada *tabel 5.26* dan *lampiran 5.13* sebagai berikut.

Tabel 5.26 Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	350.000.000,00	90.000.000,00	25,71	90.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.087.744.200,00	25.861.336.800,00	85,95	7.514.123.418,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	771.813.476,00	771.813.476,00	100,00	771.813.476,00
JUMLAH	31.209.557.676,00	26.723.150.276,00	85,62	8.375.936.894,00

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp10.013.670.000,00 atau 92,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.771.160.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp7.321.226.635,00 atau sebesar 271,92% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.692.443.365,00. Rincian realisasi belanja bantuan sosial disajikan pada *tabel 5.27* dan *lampiran 5.14* sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

Tabel 5.27 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		TA 2021 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	10.491.160.000,00	9.733.670.000,00	92,78	2.692.443.365,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	280.000.000,00	280.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH	10.771.160.000,00	10.013.670.000,00	92,97	2.692.443.365,00

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp342.529.909.461,26 atau 89,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp381.153.673.161,00. Realisasi Belanja Modal tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp107.145.473.104,44 atau sebesar 45,52% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp235.384.436.356,82.

Faktor dominan kenaikan belanja Modal tersebut utamanya disebabkan adanya pembayaran utang belanja Modal sebesar Rp184.272.346.991,04. Rincian realisasi belanja modal disajikan pada *tabel 5.28* dan *lampiran 5.15* sebagai berikut.

Tabel 5.28 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022	Realisasi TA 2022			%	Realisasi TA 2021 (Rp)
		Realisasi Tahun Berjalan	Realisasi Utang	Realisasi (Rp)		
Belanja Tanah	8.431.445.371,00	2.368.161.591,00	5.135.197.780,00	7.503.359.371,00	88,99%	292.827.035,00
Belanja Peralatan dan Mesin	51.185.360.360,00	30.684.539.836,72	16.182.242.002,00	46.866.781.838,72	91,56%	48.618.407.921,82
Belanja Bangunan dan Gedung	58.449.742.193,00	16.747.010.888,50	36.504.585.846,22	53.251.596.734,72	91,11%	29.110.006.350,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	259.192.806.262,00	105.488.191.460,00	126.450.321.362,82	231.938.512.822,82	89,48%	152.007.787.009,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.894.318.975,00	2.969.658.694,00	0,00	2.969.658.694,00	76,26%	5.355.408.041,00
JUMLAH	381.153.673.161,00	158.257.562.470,22	184.272.346.991,04	342.529.909.461,26	89,87%	235.384.436.356,82

Dari jumlah Belanja Modal sebesar Rp342.529.909.461,26 terdapat realisasi Belanja Modal dari BLUD, JKN Dana Kapitasi dan Dana BOS dengan rincian sebagai berikut.

- **BLUD**

- 1) Peralatan dan Mesin : Rp 7.576.663.405,00
 - 2) Gedung dan Bangunan : Rp 0,00
 - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp 0,00
- Jumlah : Rp7.576.663.405,00**



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- JKN Dana Kapitasi

1) Peralatan dan Mesin	:	Rp 52.309.336,00
2) Gedung dan Bangunan	:	0,00
3) Jalan, Irigasi dan Jaringan	:	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah	:	Rp 52.309.336,00

- Dana BOS

1) Peralatan dan Mesin	:	Rp 4.399.125.131,72
2) Gedung dan Bangunan	:	0,00
3) Aset Tetap Lainnya	:	<u>Rp 2.338.431.794,00</u>
Jumlah	:	Rp 6.737.556.925,72

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp7.503.359.71,00 atau 88,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.431.445.371,00. Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp7.210.532.336,00 atau 2.462,39% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp292.827.035,00. Faktor dominan kenaikan Belanja Modal Tanah tersebut utamanya disebabkan adanya pembayaran utang belanja Modal Tanah sebesar Rp5.135.197.780,00. Rincian realisasi Belanja Modal Tanah disajikan pada *tabel 5.29* sebagai berikut.

Tabel 5.29 Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Rekening	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Jumlah	%	Realisasi TA 2021
		Realisasi Tahun Berjalan	Realisasi Utang			
Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	6.793.221.871,00	2.167.851.591,00	4.625.370.280,00	6.793.221.871,00	100,00%	292.827.035,00
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	1.638.223.500,00	200.310.000,00	509.827.500,00	710.137.500,00	43,35%	0,00
Jumlah	8.431.445.371,00	2.368.161.591,00	5.135.197.780,00	7.503.359.371,00	88,99%	292.827.035,00

Rincian Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran BAP Pekerjaan Penilai Harga Tanah (APPRAISAL) Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Nasional KM.5 - KM.8 (Kewajiban TA2020) sebesar **Rp35.249.500,00**
2. Pembayaran BAP Pekerjaan Penilai Harga Tanah (APPRAISAL) Pengadaan Tanah Jalan Akses PDAM Lawe - Lawe (Kewajiban TA.2020) sebesar **Rp24.178.000,00**
3. Pembayaran BAP Pekerjaan Penilai Harga Tanah Pengadaan Tanah Untuk Sarana Air Bersih (Kewajiban 2021) sebesar **Rp24.178.000,00**
4. Pembayaran BAP Pekerjaan Penilai Harga Tanah Pengadaan Tanah di Pondok Belanda (Kewajiban 2021) sebesar **Rp24.178.000,00**
5. Pembayaran BAP Pekerjaan Penilai Harga Tanah Pengadaan Tanah Fasilitas Kawasan Pemerintahan (Kewajiban 2021) sebesar **Rp24.178.000,00**
6. Pembayaran BAP Pekerjaan Penyusunan Study Kelayakan Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur Ke PU-AN (Feasibility Study) (Kewajiban 2021) sebesar **Rp450.400.000,00**



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

7. Pembayaran BAP Pengadaan Tanah Untuk Sarana Air Bersih Desa Babulu Darat AN. Gamburgudin (Kewajiban 2021) sebesar **Rp314.018.280,00**
8. Pembayaran BAP Pengadaan Tanah Untuk Sarana Air Bersih Desa Babulu Darat An. Gamburgudin (Kewajiban 2021) sebesar **Rp1.327.201.895,00**
9. Pengadaan Tanah Fasilitas Kawasan Pemerintahan Kelurahan Nipah - Nipah An. Dwi Kurniawan (Ahli Waris Alm. H. Mananang Ali.S) Tahap II sebesar **Rp2.167.851.591,00**
10. Pengadaan Tanah Fasilitas Kawasan Pemerintahan Kelurahan Nipah - Nipah An. Dwi Kurniawan (Ahli Waris Alm. H. Mananang Ali.S (Kewajiban 2021) sebesar **Rp2.911.616.105,00**
11. Pembayaran BAP Pekerjaan Penilai Harga Tanah (Appraisal) Pengadaan Tanah Coastal Road sebesar **Rp49.950.000,00**
12. Pembayaran Pengadaan Tanah Coastal Road atas nama Agus Sumpeno Yulianto, ST sebesar **Rp150.360.000,00**

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp46.866.781.838,72 atau 91,56% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp51.185.360.360,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp1.751.626.083,10 atau 3,60% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp48.618.407.921,82.

Faktor dominan penurunan Belanja Peralatan dan Mesin tersebut utamanya disebabkan belanja Peralatan dan Mesin BOS yang menurun signifikan sebesar Rp4.555.521.122,10 dan juga belanja alat kedokteran dan kesehatan yang menurun sebesar Rp15.483.598.217,00 di karenakan pada Tahun Anggaran 2021 belanja modal tersebut di adakan untuk memenuhi kebutuhan pandemi Covid19. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada *tabel 5.30* dan rincian realisasi belanja modal peralatan mesin BOS pada *lampiran 5.16* sebagai berikut :



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.30 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Rekening	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Jumlah	%	Realisasi TA 2021
		Realisasi Tahun Berjalan	Realisasi Utang			
Belanja Modal Alat Besar	6.767.915.400,00	1.292.439.000,00	5.464.760.000,00	6.757.199.000,00	99,84%	38.198.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	8.520.283.000,00	4.849.502.960,00	3.531.711.000,00	8.381.213.960,00	98,37%	5.157.620.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	144.320.000,00	-	144.320.000,00	144.320.000,00	100,00%	0,00
Belanja Modal Alat Pertanian	43.406.550,00	35.695.000,00	-	35.695.000,00	82,23%	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.967.623.760,00	2.635.091.453,00	4.849.933.698,00	7.485.025.151,00	93,94%	2.879.059.313,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	615.421.180,00	375.096.460,00	210.217.500,00	585.313.960,00	95,11%	63.694.778,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.624.516.874,00	6.479.784.979,00	-	6.479.784.979,00	84,99%	21.963.383.196,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	203.222.007,00	190.386.356,00	1.138.500,00	191.524.856,00	94,24%	928.021.035,00
Belanja Modal Komputer	5.280.250.828,00	3.473.755.696,00	1.283.090.900,00	4.756.846.596,00	90,09%	5.984.222.258,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	62.633.800,00	44.056.000,00	13.813.800,00	57.869.800,00	92,39%	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	16.200.000,00	16.200.000,00	-	16.200.000,00	100,00%	32.580.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.512.369.000,00	4.399.125.131,72	-	4.399.125.131,72	67,55%	8.954.646.253,82
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.427.197.961,00	6.893.406.801,00	683.256.604,00	7.576.663.405,00	102,01%	2.616.983.088,00
Jumlah	51.185.360.360,00	30.684.539.836,72	16.182.242.002,00	46.866.781.838,72	91,56%	48.618.407.921,82

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp53.251.596.734,72 atau 91,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp58.449.742.193,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp24.141.590.384,72 atau 82,93% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp29.110.006.350,00.

Faktor dominan kenaikan belanja modal gedung dan bangunan tersebut utamanya disebabkan adanya pembayaran utang belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.504.585.846,22. Rincian realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan disajikan pada *tabel 5.31* sebagai berikut :



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.31 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Anggaran 2022 dan 2021

Rekening	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Jumlah	%	Realisasi TA 2021
		Realisasi Tahun Berjalan	Realisasi Utang			
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	58.449.742.193,00	16.747.010.888,50	36.504.585.846,22	53.251.596.734,72	91,11%	29.110.006.350,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	43.076.719.770,00	16.091.452.388,50	23.447.235.082,22	39.538.687.470,72	91,79%	29.110.006.350,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	11.904.815.208,00	2.307.257.346,00	9.029.541.776,00	11.336.799.122,00	95,23%	12.871.230.818,00
Belanja Modal Bangunan Gudang	-	-	-	-	-	332.779.500,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	-	-	-	-	-	256.418.000,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	11.542.833.124,00	8.757.934.214,00	1.174.040.000,00	9.931.974.214,00	86,04%	2.571.581.887,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.376.380.850,00	-	1.282.092.486,00	1.282.092.486,00	93,15%	276.931.950,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	477.750.000,00	465.600.350,00	-	465.600.350,00	97,46%	436.192.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.842.400.330,00	4.376.318.478,50	8.703.605.192,22	13.079.923.670,72	94,49%	8.325.828.843,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	685.113.600,00	-	417.329.532,00	417.329.532,00	60,91%	-
Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	653.794.090,00	-	653.794.090,00	653.794.090,00	100,00%	-
Belanja Modal Bangunan Terbuka	-	-	-	-	-	682.944.495,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	185.000.000,00	184.342.000,00	-	184.342.000,00	99,64%	3.158.874.000,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	-	-	-	-	-	197.224.857,00
Belanja Modal Bangunan Taman	2.365.255.568,00	-	2.143.455.006,00	2.143.455.006,00	90,62%	-
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	43.377.000,00	-	43.377.000,00	43.377.000,00	100,00%	-
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	13.783.164.923,00	655.558.500,00	11.624.464.573,00	12.280.023.073,00	89,09%	-
Belanja Modal Bangunan Rumah Negara Golongan I	13.733.294.923,00	655.558.500,00	11.574.594.573,00	12.230.153.073,00	89,05%	-
Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	49.870.000,00	-	49.870.000,00	49.870.000,00	100,00%	-
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.589.857.500,00	-	1.432.886.191,00	1.432.886.191,00	90,13%	-
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	199.547.000,00	-	99.575.000,00	99.575.000,00	49,90%	-
Belanja Modal Pagar	924.316.900,00	-	867.317.591,00	867.317.591,00	93,83%	-
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	465.993.600,00	-	465.993.600,00	465.993.600,00	100,00%	-
JUMLAH	58.449.742.193,00	16.747.010.888,50	36.504.585.846,22	53.251.596.734,72	91,11%	29.110.006.350,00

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp231.938.512.822,82 atau 89,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp259.192.806.262,00. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp79.930.725.813,82 atau sebesar 52,58% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp152.007.787.009,00.

Faktor dominan peningkatan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tersebut utamanya disebabkan adanya pembayaran utang belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp126.450.321.362,82. Rincian realisasi belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada *tabel 5.32* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.32 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Rekening	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Jumlah	%	Realisasi TA 2021
		Realisasi Tahun Berjalan	Realisasi Utang			
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	153.091.732.909,00	56.615.765.445,00	75.170.240.063,00	131.786.005.508,00	86,08%	78.818.938.988,00
Belanja Modal Jalan	150.516.843.682,00	56.615.765.445,00	72.851.515.236,00	129.467.280.681,00	86,02%	78.633.058.988,00
Belanja Modal Jembatan	2.574.889.227,00	-	2.318.724.827,00	2.318.724.827,00	90,05%	185.880.000,00
Belanja Modal Bangunan Air	88.367.112.886,00	44.505.273.968,00	40.969.183.834,82	85.474.457.802,82	96,73%	57.409.399.068,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.888.924.168,00	4.277.655.264,00	4.282.815.469,00	8.560.470.733,00	96,30%	11.657.042.386,00
Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	42.813.232.850,00	40.227.618.704,00	182.921.000,00	40.410.539.704,00	94,39%	38.387.583.594,00
Belanja Modal Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	189.690.000,00	-	189.690.000,00	189.690.000,00	100,00%	163.070.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Kotor	1.924.100.000,00	-	1.774.100.000,00	1.774.100.000,00	92,20%	-
Belanja Modal Air Kotor	34.551.165.868,00	-	34.539.657.365,82	34.539.657.365,82	99,97%	7.201.703.088,00
Belanja Modal Instalasi	-	-	-	-	-	9.300.648.807,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	-	-	-	-	-	5.956.300.808,00
Belanja Modal Instalasi Lain	-	-	-	-	-	3.344.347.999,00
Belanja Modal Jaringan	17.733.960.467,00	4.367.152.047,00	10.310.897.465,00	14.678.049.512,00	82,77%	6.478.800.146,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	14.111.457.000,00	4.165.412.047,00	8.546.641.465,00	12.712.053.512,00	90,08%	4.498.862.990,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	3.615.058.670,00	199.700.000,00	1.764.256.000,00	1.963.956.000,00	54,33%	1.979.937.156,00
Belanja Modal Jaringan Gas	7.444.797,00	2.040.000,00	-	2.040.000,00	27,40%	-
JUMLAH	259.192.806.262,00	105.488.191.460,00	126.450.321.362,82	231.938.512.822,82	89,48%	152.007.787.009,00

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp2.969.658.694,00 atau 76,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.894.318.975,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp2.385.749.347,00 atau sebesar 44,55% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp5.355.408.041,00.

Faktor dominan penurunan belanja modal aset tetap lainnya tersebut utamanya disebabkan menurunnya belanja modal aset tetap lainnya pada BOS sebesar Rp2.431.665.107,00. Rincian realisasi Belanja Aset Tetap lainnya disajikan pada *tabel 5.33* dan rincian belanja modal aset tetap lainnya BOS pada *lampiran 5.17* sebagai berikut.

Tabel 5.33 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Rekening	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Jumlah	%	Realisasi TA 2021
		Realisasi Tahun Berjalan	Realisasi Utang			
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	-	-	-	-	-	134.038.600,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	645.098.375,00	631.226.900,00	-	631.226.900,00	97,85%	451.272.540,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.249.220.600,00	2.338.431.794,00	-	2.338.431.794,00	71,97%	4.770.096.901,00
JUMLAH	3.894.318.975,00	2.969.658.694,00	-	2.969.658.694,00	76,26%	5.355.408.041,00



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp2.041.572.495,00 atau 11,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp18.365.066.073,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp4.066.832.349,00 atau 66,58% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp6.108.404.841,00.

Faktor dominan penurunan belanja tidak terduga tersebut disebabkan menurunnya realisasi penanganan pandemi Covid19. Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga disajikan pada *tabel 5.34* sebagai berikut.

Tabel 5.34 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		TA 2021 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	18.365.066.073,00	2.041.572.492,00	11,12	6.108.404.841,00
JUMLAH	18.365.066.073,00	2.041.572.492,00	11,12	6.108.404.841,00

Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.041.572.492,00 adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran Pengembalian Kelebihan Penyeteroran Uang Muka atas Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor di Desa Telemow Kecamatan Sepaku sesuai dengan SK Bupati Nomor 900/77/2022 Tanggal 2 Maret 2022 sebesar **Rp482.880.742,00**
2. Belanja Pengeluaran Dana Belanja Tidak Langsung Tidak Terduga untuk Pendanaan Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan SK Plt.Bupati Nomor 900/91/2022 Tanggal 11 Maret 2022 dengan Telaahan Staf Plt.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Tanggal 16 Maret 2022 sebesar **Rp1.187.159.550,00**
3. Pengeluaran Dana Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2022 Pada KAS Umum Negara sesuai dengan SK Bupati Nomor 900/220/2022. Tanggal 3 Otober 2022 sebesar **Rp30.000.000,00**
4. Pengeluaran Dana Belanja Tidak Terduga untuk Korban Kecelakaan Atlet PORPROV Kalimantan Timur Ke VII Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten penajam Paser Utara sesuai dengan SK Bupati Nomor 900/283/2022 Tanggal 26 Desember 2022 sebesar **Rp341.532.200,00**

5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

5.1.2.4.1 Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00%



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp5.000.0000.000,00. Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota disajikan pada *tabel 5.35*. sebagai berikut.

Tabel 5.35 Realisasi Bantuan Keuangan Antar Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		TA 2021 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah/Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
JUMLAH	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa tahun anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp144.145.459.332,00 atau 94,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp152.868.862.864,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp52.623.729.638,00 atau 57,50% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp91.521.729.694,00. Rincian realisasi belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa disajikan pada *tabel 5.36 dan lampiran 5.18* sebagai berikut.

Tabel 5.36 Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		TA 2021 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	152.868.862.864,00	144.145.459.332,00	94,29	91.521.729.694,00
JUMLAH	152.868.862.864,00	144.145.459.332,00	94,29	91.521.729.694,00

Realisasi Belanja Bantuan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp144.145.459.332,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kurang Salur Tahun 2021 sebesar Rp9.530.055.606,00
2. Pembayaran Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.625.000.000,00
3. Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2022 sebesar Rp105.961.041.726,00
4. Pembayaran Dana Desa (DD) Tahun 2022 sebesar Rp27.029.362.000,00

5.1.3 PEMBIAYAAN

5.1.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp41.679.216.371,11 atau sebesar 100,00 % dari total anggaran penerimaan pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp41.679.216.371,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp13.216.714.882,40. Realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp28.462.501.488,71 atau 215,35%.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp41.679.216.371,11 tersebut merupakan penerimaan penggunaan SiLPA sebesar Rp41.679.216.371,11.

5.1.3.1.1 Penggunaan SILPA

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 sebesar Rp41.679.216.371,11 jika dibandingkan dari SILPA tahun anggaran 2021 sebesar Rp13.216.714.882,40 realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp28.462.501.488,71 atau 215,35%. Rincian realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) disajikan pada *tabel 5.37* sebagai berikut.

**Tabel 5.37 Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	41.679.216.371,00	41.679.216.371,11	100	13.216.714.882,40
JUMLAH	41.679.216.371,00	41.679.216.371,11	100	13.216.714.882,40

5.1.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp69.765.344.550,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp65.948.006.730,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp3.817.337.820,00 atau 5,79%.

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Realisasi penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.852.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.852.000.000,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebesar Rp19.600.000.000,00. Realisasi Tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp13.748.000.000,00 atau 70,14% . Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2022 merupakan penambahan Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Danum Taka, sesuai dengan SK Bupati No. 573/93/2022 tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp5.852.000.000,00. Rincian realisasi penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah disajikan pada *tabel 5.38* sebagai berikut.

**Tabel 5.38 Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.852.000.000,00	5.852.000.000,00	100,00	19.600.000.000,00



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara(BUMD)	5.852.000.000,00	5.852.000.000,00	100,00	19.600.000.000,00
JUMLAH	5.852.000.000,00	5.852.000.000,00	100,00	19.600.000.000,00

5.1.3.2.2 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada PT.Sarana Multi Infrastruktur pada tahun 2022 sebesar Rp63.913.344.550,00. Pembayaran pokok pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur pada tahun 2022 terdiri dari pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada periode tahun 2022 sebesar Rp55.130.675.640,00 dan pembayaran pokok pinjaman periode Desember 2021 yang dibayarkan pada Januari 2022 sebesar Rp8.782.668.910,00. Rincian pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bukan bank disajikan pada tabel 5.39 sebagai berikut.

**Tabel 5.39 Realisasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank
Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	63.913.344.551,00	63.913.344.550,00	100,00	46.348.006.730,00
JUMLAH	63.913.344.551,00	63.913.344.550,00	100,00	46.348.006.730,00

5.1.4 PEMBIAYAAN NETTO

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Rincian Pembiayaan Netto di sajikan pada *tabel 5.40* sebagai berikut.

Tabel 5.40 Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Penerimaan Daerah	41.679.216.371,00	41.679.216.371,11	100,00	13.216.714.882,40
Pengeluaran Daerah	69.765.344.551,00	69.765.344.550,00	100,00	65.948.006.730,00
JUMLAH	(28.086.128.180,00)	(28.086.128.178,89)	100,00	(52.731.291.847,60)

5.1.4.1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERJALAN

SILPA merupakan selisih antara surplus/defisit dengan pembiayaan netto. SILPA tahun 2022 adalah sebesar Rp187.632.320.043,23 dibandingkan dengan SILPA tahun 2021 sebesar Rp41.679.216.371,11. SILPA tahun 2022 mengalami **kenaikan** sebesar Rp145.953.103.672,12 atau sebesar 350,18%. Rincian SILPA disajikan pada *tabel 5.41* sebagai berikut.

Tabel 5.41 SILPA Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	183.214.068.746,13	31.675.743.861,78
2	Kas di BLUD	3.686.008.700,15	8.235.389.913,72
3	Kas Dana Kapitasi	203.184.392,80	436.133.789,40



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4	Kas Dana BOS	529.058.204,15	1.329.101.706,21
5	Kas Lainnya (Dana Non Kapitasi)	0,00	2.847.100,00
	Jumlah	187.632.320.043,23	41.679.216.371,11

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp41.679.216.371,11

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2021 yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2022, sebesar Rp41.679.216.371,11

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA sebesar Rp187.632.320.043,23

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00

5.2.5 Lain-Lain

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak ada transaksi lain-lain yang mempengaruhi Laporan Perubahan SAL

5.3 PENJELASAN ATAS AKUN- AKUN NERACA

5.3.1 ASET

Saldo Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.030.434.962.928,29 disajikan pada *tabel 5.42* dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.42 Rincian Aset Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
Aset Lancar	263.879.345.374,16	116.657.082.072,46	147.222.263.301,70
Investasi Jangka Panjang	129.170.429.530,76	127.741.658.764,84	1.428.770.765,92
Aset Tetap	4.002.459.021.687,57	4.171.087.421.611,21	(168.628.399.923,64)
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	634.926.166.335,80	180.333.635.183,39	454.592.531.152,41
Jumlah	5.030.434.962.928,29	4.595.819.797.631,90	434.615.165.296,39



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2022 terdapat **peningkatan** dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp434.615.165.296,39 atau 9,46%. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh:

- Peningkatan pada Aset Lainnya sebesar Rp454.592.531.152,41 dimana data Transfer Deposit Facility dicatat pada pos Aset Lainnya.
- Peningkatan pada Aset Lancar sebesar Rp147.222.263.301,70 pada pos piutang Transfer
- Peningkatan pada Aset Lancar Pada pos Kas di Kas Daerah sebesar Rp151.538.324.884,35

5.3.1.1 ASET LANCAR

Aset Lancar adalah kas dan setara kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Saldo akhir aset lancar Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp263.879.345.374,16 jika dibandingkan dengan saldo akhir Aset Lancar Per 31 Desember 2021 sebesar Rp116.657.082.072,46 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp147.222.263.301,70 atau sebesar 126,37%. Faktor dominan kenaikan Aset Lancar tersebut utamanya disebabkan kenaikan Kas di Kas Daerah sebesar Rp151.538.324.884,35,00. Rincian aset lancar disajikan pada *tabel 5.43* sebagai berikut:

Tabel 5.43 Rincian Aset Lancar Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Kas di Kas Daerah	183.214.068.746,13	31.675.743.861,78	151.538.324.884,35
Kas di Bendahara BLUD	3.686.008.700,15	8.235.389.913,72	(4.549.381.213,57)
Kas Dana BOS	529.058.204,15	1.329.101.706,21	(800.043.502,06)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	203.184.392,80	436.133.789,40	(232.949.396,60)
Kas Lainnya	0,00	2.847.100,00	(2.847.100,00)
Piutang Pajak	12.690.536.782,00	11.832.771.677,00	857.765.105,00
Piutang Retribusi	3.773.654.048,79	3.026.708.233,79	746.945.815,00
Piutang Lain Lain PAD yang sah	2.545.541.091,10	23.147.347.099,00	(20.601.806.007,90)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	34.636.410.000,00	10.510.565.000,00	24.125.845.000,00
Penyisihan Piutang	(701.828.668,86)	(1.900.382.185,08)	1.198.553.516,22
Persediaan	23.075.200.744,57	28.133.344.543,31	(5.058.143.798,74)
Belanja Dibayar di muka	227.511.333,33	227.511.333,33	0,00
Jumlah	263.879.345.374,16	116.657.082.072,46	147.222.263.301,70

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah merupakan saldo Kas Daerah yang tersimpan dalam rekening bank Kaltimtara Per 31 Desember 2022 dan 2021, disajikan pada *tabel 5.44* sebagai berikut.

Tabel 5.44 Rincian Kas di Kas Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
1.	Bankaltimtara	1131300014	RKUD Kab. PPU	183.214.068.746,13	31.675.743.861,78



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Jumlah Kas pada Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp183.214.068.746,13. Saldo akhir kas di kas daerah Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp183.214.068.746,13. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.675.743.861,78 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp151.538.324.884,35 atau 478,40%.

Pada Rekening Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 terdapat sisa Dana *Earmarked* sebesar Rp50.883.038.762,50 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sisa Dana Bankeu	Rp19.417.040.251,00
2. Sisa Dana Insentif Daerah (DID)	Rp12.859.276.956,00
3. Sisa Dana TPG dan Tamsil	Rp 299.234.500,00
4. Sisa Dana BOK	Rp 1.992.418.258,00
5. Sisa Dana BOKB	Rp 127.876.013,00
6. Sisa Dana Fasilitas Penanaman Modal	Rp 115.774.200,00
7. Sisa Dana Fasilitas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian	Rp 22.214.300,00
8. Sisa Dana DAK Fisik	Rp 131.796.855,50
9. Sisa Dana DBH DR	Rp 669.724.701,00
10. Sisa Hibah RR	Rp15.247.682.728,00

5.3.1.1.2 Kas di BLUD

Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.686.008.700,15 dengan rincian pada *tabel 5.45* sebagai berikut:

Tabel 5.45 Rincian Kas di Badan Umum Layanan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Kas di BLUD pada RSUD Kab Penajam Paser Utara	3.686.008.700,15	8.235.389.913,72
Jumlah	3.686.008.700,15	8.235.389.913,72

Saldo akhir kas di BLUD Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp3.686.008.700,15. Jika dibandingkan dengan saldo akhir kas di BLUD Per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.235.389.913,72, saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp4.549.381.213,57 atau sebesar 55,24%.

5.3.1.1.3 Kas Dana BOS

Saldo akhir kas Dana BOS Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp529.058.204,15. Jika dibandingkan dengan saldo akhir kas BOS Per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.329.101.706,21, saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp800.043.502,06 atau sebesar 60,19%.



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Saldo Dana BOS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp529.058.204,15 merupakan sisa belanja tahun 2022 yang tercatat di beberapa Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp486.730.101,57 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar Rp42.328.102,58.

Tabel 5.46 Kas Dana Bos Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Sekolah	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
1	SDN	486.730.101,57	1.150.827.509,62
2	SMPN	42.328.102,58	178.274.196,59
Jumlah		529.058.204,15	1.329.101.706,21

Rincian Kas Dana BOS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga disajikan pada *lampiran 5.19*

5.3.1.1.4 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Saldo akhir kas Dana Kapitasi pada FKTP Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp203.184.392,80 Jika dibandingkan dengan saldo akhir kas Dana Kapitasi pada FKTP Per 31 Desember 2021 sebesar Rp436.133.789,40, saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp232.949.396,00 atau sebesar 53,41%.

Saldo akhir kas lainnya terdiri dari Kas Dana Kapitasi sebesar Rp203.184.392,80 pada Dinas Kesehatan.

Tabel 5.47 Kas Dana Kapitasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	UPTD	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
1	UPTD Puskesmas Penajam	162.477.900,00	81.319.064,00
2	UPTD Puskesmas Petung	9.034.283,00	11.706.521,00
3	UPTD Puskesmas Waru	210.175,00	56.190.268,00
4	UPTD Puskesmas Babulu	12.682,00	1.923.854,00
5	UPTD Puskesmas Sepaku I	25.064,00	475.507,00
6	UPTD Puskesmas Sotek	3.156,00	146.292.401,00
7	UPTD Puskesmas Gunung Intan	2.547.395,40	4.213.169,00
8	UPTD Puskesmas Sebakung Jaya	832.391,40	484.222,40
9	UPTD Puskesmas Sepaku III	1.767,00	13.386.187,00
10	UPTD Puskesmas Semoi II	713,00	1.720,00
11	UPTD Puskesmas Maridan	28.038.866,00	120.140.876,00
Jumlah		203.184.392,80	436.133.789,40

5.3.1.1.5 Kas Lainnya

Saldo akhir kas lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 berbeda dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.847.100,00 dari Kas Dana Non Kapitasi UPT Petung sebesar Rp2.847.100,00.

Tabel 5.48 Kas Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Petung)	0,00	2.847.100,00
Jumlah		0,00	2.847.100,00



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Terhadap sisa Kas Dana Non Kapitasi UPT Petung Tahun Anggaran 2021 telah di setorkan ke Kas Daerah pada tanggal 7 Januari 2022.

5.3.1.1.6 Piutang Pajak

Saldo akhir piutang pajak bruto Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp12.690.536.782,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir piutang pajak bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.832.771.677,00 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp857.765.105,00 atau 7,25%. Saldo piutang pajak merupakan piutang pajak kepada Wajib Pajak yang sudah ada surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dilunasi. Berikut rincian Piutang Pajak di sajikan pada *tabel 5.49* dan *lampiran 5.20* berikut:

Tabel 5.49 Rincian Piutang Pajak Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Awal Piutang	Mutasi Piutang 2022 (Rp)		Saldo Akhir Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Saldo Akhir Piutang Netto
			Tambah	Kurang			
1	Pajak Reklame	108.703.627,00	21.101.601,00	80.405.252,00	49.399.976,00	2.491.814,25	46.908.161,75
2	Pajak Hotel	3.352.500,00	2.047.000,00		5.399.500,00	345.485,00	5.054.015,00
3	Pajak Restoran	307.660.604,00	33.329.548,00	272.988.134,00	68.002.018,00	996.673,84	67.005.344,16
4	Pajak Hiburan	3.327.000,00	2.182.950,00		5.509.950,00	343.614,75	5.166.335,25
5	Pajak Penerangan Jalan	162.845.522,00	675.180,00	96.831.259,00	66.689.443,00	3.441.553,85	63.247.889,15
6	Pajak Parkir	-	150.000,00	-	150.000,00	750,00	149.250,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	58.211.388,00	4.125.843,00	11.220.387,00	51.116.844,00	4.719.729,32	46.397.114,68
8	Pajak Air Tanah	4.156.533,00	4.406.843,00	1.410.905,00	7.152.471,00	296.597,02	6.855.873,98
9	Pajak Bumi dan Bangunan P2	11.184.514.503,00	2.245.173.406,00	992.571.329,00	12.437.116.580,00	62.185.582,90	12.374.930.997,10
Jumlah		11.832.771.677,00	2.313.192.371,00	1.455.427.266,00	12.690.536.782,00	74.821.800,93	12.615.714.981,07

Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame bruto per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp49.399.976,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp108.703.627,00 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp59.303.651,00 atau 54,56%.

Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel bruto per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp5.399.500,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.352.500,00 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp2.047.000,00 atau 61,06%.

Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran bruto per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp68.002.018,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp307.660.604,00 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp239.658.586,00 atau 77,90%



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan bruto per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp5.509.950,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.327.000,00 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp2.182.950,00 atau 65,61%.

Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan bruto per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp66.689.443,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp162.845.522,00 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp96.156.079,00 atau 59,05%.

Piutang Pajak Parkir

Saldo Piutang Pajak Parkir bruto per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp150.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp150.000,00 atau 100%.

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bruto per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp51.116.844,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp58.211.388,00 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp7.094.544,00 atau 12,19%.

Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah bruto per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp7.152.471,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.156.533,00 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp2.995.938,00 atau 72,08%.

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan bruto per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp12.437.116.580,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.184.514.503,00 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp1.252.602.077,00 atau 11,20%.

Atas penyajian piutang sebesar Rp12.437.116.580,00 berbeda dengan kertas kerja dari Bapenda sebesar Rp12.667.528.810,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp230.412.230,00. Menurut pernyataan dari Kepala Bapenda secara historis pada saat penyerahan kewenangan PBB-P2 dari pemerintah pusat melalui Kantor Pajak Pratama Penajam ke Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak mendapat gambaran/deskripsi yang jelas perihal seluk beluk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan, selain itu tidak dapat dianalisa asal muasalnya, sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut relatif tidak mudah.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.3.1.1.7 Piutang Retribusi

Saldo akhir Piutang Retribusi bruto Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp3.773.654.048,79. Jika dibandingkan dengan saldo akhir piutang retribusi bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.026.708.233,79, saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp746.945.815, atau 24,68 %. Saldo piutang retribusi merupakan piutang kepada wajib retribusi yang sudah ada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dilunasi, dengan rincian seperti disajikan pada *tabel 5.50* dan *lampiran 5.20* sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Awal Piutang	Mutasi Piutang 2022 (Rp)		Saldo Akhir Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Saldo Akhir Piutang Netto
			Tambah	Kurang			
I	Dinas Perhubungan	2.941.568.590,00	453.515.815,00	-	3.395.084.405,00	384.558.656,90	3.010.525.748,10
1	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	2.941.568.590,00	453.515.815,00	-	3.395.084.405,00	384.558.656,90	3.010.525.748,10
					-		-
II	Dinas Penanaman Modal	52.800.242,00	-	-	52.800.242,00	52.800.242,00	-
2	Retribusi IMB	52.800.242,00	-	-	52.800.242,00	52.800.242,00	-
III	Badan Pendapatan Daerah	29.309.401,79	-	-	29.309.401,79	2.930.940,18	26.378.461,61
3	Retribusi IMB	26.593.801,79	-	-	26.593.801,79	2.659.380,18	23.934.421,61
4	Retribusi Pelayanan Persampahan	810.000,00	-	-	810.000,00	81.000,00	729.000,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.905.600,00	-	-	1.905.600,00	190.560,00	1.715.040,00
IV	Dinas Lingkungan Hidup	3.030.000,00	294.420.000,00	990.000,00	296.460.000,00	1.482.300,00	294.977.700,00
6	Retribusi Pelayanan Persampahan	3.030.000,00	294.420.000,00	990.000,00	296.460.000,00	1.482.300,00	294.977.700,00
	Jumlah	3.026.708.233,79	747.935.815,00	990.000,00	3.773.654.048,79	441.772.139,08	3.331.881.909,71

Dinas Perhubungan

Saldo akhir Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan bruto Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp3.395.084.405,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir piutang retribusi bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.941.568.590,00, saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp453.515.815,00 atau 13,36%.

Dalam saldo awal Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp2.941.568.590,00 sudah tercatat nilai sebesar Rp1.846.615.065,00 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 22.B/LHP/XIX.SMD/V/2022 Tanggal : 20 Mei 2022 yang merupakan kekurangan Pendapatan dari pengelolaan Pelabuhan Penajam Buluminung oleh Perumda Benuo Taka yang belum disetor ke Kas Daerah.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 22.B/LHP/XIX.SMD/V/2022 Tanggal : 20 Mei 2022, terdapat potensi kekurangan pendapatan atas Piutang Pengelolaan Pelabuhan Penajam Buluminung yang dikelola Perumda Benuo Taka sebesar Rp1.302.432.345,00.

Potensi kekurangan pendapatan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat dengan terbitnya Laporan Hasil Validasi Nomor 700/150/LH Validasi/Itda/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dengan hasil 38 *Invoice* yang belum terbayar sebesar Rp1.228.766.495,00. Terhadap hasil validasi Inspektorat tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara akan melakukan koordinasi/rekonsiliasi lebih lanjut sebelum menerbitkan SKRD untuk penagihan Piutang tersebut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Saldo Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bruto per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp52.800.242,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir piutang retribusi bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp Rp52.800.242,00, saldo akhir Per 31 Desember 2022 tidak mengalami **peningkatan/penurunan** sejak tahun 2021 s.d tahun 2022.

Badan Pendapatan Daerah

Saldo Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi pelayanan persampahan dan retribusi pemakaian kekayaan daerah bruto per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp29.309.401,79. Jika dibandingkan dengan saldo akhir piutang retribusi bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.309.401,79, saldo akhir Per 31 Desember 2022 tidak mengalami **peningkatan/penurunan** sejak tahun 2016 s.d 2022.

Dinas Lingkungan Hidup

Saldo akhir Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan bruto Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp296.460.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir piutang retribusi bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.030.000,00, saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp293.430.000,00 atau 98,98%.

5.3.1.1.8 Piutang Lain-Lain PAD yang sah

Saldo Piutang Lain Lain PAD yang Sah Bruto per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp2.545.541.091,10. Jika dibandingkan dengan saldo akhir piutang retribusi bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.147.347.099,00, saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp20.601.806.007,90 atau 89,00%.

Saldo Piutang Lain Lain PAD yang Sah Bruto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp**2.410.535.769,00** Saldo piutang lainnya terdiri dari piutang BLUD Bruto sebesar Rp2.403.735.769 dan piutang Taspen bruto sebesar Rp6.800.000,00. Rincian Piutang Lain Lain PAD yang Sah disajikan pada *tabel 5.51* dan sebagai berikut.



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.51 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Saldo Awal Piutang	Mutasi Piutang 2022 (Rp)		Saldo Akhir Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Saldo Akhir Piutang Netto
			Tambah	Kurang			
I	BKAD	16.264.874,00	6.800.000,00	16.264.874,00	6.800.000,00	34.000,00	6.766.000,00
1	Piutang Taspen	16.264.874,00	6.800.000,00	16.264.874,00	6.800.000,00	34.000,00	6.766.000,00
					-		-
II	RSUD (Piutang BLUD)	23.131.082.225,00	2.207.745.119,00	22.935.091.575,00	2.403.735.769,00	12.018.678,85	2.391.717.090,15
1	Piutang BPJS Kesehatan	2.136.094.600,00	1.938.677.500,00	2.136.094.600,00	1.938.677.500,00	9.693.387,50	1.928.984.112,50
2	Piutang PT. WKP	9.952.216,00	-	-	9.952.216,00	49.761,08	9.902.454,92
3	Piutang PT. WIKA	1.491.461,00	-	-	1.491.461,00	7.457,31	1.484.003,69
4	Piutang PT. Petrona	3.062.701,00	-	-	3.062.701,00	15.313,51	3.047.387,50
5	Pasien Umum	181.484.272,00	41.153.148,00	-	222.637.420,00	1.113.187,10	221.524.232,90
6	Piutang JSE	-	15.243.100,00	-	15.243.100,00	76.215,50	15.166.884,50
7	Pasien HK	12.036.000,00	117.244.192,00	12.036.000,00	117.244.192,00	586.220,96	116.657.971,04
8	Pasien Jasa Raharja	585.575,00	392.567,00	585.575,00	392.567,00	1.962,84	390.604,17
9	Pasien Covid	20.786.375.400,00	78.745.000,00	20.786.375.400,00	78.745.000,00	393.725,00	78.351.275,00
10	Piutang Pasien PMB	-	6.949.232,00	-	6.949.232,00	34.746,16	6.914.485,84
11	Piutang Pasien CPM	-	9.340.380,00	-	9.340.380,00	46.701,90	9.293.678,10
	Jumlah	23.147.347.099,00	2.214.545.119,00	22.951.356.449,00	2.410.535.769,00	12.052.678,85	2.398.483.090,15

5.3.1.1.9 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bruto per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp34.636.410.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir piutang retribusi bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.510.565.000,00, saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp24.125.845.000,00 atau 229,54%.

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bruto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.636.410.000,00. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya disajikan pada *tabel 5.52* sebagai berikut.

Tabel 5.52 Daftar Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Saldo Awal Piutang	Mutasi Piutang 2022 (Rp)		Saldo Akhir Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Saldo Akhir Piutang Netto
			Tambah	Kurang			
1	DBH Pajak Kendaraan Bermotor	1.599.379.000,00	2.100.140.000,00	1.599.379.000,00	2.100.140.000,00	10.500.700,00	2.089.639.300,00
2	DBH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.577.872.000,00	1.992.173.000,00	1.577.872.000,00	1.992.173.000,00	9.960.865,00	1.982.212.135,00
3	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.309.090.000,00	30.520.233.000,00	7.309.090.000,00	30.520.233.000,00	152.601.165,00	30.367.631.835,00
4	DBH Pajak Air Permukaan	24.224.000,00	23.864.000,00	24.224.000,00	23.864.000,00	119.320,00	23.744.680,00
	Jumlah	10.510.565.000,00	34.636.410.000,00	10.510.565.000,00	34.636.410.000,00	173.182.050,00	34.463.227.950,00

5.3.1.1.10 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp701.828.668,86. Jika dibandingkan dengan saldo akhir piutang retribusi bruto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.900.382.185,08, saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.198.553.516,22 atau 63,07%.



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat dihitung dengan persentase tertentu terhadap Nilai Piutang Akhir Tahun berdasarkan klarifikasi umur/kualitas piutang. Kualitas Piutang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori kualitas piutang.

- a. Lancar, apabila belum ada pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (umur piutang belum melewati tanggal jatuh tempo)
- b. Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilakukan pelunasan
- c. Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum dilakukan pelunasan
- d. Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang/juru sita daerah, dan/atau berdasarkan ketentuan lainnya yang berlaku.

Penyisihan Piutang disajikan pada *tabel 5.53, tabel 5.54, tabel 5.55 dan lampiran 5.20* sebagai berikut

Tabel 5.53 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Penyisihan Piutang 2022 (Rp)				Jumlah Penyisihan Piutang Pajak 2022 (Rp)	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak 2021 (Rp)
		Lancar (5 per mil)	Kurang Lancar (10 %)	Diragukan (50 %)	Macet (100 %)		
1	Pajak Reklame	128.851,75	2.362.962,50	-		2.491.814,25	2.788.332,51
2	Pajak Hotel	10.235,00	335.250,00			345.485,00	335.250,00
3	Pajak Restoran	305.448,84	691.225,00			996.673,84	29.204.692,65
4	Pajak Hiburan	10.914,75	332.700,00			343.614,75	332.700,00
5	Pajak Penerangan Jalan	169.862,65	3.271.691,20			3.441.553,85	14.605.841,02
6	Pajak Parkir	750,00				750,00	-
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.629,22	4.699.100,10			4.719.729,32	4.755.202,04
8	Pajak Air Tanah	22.034,22	274.562,80			296.597,02	403.355,27
9	Pajak Bumi dan Bangunan P2	62.185.582,90				62.185.582,90	1.118.451.450,30
	Jumlah	62.854.309,33	11.967.491,60		-	74.821.800,93	1.170.876.823,78



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

Tabel 5.54 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi dan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Penyisihan Piutang 2022 (Rp)				Jumlah Penyisihan Retribusi 2022 (Rp)	Jumlah Penyisihan Retribusi 2021 (Rp)
		Lancar (5 per mil)	Kurang Lancar (10 %)	Diragukan (50 %)	Macet (100 %)		
I	Dinas Perhubungan	11.500.654,40	44.879.690,00	328.178.312,50	-	384.558.656,90	381.271.077,83
1	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	11.500.654,40	44.879.690,00	328.178.312,50		384.558.656,90	381.271.077,83
II	Dinas Penanaman Modal	-	-	-	52.800.242,00	52.800.242,00	52.800.242,00
2	Retribusi IMB				52.800.242,00	52.800.242,00	52.800.242,00
III	Badan Pendapatan Daerah	-	2.930.940,18	-	-	2.930.940,18	2.930.940,18
3	Retribusi IMB		2.659.380,18			2.659.380,18	2.659.380,18
4	Retribusi Pelayanan Persampahan		81.000,00			81.000,00	81.000,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		190.560,00			190.560,00	190.560,00
IV	Dinas Lingkungan Hidup	1.482.300,00	-	-	-	1.482.300,00	15.150,00
6	Retribusi Pelayanan Persampahan	1.482.300,00				1.482.300,00	15.150,00
V	Rumah Sakit Umum Daerah	12.018.678,85				12.018.678,85	239.853.801,92
7	Piutang BLUD	12.018.678,85				12.018.678,85	239.853.801,92
VI	Badan Keuangan dan Aset Daerah	34.000,00				34.000,00	81.324,37
8	Piutang Taspen	34.000,00				34.000,00	81.324,37
	Jumlah	25.035.633,25	47.810.630,18	328.178.312,50	52.800.242,00	453.824.817,93	676.952.536,30

Tabel 5.55 Daftar Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Penyisihan Piutang 2022 (Rp)				Jumlah Penyisihan Piutang Pajak 2022 (Rp)	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak 2021 (Rp)
		Lancar (5 per mil)	Kurang Lancar (10 %)	Diragukan (50 %)	Macet (100 %)		
1	DBH Pajak Kendaraan Bermotor	10.500.700,00				10.500.700,00	7.996.895,00
2	DBH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.960.865,00				9.960.865,00	7.889.360,00
3	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan	152.601.165,00				152.601.165,00	36.545.450,00
4	DBH Pajak Air Permukaan	119.320,00				119.320,00	121.120,00

5.3.1.1.11 Persediaan

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang disimpan dan digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Nilai persediaan telah sesuai dengan hasil inventarisasi fisik yang ditandatangani Bendahara Barang dan Kepala OPD.

Saldo akhir Persediaan Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp23.075.200.744,57. Jika dengan saldo akhir Persediaan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.133.344.543,31 mengalami **penurunan** sebesar Rp5.058.143.798,74 atau 17,98%. Saldo akhir Per 31 Desember 2022 Nilai Persediaan adalah Persediaan barang habis pakai, barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yang masih tersisa atau belum di serahkan Per 31 Desember 2022 berdasarkan Stock Opname yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Rincian persediaan seperti disajikan pada tabel 5.56 dan *Lampiran 5.21*



Tabel 5.56 Rincian Persediaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Persediaan Alat Tulis Kantor	833.252.131,00	801.641.314,00
Persediaan Alat Listrik	35.548.864,00	16.654.801,00
Persediaan Obat Obatan / Alat Ternak	10.199.216.544,22	8.439.064.845,00
Bahan Bakar Minyak dan Gas	385.377.200,00	188.573.015,00
Persediaan Perabot Kantor / Kebersihan	141.389.573,00	124.275.688,00
Persediaan Cetakan	217.671.347,00	225.674.104,00
Persediaan Materai	29.910.000,00	29.447.818,00
Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.988.241.385,00	12.319.570.793,31
Persediaan Barang Untuk di serahkan	231.946.000,00	231.946.000,00
Persediaan Bahan Kimia	7.771.610,00	4.184.000,00
Suku Cadang Kendaraan Bermotor	270.917.480,67	233.310.192,00
Logistic Covid	2.784.127.262,00	5.218.592.577,00
Pengandaan	0	11.204.550,00
Obat Ternak	0	103.316.704,00
Bahan Lainnya	949.831.347,68	185.888.142,00
Jumlah	23.075.200.744,57	28.133.344.543,31

5.3.1.1.12 Belanja dibayar di muka

Saldo akhir Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp227.511.333,33 berupa Uang Muka Pembayaran Tanah (Pembebasan Lahan Akses Jalan Masuk Makam Terpadu) sebesar Rp204.178.000,00 pada dinas Perumahan kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan sewa Gedung Kantor UPT PUPR Kecamatan Babulu periode Januari 2023 s.d April 2023 sebesar Rp23.333.333,33 Rincian belanja di bayar dimuka di sajikan pada *lampiran 5.22*.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

5.3.1.2.1 INVESTASI NON PERMANEN

5.3.1.2.1.1 Investasi Dana Bergulir

Saldo akhir Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp4.399.458.443,53 mengalami **peningkatan** sebesar Rp26.929.611,03 atau 0,62% dibandingkan dengan saldo akhir Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.372.528.832,50 . Rincian Investasi Non Permanen disajikan pada tabel 5.57 dan *Lampiran 5.23* sebagai berikut.

Tabel 5.57 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Keterangan	Investasi Non Permanen Bruto 2022 (Rp)	Penyisihan Investasi Non Permanen 2022 (Rp)	Investasi Non Permanen Netto 2022 (Rp)	Investasi Non Permanen Netto 2021 (Rp)
Penjamin Kredit Koperasi & UKM	2.500.000.000,00	(928.237.446,05)	1.571.762.553,95	1.673.939.152,00
Penjaminan Kredit Alsintan	4.813.000.000,00	(1.985.304.110,42)	2.827.695.889,58	2.698.589.680,50
Jumlah	7.313.000.000,00	(2.913.541.556,47)	4.399.458.443,53	4.372.528.832,50



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

***Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)***

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan Investasi Dana Bergulir penguatan modal kepada masyarakat. Dana bergulir merupakan dana yang dikelola oleh pengelola yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan kepada masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah. Nilai Dana Bergulir yang ada di masyarakat per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.313.000.000,00 dan dikurangi sesuai kategori jatuh temponya (*Aging Scedule*) sebesar Rp2.913.541.556,47,00 jadi Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) sebesar Rp4.399.458.443,53.

Pada Tahun 2020 Bank Ibadurahman berganti kepemilikan dan perubahan nama menjadi Bank Manfaat Berdasarkan dokumen Akta Notaris Nomor 20 tanggal 14 Maret 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ibadurahman pada kantor Notaris Melania Miensye Hambali, SH yang berkedudukan di Kota Balikpapan.

Kredit Koperasi dan UKM dikelola oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Bank Manfaat. Sedangkan investasi penjaminan kredit Alsintan dikelola oleh Dinas Pertanian bekerjasama dengan Bank Manfaat berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/MOU*) antara Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Bank Ibadurrahman. Terkait pengelolaan penjaminan kredit koperasi dan UKM diatur dalam MOU Nomor: 020.1/882/TU PIM tanggal 9 Desember 2005 dan Nomor 253/Perindagkop/VII/2006 tanggal 22 Agustus 2006.

Penjaminan kredit Alsintan diatur dalam MOU Nomor: 020.1/881/TU PIM tanggal 22 Nopember 2005 dan Nomor: 521.488.TU.VIII.2006 tanggal 22 Juli 2006. Pengelolaan dana investasi non permanen ini dilaksanakan dengan system *revolving* kepada masyarakat dengan perkembangan s.d 31 Desember 2022. Nilai Investasi non permanen per 31 Desember 2022 telah disajikan sebesar Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) dengan rincian seperti *tabel 5.58 dan lampiran 5.21* sebagai berikut:

Tabel 5.58 Rincian Klasifikasi Kredit UKM Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Nilai Investasi (Rp)	Dana Tertampung (Rp)	Dana Outstanding (Rp)	Dana Diragukan Tertagih (Rp)	Net Realized (Rp)
1	Koperasi &UKM	2.500.000.000,00	670.207.631,00	1.829.792.369,00	928.237.446,05	1.571.762.553,95
2	Alsintan	4.813.000.000,00	1.867.647.605,00	2.945.352.395,00	1.985.304.110,42	2.827.695.889,58
	Jumlah	7.313.000.000,00	2.537.855.236,00	4.775.144.764,00	2.913.541.556,47	4.399.458.443,53

Terdapat perbedaan nilai pencatatan dana tertampung Koperasi UKM dan dana tertampung Alsintan antara Bank Manfaat dengan BKAD, dimana Bank Manfaat mencatat saldo dana tertampung Koperasi UKM sebesar Rp670.200.131,00 dan dana tertampung Alsintan sebesar Rp1.867.640.105,00. Perbedaan tersebut dikarenakan pihak Bank Manfaat melakukan mutasi debit biaya administrasi bank dibulan Desember 2022 pada rekening dana Alsintan dan rekening dana Koperasi UKM sebesar



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

Rp7.500,00. Pihak Bank Manfaat baru melakukan mutasi kredit sebesar Rp7.500,00 di bulan Januari 2023.

Berikut Nasabah Tahun 2008 pada Koperasi UKM dengan jaminan pinjaman yang tidak di temukan atas nama:

1. Ratna Warti
2. Musa
3. Samsul Arifin
4. Megawati

Berikut Nasabah Tahun 2007 pada Koperasi UKM dengan menggunakan personal garanty atas nama :

1. Rosidah
2. Panca Hartina
3. Rochmiati
4. Khairul Anwar

Pada Dinas Pertanian terdapat nasabah atas nama Dinas Pertanian PPU tidak didukung jaminan pinjaman

5.3.1.2.2 INVESTASI PERMANEN

Merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Investasi Jangka Panjang Permanen Pemkab Penajam Paser Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp124.770.971.087,23 merupakan penyertaan modal pemerintah Daerah.

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Bank Kaltim dan Perusahaan Umum Daerah dengan rincian disajikan *tabel 5.59 dan lampiran 5.23* sebagai berikut.

Tabel 5.59 Penyertaan Modal Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Penyertaan Modal Pada Bank Kaltimtara	57.600.000.000,00	57.600.000.000,00
Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Danum Taka	18.845.944.653,00	17.640.582.630,34
Penyertaan Modal pada Perumda Benuo Taka	47.189.179.393,23	46.992.700.261,00
Penyertaan Modal Pada Perumda Benuo Taka Energi	1.135.847.041,00	1.135.847.041,00
JUMLAH	124.770.971.087,23	123.369.129.932,34

Nilai Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Bank Kaltimtara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp57.600.000.000,00 atau 1,50% dari total modal disetor sebesar Rp3.833.085.000.000,00. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Bank Kaltimtara diatur pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Nilai Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.845.944.653,00. Nilai Investasi Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.640.582.630,34. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kembali melakukan penyertaan modal sebesar Rp5.852.000.000,00 serta dilakukan jurnal koreksi terhadap nilai ekuitas sebesar Rp1.019.444.992,34 dikarenakan nilai ekuitas tahun 2021 telah dilakukan *audit* oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan menjadi sebesar Rp16.621.137.638,00. Pada Laporan Keuangan *Unaudited* tahun 2022 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka mengalami kerugian sebesar Rp3.463.453.324,00.

Nilai Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.189.179.393,23. Nilai Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp46.992.700.261,00. Pada Laporan Keuangan *Unaudited* tahun 2022 Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka mengalami Laba sebesar Rp196.479.132,23.

Nilai Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Energi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.135.847.041,00. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum menerima Laporan Keuangan *Unaudited* 2022 Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Energi, sehingga nilai nilai investasi per 31 Desember 2022 yang disajikan di neraca masih menggunakan nilai investasi Tahun 2021.

5.3.1.3 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo akhir Aset Tetap Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp4.002.459.021.687,57. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Aset Tetap Per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.171.087.421.611,21 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp168.628.399.923,64 atau 4,04%.

Dalam penyajian rincian aset tetap di Kartu Inventarisasi Barang (KIB) masih terdapat informasi yang belum dilengkapi oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara seperti informasi yang berkaitan dengan lokasi/alamat aset dan informasi luas aset seperti tanah, bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta informasi nomor rangka dan merk untuk peralatan dan mesin. Diharapkan informasi tentang aset tersebut dapat diselesaikan secara bertahap. Nilai mutasi perolehan aset tetap per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan seperti *tabel 5.60* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.60 Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2022

Jenis Aset Tetap	Saldo Awal Tahun 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
Tanah	579.591.561.447,38	13.306.486.130,00	10.943.574.533,00	581.954.473.044,38
Peralatan dan Mesin	922.482.310.840,33	59.239.880.612,72	47.843.947.961,89	933.878.243.491,16
Gedung dan Bangunan	1.543.627.195.598,65	125.860.084.218,98	69.988.109.183,32	1.599.499.170.634,31
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.761.375.106.297,03	291.339.199.679,39	137.137.186.263,92	3.915.577.119.712,50
Aset Tetap Lainnya	59.099.988.778,01	3.072.963.464,00	756.788.099,00	61.416.164.143,01
Konstruksi Dalam Pengerjaan	387.798.140.420,24	1.799.762.693,00	58.090.633.295,24	331.507.269.818,00
Akumulasi Penyusutan	(3.082.886.881.770,43)	(446.759.096.469,42)	(108.272.559.084,06)	(3.421.373.419.155,79)
Jumlah	4.171.087.421.611,21	47.859.280.328,67	216.487.680.252,31	4.002.459.021.687,57

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo akhir Aset Tanah Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp581.954.473.044,38. Jika dibandingkan dengan saldo akhir aset Tanah Per 31 Desember 2021 sebesar Rp579.591.561.447,38 saldo akhir per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp2.362.911.597,00 atau 0,41%. Peningkatan aset tanah paling dominan ditahun 2022 dikarenakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pembebasan lahan untuk kelancaran pembangunan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Rincian mutasi aset tanah disajikan pada *lampiran 5.24* dan *tabel 5.61* berikut.

Tabel 5.61 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2022

Saldo Per 31 Desember 2021	579.591.561.447,38
Mutasi tambah	13.306.486.130,00
Barang baru ditemukan / catat	6,00
Mutasi Masuk dari SKPD lain	5.803.126.753,00
Penambahan Tahun Berjalan (Belanja Modal)	7.503.359.371,00
Mutasi kurang	10.943.574.533,00
Mutasi Keluar ke SKPD lain	5.803.126.753,00
Belanja Modal yang merupakan Pembayaran Hutang sebelumnya	5.135.197.780,00
Reviu Koreksi Kurang Utang	5.250.000,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	581.954.473.044,38

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp933.878.243.491,16. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 sebesar Rp922.482.310.840,33, saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp11.395.932.650,83 atau 1,24 %. Secara rinci mutasi aset tetap peralatan dan mesin disajikan dalam *Lampiran 5.25* dan *tabel 5.62* berikut.



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.62 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2022

Saldo Per 31 Desember 2021	922.482.310.840,33
Mutasi tambah	59.569.930.612,72
Terima Hibah	868.494.000,00
Pengadaan BMD yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	170.437.725,00
Mutasi Masuk dari SKPD lain	10.869.810.273,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya (Barang Rusak Berat)	63.922.000,00
Pengakuan hutang tahun berjalan dana BLUD Th.2022	196.806.000,00
Reviu Penambahan Usulan Utang	13.816.000,00
Reklas dari KIB E ke KIB B	95.296.199,00
Penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)	46.866.781.838,72
Koreksi atas Temuan Peralatan dan Mesin pada Belanja Gedung (Disdikpora) Reklas dari KIB-C ke KIB-B dan Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi	46.400.000,00
Koreksi atas Temuan Peralatan dan Mesin pada Belanja Gedung (Dinkes) Reklas dari KIB-C ke KIB-B	149.040.000,00
Koreksi Salah Penganggaran Pemeliharaan Gedung SMPN 18 PPU Pembelian AC 2 Unit Reklas dari KIB-C ke KIB-B (Disdikpora)	10.000.000,00
Koreksi Salah Penganggaran Belanja, Reklas dari Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud	219.126.577,00
Mutasi kurang	48.173.997.961,89
Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dalam Belanja Modal	113.143.282,00
Hibah Pemkab ke Pihak Lain	385.000.000,00
Reklasifikasi BMD ke Aset Lainnya (Barang Rusak Berat)	18.681.743.572,37
Mutasi Keluar ke SKPD lain	10.869.810.273,00
Belanja Modal yang merupakan Pembayaran Hutang sebelumnya	16.182.242.002,00
Reviu Koreksi Kurang Utang	14.920.000,00
BMD dengan nilai dibawah kapitalisasi	986.089.062,52
Penghapusan aset tetap dengan SK Penghapusan	31.635.000,00
Reklas dari KIB B ke KIB C	497.298.000,00
Reklas dari KIB B ke KIB D	14.800.000,00
Reklas dari KIB B ke KIB E	103.304.770,00
Reklas ke Aset Lainnya ATB	294.012.000,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	933.878.243.491,16

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp1.599.499.170.634,31. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.543.627.195.598,65 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp55.871.975.035,66 atau 3,62 %. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan di sajikan pada *lampiran 5.26* dan *tabel 5.64* berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.63 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2022

Saldo Per 31 Desember 2021	1.543.627.195.598,65
Mutasi tambah	125.837.353.766,67
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)	53.251.596.734,72
Terima Hibah	18.103.403.000,00
Pengadaan BMD yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	3.845.919.836,00
Mutasi Masuk dari SKPD lain	29.091.394.801,80
Reviu Penambahan Usulan Utang	12.929.225.402,82
Reviu Koreksi Tambah Utang	253.383.868,09
Reklas dari KIB B ke KIB C	497.298.000,00
Reklas dari KIB E ke KIB C	13.600.000,00
Reklas dari KIB F ke KIB C	7.059.738.174,79
Reklas dari Ekstrakomptabel	339.736.011,45
Koreksi Salah Penganggaran Belanja, Reklas dari Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud	110.317.000,00
Koreksi Salah Penganggaran Belanja Reklas dari Belanja Barjas ke KIB-C	169.190.400,00
Koreksi Salah Penganggaran Belanja Reklas Pemasangan Paving Blok Puskesmas Gunung Intan Reklas dari Belanja Barjas ke KIB-C (Dinkes)	172.550.537,00
Mutasi kurang	69.965.378.731,01
Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dalam Belanja Modal	408.090.100,00
Reklasifikasi BMD ke Aset Lainnya (Barang Rusak Berat)	957.327.000,00
Mutasi Keluar ke SKPD lain	29.091.394.801,80
Belanja Modal yang merupakan Pembayaran Hutang sebelumnya	36.504.585.846,22
Reviu Koreksi Kurang Utang	1.974.978.736,99
BMD dengan nilai dibawah kapitalisasi	27.439.246,00
Penghapusan aset tetap dengan SK Penghapusan	746.417.000,00
Reklas dari KIB C ke KIB D	32.656.000,00
Koreksi atas Temuan Peralatan dan Mesin pada Belanja Gedung (Disdikpora) Reklas dari KIB-C ke KIB-B dan Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi	63.450.000,00
Koreksi Salah Penganggaran Pemeliharaan Gedung SMPN 18 PPU Pembelian AC 2 Unit Reklas dari KIB-C ke KIB-B (Disdikpora)	10.000.000,00
Koreksi atas Temuan Peralatan dan Mesin pada Belanja Gedung (Dinkes) Reklas dari KIB-C ke KIB-B	149.040.000,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	1.599.499.170.634,31

5.3.1.3.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

Saldo akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp3.915.577.119.712,50. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.761.375.106.297,03 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp154.202.013.415,47 atau 4,10%. Rincian Aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan di sajikan pada *lampiran 5.27* dan *tabel 5.64* berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.64 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2022

Saldo Per 31 Desember 2021	3.761.375.106.297,03
Mutasi tambah	291.339.199.679,39
Penambahan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LRA)	231.938.512.822,82
Pengadaan BMD yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	3.966.859.134,00
Reviu Penambahan Usulan Utang	4.938.567.371,82
Reviu Koreksi Tambah Utang	0,30
Reklas dari KIB B ke KIB D	14.800.000,00
Reklas dari KIB C ke KIB D	32.656.000,00
Reklas dari KIB F ke KIB D	50.383.701.850,45
Koreksi Salah Penganggaran Belanja Reklas dari Belanja Barjas ke KIB-D	64.102.500,00
Mutasi kurang	137.137.186.263,92
Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dalam Belanja Modal	2.040.000,00
Reklasifikasi BMD ke Aset Lainnya (Barang Rusak Berat)	2.019.152.057,00
Belanja Modal yang merupakan Pembayaran Hutang sebelumnya	126.450.321.362,82
Reviu Koreksi Kurang Utang	8.665.672.844,10
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	3.915.577.119.712,50

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo akhir Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp61.416.164.143,01. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 sebesar Rp59.099.988.778,01 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.316.175.365,00 atau 3,92 %. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD disajikan pada *Lampiran 5.28* dan *tabel 5.65*.

Tabel 5.65 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2022

Saldo Per 31 Desember 2021	59.099.988.778,01
Mutasi tambah	3.072.963.464,00
Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	2.969.658.694,00
Reklas dari KIB B ke KIB E	103.304.770,00
Mutasi kurang	756.788.099,00
Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dalam Belanja Modal	9.250.000,00
Reklasifikasi BMD ke Aset Lainnya (Barang Rusak Berat)	5.265.000,00
Belanja Modal yang merupakan Pembayaran Hutang sebelumnya	43.312.200,00
Reklas ke Aset Lainnya ATB	590.064.700,00
Reklas dari KIB E ke KIB B	95.296.199,00
Reklas dari KIB E ke KIB C	13.600.000,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	61.416.164.143,01

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp331.507.269.818,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp387.798.140.420,24. Saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp56.290.870.602,24 atau 14,52%. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD disajikan pada *Lampiran 5.29* dan *tabel 5.66*



Tabel 5.66 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2022

Uraian	Saldo Awal Tahun 2022 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	6.941.530.000,00	330.810.813,00	128.856.237,00	7.143.484.576,00
Dinas Kesehatan	297.520.000,00	-	-	297.520.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	93.793.000,00	193.195.500,00	59.053.000,00	227.935.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	121.287.205.739,24	339.661.380,00	57.525.183.025,24	64.101.684.094,00
Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	562.374.583,00	-	377.541.033,00	184.833.550,00
Dinas Perhubungan	256.099.801.335,00	-	-	256.099.801.335,00
Dinas Lingkungan Hidup	54.845.000,00	-	-	54.845.000,00
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	191.574.000,00	-	-	191.574.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59.900.000,00	-	-	59.900.000,00
Sekretariat DPRD	517.456.500,00	-	-	517.456.500,00
Kecamatan Penajam	168.421.000,00	-	-	168.421.000,00
Kecamatan Sepaku	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
Dinas Perikanan	113.484.750,00	-	-	113.484.750,00
Dinas Pertanian	1.310.234.513,00	936.095.000,00	-	2.246.329.513,00
Jumlah	387.798.140.420,24	1.799.762.693,00	58.090.633.295,24	331.507.269.818,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.421.373.419.155,79 dan tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.082.886.881.770,43 dengan rincian pada table 5.67 sebagai berikut

Tabel 5.67 Rincian Akumulasi Penyusutan pada TA 2022 dan 2021

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Peralatan dan Mesin	799.632.213.360,85	759.866.572.828,14
Gedung dan Bangunan	333.184.452.314,68	313.248.351.282,25
Jalan Irigasi dan Jaringan	2.288.556.753.480,26	2.009.771.957.660,04
Jumlah	3.421.373.419.155,79	3.082.886.881.770,43

5.3.1.4 ASET LAINNYA

Aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp634.926.166.335,80 terdiri dari aset tak berwujud netto sebesar Rp1.439.194.843,60 dan aset lain-lain sebesar Rp633.486.971.492,20.

Tabel 5.68 Rincian Aset Lainnya pada TA 2022 dan 2021

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Aset Tak Berwujud	87.501.772.592,93	86.424.383.693,93
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(86.062.577.749,33)	(84.518.083.837,43)
Aset Tak Berwujud Netto	1.439.194.843,60	1.906.299.856,50
Aset Lain-Lain	633.486.971.492,20	178.427.335.326,89
Jumlah	634.926.166.335,80	180.333.635.183,39



5.3.1.4.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo akhir Aset Tak Berwujud Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp87.501.772.592,93 dengan nilai amortisasi Rp86.062.577.749,33, sehingga saldo akhir Aset Tak Berwujud Netto per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.439.194.843,60. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Aset Tak Berwujud Netto Per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.906.299.856,50 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp467.105.012,90 atau 24,50%.

Terhadap aset tak berwujud dapat dilakukan amortisasi selama masa manfaatnya, kecuali untuk aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas (misalnya, merek dagang). Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud beserta amortisasinya per SKPD disajikan pada *Lampiran 5.30*.

5.3.1.4.2 Aset Lain – Lain

Saldo akhir Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp633.486.971.492,20. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2021 sebesar Rp178.427.335.326,89, saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp455.059.636.165,31 atau 255,04%. Rincian Mutasi Aset Lain-Lain di sajikan pada *lampiran 5.31*. Rincian Aset Lain Lain disajikan pada *tabel 5.69* sebagai berikut.

Tabel 5.69 Rincian Saldo Akhir Aset Lain-Lain TA 2022

Uraian	Per 31 Desember 2022
	(Rp)
Dinas KUKM-Perindag (TA 2007)	85.189.700,00
Ternak Sapi dan Kerbau Gaduhan	436.459.500,05
Aset Tetap yang Rusak	48.560.772.284,56
Aset Tetap yang Hilang	517.837.200,00
Aset Tetap yang Akan Dihapuskan	94.859.123.414,07
Aset P3D	12.373.856.144,78
Aset BMD yang Dimanfaatkan Pihak Lain	14.356.007.094,74
Treasury Deposit Facility	462.297.726.154,00
Jumlah	633.486.971.492,20

5.3.1.4.2.1 Aset Lain-Lain Dinas Koperasi UKM dan Perindag

Saldo Aset lainnya – Dinas Koperasi UKM Perindag sebesar Rp85.189.700,00 merupakan sisa kas uang persediaan Tahun Anggaran 2007 yang belum di setorkan ke Kasda.

5.3.1.4.2.2 Aset Lain-Lain Ternak Sapi dan Kerbau Gaduhan

Aset lainnya Ternak Sapi dan Kerbau gaduhan sebesar Rp436.459.500,05. Investasi Non Permanen yang dicatat aset lain lain sebesar Rp436.459.500,05 pada BKAD yang berupa sapi dan ternak



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

gaduhan yang rencananya akan dihibahkan kepada kelompok tani yang selama ini mengelola sapi dan kerbau tersebut. Data sapi dan kerbau gaduhan disajikan pada *lampiran 5.32*

5.3.1.4.2.3 Aset Lain-Lain Aset Tetap Yang Rusak

Saldo aset lainnya– barang rusak berat sebesar Rp48.560.772.284,56 merupakan aset tetap yang kondisinya rusak berat, tidak digunakan lagi untuk operasional kantor dan barang yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomis dimasa depan, sehingga direklasifikasi ke aset lainnya. Rincian aset tetap yang kondisinya rusak disajikan pada tabel 5.70 sebagai berikut.

Tabel 5.70 Rincian Aset Lain-Lain - Aset Tetap Yang Rusak TA 2022

SKPD	Nilai (Rp)
Sekretariat Daerah	630.725.705,88
Sekretariat DPRD	1.251.975.193,15
Sekretariat Korpri	22.770.000,00
Inspektorat	277.224.266,67
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	163.020.000,00
Kantor Perpustakaan dan Arsip	182.972.095,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.655.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	752.760.525,00
Dinas Perhubungan	17.545.000,00
Dinas Perikanan	280.740.000,00
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	83.220.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	57.198.675,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	99.750.614,33
Dinas Sosial	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	66.632.524,99
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.034.911.022,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.356.879.360,96
Dinas Ketahanan Pangan	329.606.270,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	502.978.800,00
Dinas Kesehatan	18.394.540.586,65
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	497.068.250,00
Dinas Pertanian	1.707.532.816,58
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	78.407.435,50
Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan	696.546.050,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.358.081.704,55
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	77.317.800,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	110.568.965,00
Satuan Polisi Pamong Praja	100.617.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	6.359.461.053,15
Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.047.595.535,00



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

SKPD	Nilai (Rp)
Kecamatan Penajam	2.282.544.116,34
Kecamatan Waru	2.113.074.557,00
Kecamatan Babulu	620.284.050,00
Kecamatan Sepaku	663.025.333,81
Badan Pendapatan Daerah	340.541.478,00
Jumlah	48.560.772.284,56

5.3.1.4.2.4 Aset Lain-Lain - Aset Tetap Yang Hilang

Saldo aset lain – lain Aset tetap yang hilang sebesar Rp517.837.200,00 merupakan aset yang tidak di temukan dengan rincian disajikan pada tabel 5.71 sebagai berikut.

Tabel 5.71 Aset Lain-Lain - Rincian Aset Tetap Yang Hilang TA 2022

SKPD	Jumlah (Rp)
Sekretariat DPRD	27.974.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.980.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	415.700.500,00
Dinas Kesehatan	9.350.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00
Kecamatan Babulu	6.716.700,00
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	0,00
Dinas Perumahan Kawasan,pemukiman dan Pertanahan	16.923.000,00
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	39.193.000,00
Jumlah	517.837.200,00

5.3.1.4.2.5 Aset Lain-Lain - Aset Tetap Yang Akan dihapuskan

Aset lain – lain Aset Tetap Yang Akan Dihapuskan sebesar Rp94.859.123.414,07 merupakan aset yang akan dihapus dari Neraca Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan rincian disajikan pada tabel 5.72 sebagai berikut:

Tabel 5.72 Rincian Aset Lain-Lain – Aset Tetap Yang Akan Dihapuskan TA 2022

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Sekretariat Daerah	10.978.934.557,07
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	83.432.292.824,00
3	Kecamatan Penajam	42.180.000,00
4	Kecamatan Sepaku	29.375.000,00
5	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertamanan	376.341.033,00
	Jumlah	94.859.123.414,07



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

5.3.1.4.2.6 Aset Lain-Lain – Aset Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D)

Saldo aset lain – lain aset P3D per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.373.856.144,78 merupakan aset yang belum di terima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Aset tersebut tercatat di Sekretariat Daerah sebesar Rp931.172.753,00 dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp11.442.683.391,78 dengan rincian disajikan pada *tabel 5.73* sebagai berikut:

Tabel 5.73 Rincian Aset Lain-Lain – Aset Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) TA 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah	931.172.753,00
2	Peralatan dan Mesin	6.227.132.528,60
3	Gedung dan Bangunan	4.537.525.400,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	273.405.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	404.620.463,18
Jumlah		12.373.856.144,78

5.3.1.4.2.7 Aset Lain-Lain – Aset BMD Yang Dimanfaatkan Pihak Lain

Saldo aset lain – lain aset BMD yang dimanfaatkan pihak lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.356.007.094,74 aset tersebut tercatat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupa Meubelair dan Alat peraga serta buku pada sekolah – sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan rincian disajikan pada *tabel 5.74 dan lampiran 5.33a dan 5.33b* sebagai berikut.

Tabel 5.74 Rincian Aset Lain-Lain – Aset BMD Yang Dimanfaatkan Pihak Lain TA 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	12.640.422.508,94
2	Aset Tetap Lainnya	1.715.584.585,80
Jumlah		14.356.007.094,74

5.3.1.4.2.8 Aset Lain-Lain – Treasury Deposit Facility (TDF)

Saldo aset lain – lain aset Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2022 sebesar Rp462.297.726.154,00 aset tersebut tercatat di Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa Fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. DBH PBB	Rp 5.341.213.256,00
2. DBH PPh Pasal 21	Rp 2.219.340.069,00
2. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	Rp 58.383.516,00
3. DBH CHT	Rp 32.285,00
4. DBH SDA Minyak Bumi	Rp 5.194.489.674,00
5. DBH SDA Gas Bumi	Rp 6.487.048.105,00



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

6. DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	Rp 1.119.683.918,00
7. DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	Rp 440.841.063.089,00
8. DBH SDA Kehutanan-PSDH	Rp 824.719.031,00
9. DBH SDA Perikanan	Rp 211.753.211,00

5.3.1.5 KEWAJIBAN

5.3.1.5.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp71.240.565.648,32 terdiri dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp55.130.675.640,00, Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp94.000.000,00 dan utang belanja sebesar Rp16.015.890.008,32

5.3.1.5.1.1 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo akhir bagian lancar utang jangka panjang Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp55.130.675.640,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir bagian lancar utang jangka panjang Per 31 Desember 2021 sebesar Rp63.913.344.550,00, saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp8.782.668.910,00 atau 13,74%. Nilai sebesar Rp55.130.675.640,00 merupakan pembayaran bunga pinjaman kepada PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang jatuh tempo di tahun 2023 berdasarkan perhitungan dana pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Rincian bagian lancar utang jangka panjang di sajikan pada tabel 5.75 sebagai berikut.

Tabel 5.75 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang TA 2022 dan 2021

No.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Tahun 2022 (Rp) (Rp)	Tahun 2021 (Rp) (Rp)
1.	Pembayaran Pokok Utang PT.SMI	55.130.675.640,00	63.913.344.550,00
Jumlah		55.130.675.640,00	63.913.344.550,00

5.3.1.5.1.2 Pendapatan diterima dimuka

Saldo akhir Pendapatan di terima di muka Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp94.000.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo Pendapatan di terima di muka Per 31 Desember 2021 sebesar Rp60.000.000,00 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp34.000.000,00 atau 56,67%.

Pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah dan bangunan oleh Perum Bulog Regional Kalimantan Timur yang dipergunakan sebagai gudang penampungan hasil panen petani di Kecamatan Babulu berdasarkan surat perjanjian sewa nomor 903/681/TU-PIMP/BKAD mulai tanggal 1 April 2022 s.d 31 Maret 2025 dengan mekanisme pembayaran dilakukan per tahun sebesar Rp250.000.000,00. Nilai pendapatan diterima dimuka sebesar Rp62.500.000,00 merupakan perhitungan periode sewa 1 Januari 2023 s.d 31 Maret 2023



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah oleh Bank Kaltimara yang dipergunakan sebagai mesin ATM Bank Kaltimara yang berlokasi di Kantor Sekretariat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan surat perjanjian sewa nomor 028/408/BK-PPU/VIII/2020 mulai tanggal 7 Juli 2019 s.d 7 Juli 2024. Nilai sebesar Rp1.500.000,00 merupakan perhitungan periode sewa 7 Januari 2023 s.d 7 Juli 2024.

Pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah di Kawasan Pelabuhan Buluminung oleh PT. Krakatau Bandar Samudera yang dipergunakan sebagai kantor pemasaran Perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhanan dan logistik berdasarkan surat perjanjian sewa nomor 028//TU-PIMP/233.02/BKAD mulai tanggal 25 November 2022 s.d 24 Mei 2023 sebesar Rp36.000.000,00. Nilai Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp30.000.000,00 merupakan perhitungan periode sewa 1 Januari 2023 s.d 24 Mei 2023. Rincian pendapatan diterima dimuka di sajikan pada tabel 5.76 sebagai berikut:

Tabel 5.76 Pendapatan Diterima Dimuka TA 2022 dan 2021

No.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Sewa Tanah dan Bangunan oleh Bulog	62.500.000,00	57.500.000,00
2.	Sewa Tanah oleh Bank Kaltimara	1.500.000,00	2.500.000,00
3.	Sewa Tanah oleh PT. Krakatau Bandar Samudera	30.000.000,00	0,00
	Jumlah	94.000.000,00	60.000.000,00

5.3.1.5.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang belanja Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp16.015.890.008,32. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Utang belanja Per 31 Desember 2021 sebesar Rp328.182.836.406,54. Saldo akhir Per 31 Desember 2021 mengalami **penurunan** sebesar Rp312.166.946.398,22 atau 95,12%. Rincian Utang Belanja di sajikan pada **Lampiran 5.34a dan Lampiran 5.34b**

Saldo Audited Utang Belanja Per 31 Desember 2021	328.182.836.406,54
Mutasi tambah	105.238.917.169,51
Penambahan Utang Berdasarkan Hasil Reviu	104.643.658.201,12
Koreksi Tambah Utang Berdasarkan Hasil Reviu Inspektorat	595.258.968,39
Mutasi kurang	417.405.863.567,73
Pelunasan Utang Belanja	388.960.961.408,04
Pemotongan Berdasarkan Berita Acara Pembayaran	7.071.464.584,80
Koreksi Kurang Berdasarkan Hasil Reviu Inspektorat	11.517.463.418,09
Koreksi Kurang Berdasarkan Surat Pernyataan	9.855.974.156,80
Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2022	16.015.890.008,32

5.3.1.5.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo akhir kewajiban jangka panjang Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp124.043.979.671,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir kewajiban jangka panjang Per 31



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Desember 2021 sebesar Rp179.174.655.311,00 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp55.130.675.640,00 atau 30,77%.

5.3.1.5.2.1 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Saldo akhir utang jangka panjang lainnya Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp124.043.979.671,00 merupakan pembayaran pokok pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk periode tahun 2024 s/d 2026 sebagai berikut :

1. Pembayaran Pokok Utang di Tahun 2024	Rp55.130.675.640,00
2. Pembayaran Pokok Utang di Tahun 2025	Rp55.130.675.640,00
3. Pembayaran Pokok Utang di Tahun 2026	Rp13.782.628.391,00

Berikut Payung Hukum Perjanjian Kerjasama PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara :

1. Perjanjian PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Akte Perjanjian Pembiayaan Nomor 6 tanggal 14 September 2017 dibuat dihadapan Notaris Sri Rohani di Penajam;
2. Perubahan Pertama Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor PERJ-009/SMI/0118 tanggal 31 Januari 2018 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
3. Perubahan Kedua Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor PERJ-012/SMI/0218 tanggal 6 Februari 2018 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
4. Perubahan Ketiga Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor PERJ-076/SMI/0720 tanggal 9 Juli 2020 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
5. Perubahan Keempat Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor PERJ-101/SMI/0820 tanggal 11 Agustus 2020 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
6. Perubahan Lima Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 32 tanggal 13 November 2020 Notaris Liestiani Wang di Jakarta Selatan.

5.3.1.6 EKUITAS

5.3.1.6.1 Ekuitas

Saldo akhir Ekuitas Per 31 Desember 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp4.835.188.069.661,28. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Ekuitas Per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.024.488.961.364,36 saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp810.699.108.296,92 atau 20,14%.

5.4 PENJELASAN ATAS AKUN- AKUN LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN

Pendapatan - LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD),



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2022. Rincian Pendapatan - LO Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.224.531.403.396,45. Rincian Pendapatan-LO disajikan pada *tabel 5.77* dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.77 Rincian Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian		Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	113.705.845.081,45	110.010.986.855,35
2	Pendapatan Transfer	2.059.125.921.234,00	1.065.039.025.576,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	51.699.637.081,00	32.523.341.355,44
Jumlah		2.224.531.403.396,45	1.207.573.353.786,79

Realisasi Pendapatan LO tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.224.531.403.396,45 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LO tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.207.573.353.786,79, realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp1.016.958.049.609,66 atau 84,22 %. Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp113.705.845.081,45 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp110.010.986.855,35 realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp3.694.858.226,10 atau 3,36%. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan pada *tabel 5.78* sebagai berikut

Tabel 5.78 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian		Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	46.950.084.440,00	26.112.969.250,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	9.019.800.189,00	8.398.484.238,00
3	Pendapatan dari Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan – LO	2.868.315.111,76	3.907.442.056,61
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	54.867.645.340,69	71.592.091.310,74
Jumlah		113.705.845.081,45	110.010.986.855,35

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp46.950.084.440,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Rp26.112.969.250,00 realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp20.837.115.190,00 atau 79,80%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan pada *tabel 5.79* sebagai berikut

Tabel 5.79 Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pajak Hotel – LO	231.374.530,00
2.	Pajak Restoran – LO	3.000.686.168,00
3.	Pajak Hiburan – LO	40.011.875,00
4.	Pajak Reklame – LO	745.880.377,00
5.	Pajak Penerangan Jalan – LO	3.067.637.857,00
6.	Pajak Parkir – LO	18.033.500,00
7.	Pajak Air Tanah – LO	97.713.045,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet – LO	24.322.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	1.852.153.621,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan – LO	12.292.160.492,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	25.580.110.975,00
	Jumlah	46.950.084.440,00

Perhitungan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO dapat kami uraikan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LRA)	46.010.036.795,00
Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LO)	46.950.084.440,00
Selisih	940.047.645,00
Penjelasan Selisih	940.047.644,00
Mutasi Tambah	2.313.192.370,00
Penambahan Piutang Pajak Reklame	21.101.601,00
Penambahan Piutang Pajak Hotel	2.047.000,00
Penambahan Pajak Restoran	33.329.548,00
Penambahan Piutang Pajak Hiburan	2.182.950,00
Penambahan Pajak Penerangan Jalan	675.180,00
Penambahan Piutang Pajak Parkir	150.000,00
Penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	4.125.843,00
Penambahan Piutang Pajak Air Tanah	4.406.843,00
Penambahan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2.245.173.405,00
Mutasi Kurang	1.373.144.726,00
Pelunasan Piutang Pajak Reklame	80.405.252,00
Pelunasan Piutang Pajak Restoran	263.722.588,00
Pelunasan Piutang Pajak Penerangan Jalan	25.401.190,00
Pelunasan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.220.387,00
Pelunasan Piutang Pajak Air Tanah	1.237.855,00
Pelunasan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	991.157.454,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.019.800.189,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp8.398.484.238,00 realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp621.315.951,00 atau 7,40%. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO disajikan pada *tabel 5.80* sebagai berikut:

Tabel 5.80 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
I	RETRIBUSI JASA UMUM – LO	2.595.838.254,00
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	2.084.287.826,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	305.423.927,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	550.000,00
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	205.576.501,00
II	RETRIBUSI JASA USAHA – LO	6.009.239.438,00
5.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	698.402.650,00
6.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan	433.703.391,00
7.	Retribusi Terminal – LO	3.980.000,00
8.	Retribusi Tempat khusus Parkir – LO	33.600.000,00
9.	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	16.110.000,00
10.	Retribusi Pelayanan ke pelabuhan – LO	4.823.443.397,00
III	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU – LO	414.722.497,00
11.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	414.697.497,00
12.	Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan Angkutan Umum-LO	25.000,00
	Jumlah	9.019.800.189,00

Perhitungan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO dapat kami uraikan sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LRA)	8.306.854.374,00
Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LO)	9.019.800.189,00
Selisih	712.945.815,00
Penjelasan Selisih	712.945.815,00
Mutasi Tambah	806.435.815,00
Pendapatan diterima dimuka dari sewa gedung oleh Bulog	57.500.000,00
Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	294.420.000,00
Penambahan Pendapatan diterima dimuka dari sewa ATM	1.000.000,00
Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	453.515.815,00
Mutasi Kurang	93.490.000,00
Pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	990.000,00
Pendapatan diterima dimuka dari sewa lahan oleh Krakatau International Port	30.000.000,00
Pendapatan diterima dimuka dari sewa gedung oleh BULOG	62.500.000,00

5.4.1.1.3 Pendapatan dari pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan

Realisasi Hasil Pendapatan dari pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan pada Laporan Operasional tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.868.315.111,76 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.907.442.056,61 realisasi tahun 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.039.126.944,85 atau 26,59%. Rincian Hasil Pendapatan dari pengelolaan Aset Daerah disajikan pada *tabel 5.81* sebagai berikut

**Tabel 5.81 Rincian Pendapatan Hasil dari Pengelolaan Aset yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	2.671.835.979,53
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	196.479.132,23
	Jumlah	2.868.315.111,76



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Perhitungan Realisasi Pendapatan Pengelolaan Aset Yang Di Pisahkan – LO dapat kami uraikan sebagai berikut:

Pendapatan Hasil Pengelolaan Aset Yang Di Pisahkan -LO	2.868.315.111,76
Pendapatan Hasil Pengelolaan Aset Yang Di Pisahkan - LRA	2.671.835.979,53
Selisih	196.479.132,23
Penjelasan Selisih	196.479.132,23
Mutasi Tambah	196.479.132,23
Laba Perumda Benuo Taka berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited 2022	196.479.132,23

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada Laporan Operasional tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp54.867.645.340,69 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp71.592.091.310,74 realisasi tahun 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp16.724.445.970,05 atau 23,36%. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah – LO disajikan pada *tabel 5.82* sebagai berikut:

Tabel 5.82 Rincian Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penerimaan Jasa Giro – LO	931.322.909,99
2.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	135.005.322,10
3.	Pendapatan Denda atas keterlambatan Pekerjaan – LO	7.183.436.418,34
4.	Pendapatan Denda Pajak – LO	342.479.980,00
5.	Pendapatan Denda Retribusi – LO	16.900,00
6.	Pendapatan dari Pengembalian – LO	7.220.323.925,83
7.	Pendapatan BLUD – LO	39.025.106.138,43
8.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	29.953.746,00
	Jumlah	54.867.645.340,69

Perhitungan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO dapat kami uraikan sebagai berikut:

Lain - Lain Pendapatan Yang Sah - LO	54.867.645.340,69
Lain - Lain Pendapatan Yang Sah - LRA	68.397.986.763,79
Selisih	13.530.341.423,10
Penjelasan Selisih	13.530.341.423,10
Mutasi Tambah	9.421.015.025,90
Penambahan Piutang BLUD	2.207.745.119,00
Penambahan Piutang Taspen	6.800.000,00
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan	7.071.464.584,80
Penambahan Piutang Remunerasi DBH Fasilitas TDF	135.005.322,10
Mutasi Kurang	22.951.356.449,00
Pelunasan Piutang BLUD	22.935.091.575,00
Pelunasan Piutang Taspen	16.264.874,00



5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi TA 2022 sebesar Rp2.059.125.921.234,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.065.039.025.576,00, realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp994.086.895.658,00 atau 93,34%. Rincian Pendapatan Transfer-LO disajikan pada tabel 5.83 sebagai berikut.

Tabel 5.83 Rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian		Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO	1.755.933.658.976,00	789.105.756.185,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	18.401.226.000,00	55.643.691.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	284.791.036.258,00	220.289.578.391,00
Jumlah		2.059.125.921.234,00	1.065.039.025.576,00

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Laporan Operasional tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.755.933.658.976,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp789.105.756.185,00 realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp966.827.902.791,00 atau 122,52%. Rincian Lain-lain Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO disajikan pada *tabel 5.84* sebagai berikut

Tabel 5.84 Rincian Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian		Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	1.413.428.430.332,00	390.052.289.418,00
3	Dana Alokasi Umum – LO	262.161.465.209,00	271.407.999.000,00
4	Dana Alokasi Khusus Fisik – LO	34.399.833.646,00	75.661.142.165,00
5	Dana ALOkasi Khusus Non Fisik – LO	45.943.929.789,00	51.984.325.602,00
Jumlah		1.755.933.658.976,00	789.105.756.185,0

Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-LO sebesar Rp1.755.933.658.976,00 yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA sebesar Rp.1.293.635.932.822,00 + Dana Treasury Deposit Facility sebesar Rp462.297.726.154,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Laporan Operasional tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp18.401.226.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp55.643.691.000,00 realisasi tahun 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp37.242.465.000,00 atau 66,93%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO disajikan pada *tabel 5.85* sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

Tabel 5.85 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian		Realisasi 2022	Realisasi 2021
1.	Dana Insentif Daerah – LO	18.401.226.000,00	55.643.691.000,00
Jumlah		18.401.226.000,00	55.643.691.000,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO sebesar Rp18.401.226.000,00 berupa Alokasi Dana Insentif Daerah.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Laporan Operasional tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp284.791.036.258,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp220.289.578.391,00 realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp64.501.457.867,00 atau 29,28%. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO disajikan pada *tabel 5.86* sebagai berikut:

Tabel 5.86 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian		Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO	172.042.086.258,00	109.293.094.391,00
2	Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi -LO	112.748.950.000,00	110.996.484.000,00
Jumlah		284.791.036.258,00	220.289.578.391,00

Perhitungan Realisasi Realisasi Lain-lain Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO dapat kami uraikan sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Provinsi - LO	260.665.191.258,00
Transfer Pemerintah Provinsi - LRA	284.791.036.258,00
Selisih	24.125.845.000,00
Penjelasan Selisih	24.125.845.000,00
Mutasi Tambah	34.636.410.000,00
Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak	34.636.410.000,00
Mutasi Kurang	10.510.565.000,00
Pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	10.510.565.000,00

5.4.1.2.4 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah– LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada Laporan Operasional tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp51.699.637.081,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp32.523.341.355,44 realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp19.176.295.725,56 atau 58,69%. Rincian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO disajikan pada *tabel 5.87* sebagai berikut:

Tabel 5.87 Rincian Lain Lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian		Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Pendapatan Hibah – LO	20.614.701.128,00	5.521.044.732,00



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Uraian		Realisasi 2022	Realisasi 2021
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	31.084.935.953,00	27.002.296.623,44
Jumlah		51.699.637.081,00	32.523.341.355,44

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO untuk tahun 2022 sebesar Rp51.699.637.081,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp32.523.341.355,44, realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp19.176.295.725,56 atau 37,09%. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah disajikan pada *tabel 5.87* sebagai berikut.

5.4.1.2.4.1 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah pada Laporan Operasional tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp20.614.701.128,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp5.521.044.732,00 realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp15.093.656.396,00 atau 273,38%. Rincian Pendapatan Hibah disajikan pada *tabel 5.88* sebagai berikut:

Tabel 5.88 Rincian Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian		Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	20.410.845.478,00	3.567.540.453,00
	a. Hibah Berupa Aset	18.769.777.000,00	0,00
	b. Hibah Berupa Persediaan	0,00	0,00
	c. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja	1.368.068.478,00	0,00
	d. Hibah Air Minum Perkotaan	273.000.000,00	0,00
2	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	190.000.000,00	1.953.504.279,00
	a. Hibah Berupa Aset	190.000.000,00	0,00
	b. Hibah Berupa Persediaan	0,00	0,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan /Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	12.120.000,00	0,00
	a. Hibah Berupa Aset	12.120.000,00	0,00
4	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	1.735.650,00	0,00
	a. Hibah Berupa Persediaan	1.735.650,00	0,00
Jumlah		20.614.701.128,00	5.521.044.732,00



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

5.4.1.2.4.2 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO

Realisasi Pendapatan Lainnya pada Laporan Operasional tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp31.084.935.953,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp27.002.296.623,44 realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp4.082.639.329,56 atau 15,12%. Rincian Pendapatan Lainnya disajikan pada *tabel 5.89* sebagai berikut:

Tabel 5.89 Rincian Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian		Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah Dana BOS – LO	22.126.183.442,00	27.002.296.623,44
2.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	8.958.752.511,00	0,00
Jumlah		31.084.935.953,00	27.002.296.623,44

5.4.2 BEBAN

Jumlah Beban Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.386.779.767.049,26 rincian disajikan pada *tabel 5.90* sebagai berikut.

Tabel 5.90 Rincian Beban-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian		Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 Rp)
1	Beban Operasi	931.654.620.146,80	876.732.421.914,96
	- Beban Pegawai	433.758.051.620,60	454.646.933.471,00
	- Beban Barang dan Jasa	438.380.533.963,38	394.014.439.584,99
	- Beban Bunga	22.653.806.633,00	16.637.316.584,00
	- Beban Hibah	26.723.150.276,00	8.645.936.894,00
	- Beban Bantuan Sosial	10.013.670.000,00	2.692.443.365,00
	-Beban Penyisihan Piutang	125.407.653,82	95.352.015,97
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	335.967.477.078,46	371.381.356.123,08
	-Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	58.569.905.407,41	63.121.029.989,39
	-Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.511.444.844,07	61.725.155.067,91
	-Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	240.341.632.915,08	245.170.734.733,68
	-Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.544.493.911,90	1.364.436.332,10
3	Beban Transfer	117.116.097.332,00	57.746.618.694,00
	- Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	5.000.000.000,00
	- Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	117.116.097.332,00	52.746.618.694,00
4	Beban Tak Terduga	2.041.572.492,00	5.922.723.895,00
	Beban Tak Terduga	2.041.572.492,00	5.922.723.895,00
Jumlah		1.386.779.767.049,26	1.311.783.120.627,04



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.4.2.1 BEBAN OPERASI

Beban Operasi Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp931.654.620.146,80 terdiri dari :

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp433.758.051.620,60. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp454.646.933.471,00, realisasi tahun 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp20.888.881.850,40 atau 4,59%. Rincian beban pegawai disajikan pada tabel 5.91 sebagai berikut.

Tabel 5.91 Rincian Beban Pegawai - LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Beban Gaji Pokok dan Tunjangan ASN – LO	239.408.417.361,00	224.813.100.672,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO	111.782.638.828,00	154.681.596.137,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LO	60.558.351.048,60	55.946.157.539,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	18.386.928.975,00	14.870.518.028,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO	91.111.254,00	168.917.298,00
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH – LO	705.980.000,00	712.480.000,00
7.	Beban Pegawai BLUD	2.824.624.154,00	3.454.163.797,00
	Jumlah	433.758.051.620,60	454.646.933.471,00

1. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp239.408.417.361,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp224.813.100.672,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp14.595.316.689,00 atau 6,10%.

2. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp111.782.638.828,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp154.681.596.137,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **Penurunan** sebesar Rp42.898.957.309,00 atau 38,38%.

3. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp60.558.351.048,60,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp55.946.157.539,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp4.612.193.509,60 atau 7,62%.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

4. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp18.386.928.975,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp14.870.518.028,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp3.516.410.947 atau 19,12%.

5. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp91.111.254,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp168.917.298,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **Penurunan** sebesar Rp77.806.044,00 atau 85,40%.

6. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH – LO

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH sebesar Rp705.980.000,00 yaitu Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH LRA sebesar Rp732.020.000,00 – Pelunasan Utang Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp26.040.000,00

7. Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp2.824.624.154,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.454.163.797,00. Realisasi tahun 2022 mengalami Penurunan sebesar Rp629.539.643,00 atau 22,29%

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa merupakan Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp438.380.533.963,38. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp394.014.439.584,99, realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp44.366.094.378,39 atau 11,26%. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada *tabel 5.92* sebagai berikut.

Tabel 5.92 Rincian Beban Barang dan Jasa- LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
I	Beban Barang	76.261.231.630,14	79.905.090.880,49
1.	Beban Barang Pakai Habis	76.021.462.900,14	79.900.961.430,49
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	239.768.730,00	4.129.450,00
II	Beban Jasa	237.292.006.155,00	206.736.429.539,67
3.	Beban Jasa Kantor	194.157.063.850,00	168.435.815.762,00
4.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	33.130.297.200,00	31.552.696.300,00
5.	Beban Sewa Tanah	119.860.000,00	13.560.000,00
6.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	957.630.642,00	637.443.536,00
7.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.319.356.663,00	1.765.406.288,67
8.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.987.263.800,00	1.575.994.203,00



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
9.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	110.000.000,00	45.000.000,00
10.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	150.000.000,00	185.000.000,00
11.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	3.360.534.000,00	2.525.513.450,00
III	Beban Pemeliharaan	11.501.797.455,00	6.105.529.504,48
12.	Beban Pemeliharaan Tanah	0	450.400.000,00
13.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.857.122.814,00	4.596.400.780,00
14.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.021.923.656,00	961.986.624,48
15.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	622.750.985,00	96.742.100,00
IV	Beban Perjalanan Dinas	48.287.640.978,00	33.875.553.087,00
16.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.287.640.978,00	33.875.553.087,00
V	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.738.600.752,78	6.541.466.563,00
17.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.720.213.242,00	1.443.931.584,00
18.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.018.387.510,78	5.097.534.979,00
VI	Beban Barang dan Jasa BOS	16.670.861.208,46	19.480.123.742,35
19.	Beban Barang dan Jasa BOS	16.670.861.208,46	19.480.123.742,35
VII	Beban Barang dan Jasa BLUD	37.628.395.784,00	41.370.246.268,00
20.	Beban Barang dan Jasa BLUD	37.628.395.784,00	41.370.246.268,00
	Jumlah	438.380.533.963,38	394.014.439.584,99

1. Beban Barang Pakai Habis

Beban Barang Pakai Habis periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp76.021.462.900,14. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp79.900.961.430,49. Realisasi tahun 2022 mengalami **Penurunan** sebesar Rp3.879.498.530,35 atau 4,86%.

2. Beban Barang Tak Habis Pakai

Beban Jasa Kantor - LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp239.768.730,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp4.129.450,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp235.639.280,00 atau 98,28%.

3. Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor - LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp194.157.063.850,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp168.435.815.762,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp25.721.248.088,00 atau 13,25%.

4. Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Beban Premi Asuransi - LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp33.130.297.200,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp31.552.696.300,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp1.577.600.900,00 atau 4,76%



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

5. Beban Sewa Tanah

Beban Sewa Tanah - LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp119.860.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp13.560.000,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp106.300.000,00 atau 88,69%

6. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Beban Sewa Peralatan dan Mesin - LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp957.630.642,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp637.443.536,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp320.187.106,00 atau 33,44%.

7. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban Sewa Gedung dan Bangunan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp2.319.356.663,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.765.406.288,67. Realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp553.950.374,33 atau 23,88%.

8. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Beban Jasa Konsultansi Konstruksi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp2.987.263.800,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.575.994.203,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp1.411.269.597,00 atau 89,55%.

9. Beban Jasa Konsultansi non Konstruksi

Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Beban Jasa Konsultansi Konstruksi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp110.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp45.000.000,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **peningkatan** sebesar Rp65.000.000,00 atau 59,09%.

10. Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Beban Beasiswa Pendidikan PNS periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp150.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu Rp185.000.000,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **Penurunan** sebesar Rp 35.000.000,00 atau sebesar 23,33%.

11. Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS sebesar Rp3.360.534.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.525.513.450,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp835.020.550,00 atau 24,85%.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

12. Beban Pemeliharaan Tanah

Beban Pemeliharaan Tanah periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 realisasinya sebesar Nihil.

13. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 realisasinya sebesar Rp7.857.122.814,00 dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp4.596.400.780,00 Realisasi tahun 2022 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp3.260.722.034 atau 41,50%

14. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 realisasinya sebesar Rp3.021.923.656,00 dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp961.986.624,48. Realisasi tahun 2022 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp2.059.937.031,52 atau 214,13%

15. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 realisasinya sebesar Rp622.750.985,00 dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp96.742.100,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp526.008.885 atau 84,47%

16. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp48.287.640.978,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp33.875.553.087,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp14.412.087.891,00 atau 29,85%.

17. Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.720.213.242,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu Rp1.443.931.584,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp3.276.281.658,00 atau 69,41%.

18. Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.018.387.510,78. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu Rp5.097.534.979,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp920.852.531,78 atau 15,30%.

19. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp16.670.861.208,46. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp19.480.123.742,35. Realisasi tahun 2022 mengalami Penurunan sebesar Rp2.809.262.533,89 atau sebesar 16,85%.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

20. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp37.628.395.784,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp41.370.246.268,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **Penurunan** sebesar Rp3.741.850.484,00 atau sebesar 9,04%.

5.4.2.1.3 Beban Bunga

Beban Bunga periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp22.653.806.633,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp16.637.316.584,00. Realisasi tahun 2022 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp6.016.490.049,00 atau sebesar 36,16%. Pembayaran tersebut merupakan Beban Bunga terhadap perhitungan Pinjaman Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur.

5.4.2.1.4 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp26.723.150.276,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp8.645.936.894,00, realisasi tahun 2022 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp18.077.213.382,00 atau 209,08%. Rincian Beban Hibah disajikan pada tabel 5.93 sebagai berikut

Tabel 5.93 Rincian Beban Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
I	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	90.000.000,00	90.000.000,00
1.	Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	90.000.000,00	90.000.000,00
II	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.861.336.800,00	7.784.123.418,00
2.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.801.336.800,00	720.000.000,00
3.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	274.347.818,00
4.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	60.000.000,00	6.789.775.600,00
III	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	771.813.476,00	771.813.476,00
5.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	771.813.476,00	771.813.476,00
Jumlah		26.723.150.276,00	8.645.936.894,00

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp10.013.670.000,00 yaitu Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat LRA sebesar Rp10.013.670.000,00. (Berupa Uang Bagi Korban Bencana Konflik



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

Sosial dan Korban Bencana Kebakaran di Kelurahan Jenebora). Rincian Beban Sosial disajikan pada tabel 5.94 sebagai berikut.

Tabel 5.94 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
I	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	9.733.670.000,00	2.692.443.365,00
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.733.670.000,00	2.692.443.365,00
II	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	280.000.000,00	0,00
2.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	280.000.000,00	0,00
Jumlah		10.013.670.000,00	2.692.443.365,00

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp125.407.653,82 merupakan beban penyisihan piutang pajak Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp21.899,75 , penyisihan piutang Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Rp1.467.150,00, Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp120.631.025 dan Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp3.287.579,07.

5.4.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan merupakan Beban Penyusutan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp335.967.477.078,46. Rincian Beban Penyusutan disajikan pada tabel 5.95 dan tabel 5.96 sebagai berikut.

Tabel 5.95 Rincian Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin (KIB B)	58.569.905.407,41	63.121.029.989,39
2	Gedung dan Bangunan (KIB C)	38.511.444.844,07	61.725.155.067,91
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	240.341.632.915,08	245.170.734.733,68
4	Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.544.493.911,90	1.364.436.332,10
Jumlah		335.967.477.078,46	371.381.356.123,08

Tabel 5.96 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per SKPD Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	SKPD	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	29.869.443.946,16	32.117.843.518,52
2	Dinas Kesehatan	9.707.007.251,74	10.812.373.756,00
3	RSUD	16.110.500.202,13	14.374.033.963,21
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	241.488.471.813,55	277.194.511.357,15
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9.480.215.671,00	7.180.553.572,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

No	SKPD	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
		(Rp)	(Rp)
6	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1.941.157.474,00	1.765.777.650,00
7	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1.269.464.177,70	1.217.620.499,70
8	Dinas Perhubungan	556.200.914,00	852.377.751,00
9	Badan Lingkungan Hidup	1.660.784.126,92	2.011.351.384,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	404.758.316,00	469.858.812,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	299.929.832,00	251.500.533,00
12	Dinas Sosial	210.438.037,00	210.107.857,89
13	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal	159.554.841,00	326.868.978,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	54.560.042,25	53.365.073,00
15	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	3.693.062.353,00	2.686.382.952,00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	142.788.618,00	195.705.752,00
17	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	33.678.550,00	86.174.947,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	296.325.050,00	320.265.095,00
19	BPBD	3.021.114.245,00	3.069.331.693
20	Sekretariat Daerah	4.559.312.166,00	3.997.540.001,98
21	Sekretariat DPRD	3.147.555.517,00	2.813.835.629,63
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	619.981.909,00	754.783.206,00
23	Inspektorat	265.981.733,00	371.004.003,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	399.136.832,00	344.713.247,00
25	Kecamatan Penajam	2.150.862.258,01	2.596.155.647,00
26	Kecamatan Waru	423.828.188,00	525.089.080,00
27	Kecamatan Babulu	239.659.037,00	243.541.629,00
28	Kecamatan Sepaku	330.002.721,00	411.292.437,00
29	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	3.629.450,00	7.965.650,00
30	Dinas Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan	67.571.016,00	63.775.918,00
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	183.577.246,00	250.834.479,00
32	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	514.803.507,00	1.510.163.587,00
33	Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian	925.218.506,00	884.609.746,00
34	Dinas Pertanian	1.032.750.820,00	726.450.800,00
35	Dinas Perikanan	551.592.749,00	610.921.168,00
36	Badan Pendapatan Daerah	152.557.962,00	72.674.750,00
	Jumlah	335.967.477.078,46	371.381.356.123,08

5.4.2.3 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer merupakan Beban Transfer periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp117.116.097.332,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp57.746.618.694,00, realisasi tahun 2022 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp59.369.478.638,00 atau 102,81%.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

5.4.2.3.1 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan merupakan Beban Bantuan Keuangan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp117.116.097.332,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp57.746.618.694,00, realisasi tahun 2022 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp59.369.478.638,00 atau 102,81%. Faktor Dominan Peningkatan tersebut Rincian Beban Bantuan Keuangan disajikan pada *tabel 5.97* sebagai berikut.

Tabel 5.97 Rincian Beban Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	5.000.000.000,00
2.	Beban .Bantuan Keuangan Umum DaerahProvinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	117.116.097.332,00	51.121.618.694,00
3.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	1.625.000.000,00
Jumlah		117.116.097.332,00	57.746.618.694,00

1. Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar Nihil
2. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa sebesar Rp 117.116.097.332,00 dengan Rincian sebagai berikut :
 - a) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kurang Salur Tahun 2021 sebesar Rp9.530.055.606,00
 - b) Pembayaran Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp1.625.000.000,00
 - c) Pembayar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2022 sebesar Rp105.961.041.726,00
3. Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa sebesar **Nihil**.

5.4.2.4 BEBAN TIDAK TERDUGA

Beban Tidak Terduga sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.041.572.492,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp5.922.723.895,00 realisasi tahun 2022 mengalami **Penurunan** sebesar Rp3.881.151.403,00 atau 65,31%.Penurunan tersebut di karenakan berkurangnya pembiayaan terhadap penanganan pandemic Covid 19.

5.4.3 SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Surplus sebesar Rp372.556.266.477,46



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

5.4.4 SURPLUS NON OPERASIONAL

5.4.4.1 Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya

Realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp10.517.822.695,18 dengan Rincian sebagai berikut :

- a) Koreksi Kurang Nilai Utang Surat Pernyataan sebesar Rp10.077.848.886,10
- b) Koreksi Kurang Nilai Utang Tidak Diajukan Reviu sebesar Rp25.887.600,00
- c) Koreksi Kurang Nilai Utang Reviu Inspektorat sebesar Rp99.580.000,00
- d) Koreksi Kurang Nilai Utang Hibah Disdikpora sebesar Rp180.000.000,00
- e) Koreksi Kurang Nilai Utang Kelebihan Pengajuan sebesar Rp5.400.000,00
- f) Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen Alsintan sebesar Rp129.106.209,08

5.4.5 DEFISIT NON OPERASIONAL

5.4.5.1 Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp33.000.462.634,11 dengan Rincian sebagai berikut :

- a) Penghapusan Aset tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp28.979.520.307,06
- b) Penurunan Investasi Kerugian Perumda Air Minum Danum Taka Tahun 2022 sebesar Rp3.706.424.885,00
- c) Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen UMKM sebesar Rp102.176.598,05
- d) Penurunan Nilai Aset Lain Lain Ternak Gaduhan (Dinas Pertanian) sebesar Rp212.340.844,00

5.4.6 SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERSIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan adalah selisih antara Surplus Non Operasional dan Defisit Non Operasional selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Defisit sebesar Rp22.482.639.938,93

Realisasi surplus/Defisit Pos luar Biasa pada tahun 2022 sebesar Nihil

5.4.7 SURPLUS / DEFISIT LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional dan surplus/defisit pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 Surplus sebesar Rp815.268.996.408,26

5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang di klasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan aktivitas non anggaran. Informasi ini disajikan untuk



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Arus Kas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.5.1 SALDO AWAL KAS

Saldo awal kas di Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan BOS per 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp41.676.369.271,11 yang merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2021.

5.5.2 PERUBAHAN ARUS KAS

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah disajikan pada *tabel 5.98* sebagai berikut.

Tabel 5.98 Kenaikan Penurunan Arus Kas Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	558.248.357.683,38	329.792.097.475,53
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(348.381.909.461,26)	(254.984.436.356,82)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	(63.913.344.550,00)	(46.348.006.730,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	2.847.100,00	-
Kenaikan (Penurunan) Kas	145.955.950.772,12	28.459.654.388,71

Berdasarkan tabel diatas realisasi arus kas daerah Tahun Anggaran 2022 terjadi **peningkatan** atau surplus sebesar Rp145.955.950.772,12 dibandingkan dengan tahun sebelumnya surplus sebesar Rp28.459.654.388,71. Saldo akhir 31 Desember 2022 rekening Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan BOS sebesar Rp187.632.320.043,23 Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut.

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tanpa mengandalkan sumber dana dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp558.248.357.683,38 dan Rp329.792.097.475,53 yang merupakan selisih surplus antara Arus Masuk Kas dikurangi Arus Keluar Kas dengan uraian sebagai berikut.

5.5.3.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas selama tahun anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar dan Rp1.757.844.430.423,32 dan Rp1.222.720.463.515,79 dengan rincian seperti disajikan pada *tabel 5.99* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.99 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Kode	Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
5.3.3.1	Arus Masuk Kas		
5.3.3.1.1	Penerimaan Pajak Daerah	46.010.036.795,00	25.627.497.245,00
5.3.3.1.2	Penerimaan Retribusi Daerah	8.306.854.374,00	6.723.470.973,00
5.3.3.1.3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.671.835.979,53	2.487.623.482,61
5.3.3.1.4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	68.397.986.763,79	53.050.724.615,74
5.3.3.1.5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	951.130.704.178,00	390.052.289.418,00
5.3.3.1.6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	262.161.465.209,00	271.407.999.000,00
5.3.3.1.7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	34.399.833.646,00	75.661.142.165,00
5.3.3.1.8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	45.943.929.789,00	51.984.325.602,00
5.3.3.1.9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	18.401.226.000,00	55.643.691.000,00
5.3.3.1.10	Penerimaan Dana Desa	27.029.362.000,00	38.775.111.000,00
5.3.3.1.11	Penerimaan Pendapatan Bagi dari Provinsi	147.916.241.258,00	110.646.308.391,00
5.3.3.1.12	Penerimaan Bantuan Keuangan	112.748.950.000,00	110.996.484.000,00
5.3.3.1.13	Penerimaan Hibah	1.641.068.478,00	2.661.500.000,00
5.3.3.1.14	Penerimaan Pendapatan Lainnya	31.084.935.953,00	27.002.296.623,44
	Jumlah	1.757.844.430.423,32	1.222.720.463.515,79

5.5.3.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.199.596.072.739,94 dan Rp892.928.366.040,26 dengan rincian seperti disajikan pada *tabel 5.100* sebagai berikut.

Tabel 5.100 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Kode	Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
5.3.3.2	Arus Keluar Kas		
5.3.3.2.1	Pembayaran Pegawai	511.854.352.851,60	380.071.503.726,00
5.3.3.2.2	Pembayaran Barang dan Jasa	482.164.061.155,34	382.521.030.936,26
5.3.3.2.3	Pembayaran Bunga	22.653.806.633,00	16.637.316.584,00
5.3.3.2.4	Pembayaran Hibah	26.723.150.276,00	8.375.936.894,00
5.3.3.2.5	Pembayaran Bantuan Sosial	10.013.670.000,00	2.692.443.365,00
5.3.3.2.6	Pembayaran Tidak Terduga	2.041.572.492,00	6.108.404.841,00
5.3.3.2.7	Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	5.000.000.000,00
5.3.3.2.8	Pembayaran Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	144.145.459.332,00	91.521.729.694,00
	Jumlah	1.199.596.072.739,94	892.928.366.040,26



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari aktivitas investasi aset menjelaskan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas investasi Pada Tahun Anggaran 2022 menunjukkan arus kas netto sebesar minus Rp348.381.909.461,26 dengan rincian sebagai berikut.

5.5.4.1 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas selama tahun anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp348.381.909.461,26 dan Rp254.984.436.356,82 dengan rincian seperti disajikan pada *tabel 5.101* sebagai berikut.

Tabel 5.101 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2022 dan 2021

Kode	Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
5.3.4.1	Arus Keluar Kas		
5.3.4.1.1	Perolehan Tanah	7.503.359.371,00	292.827.035,00
5.3.4.1.2	Perolehan Peralatan dan Mesin	46.866.781.838,72	48.618.407.921,82
5.3.4.1.3	Perolehan Gedung dan Bangunan	53.251.596.734,72	29.110.006.350,00
5.3.4.1.4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	231.938.512.822,82	152.007.787.009,00
5.3.4.1.5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.969.658.694,00	5.355.408.041,00
5.3.4.1.6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.852.000.000,00	19.600.000.000,00
	Jumlah	348.381.909.461,26	254.984.436.356,82

5.5.5 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari aktivitas pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2022 minus sebesar Rp63.913.344.550,00 dan tahun 2021 surplus sebesar Rp46.348.006.730,00.

5.5.5.1 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas selama tahun anggaran 2022 sebesar untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bukan bank kepada PT. Sarana Multi Infrastrukutr (SMI) sebesar Rp63.913.344.550,00 dan tahun anggaran 2021 sebesar Rp46.348.006.730,00.

Tabel 5.102 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Kode	Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
5.3.5.1	Arus Keluar Kas		
5.3.5.1.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	63.913.344.551,00	46.348.006.730,00
	Jumlah	63.913.344.551,00	46.348.006.730,00



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

5.5.6 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSISTORIS

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris tahun anggaran 2022 mengalami defisit sebesar Rp2.847.100,00 dan Aktivitas Transitoris tahun anggaran 2021 surplus sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut.

5.5.6.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas tahun 2022 terdiri dari penerimaan Sisa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp82.660.861.333,00. Rincian arus masuk kas disajikan pada *tabel 5.103* sebagai berikut.

Tabel 5.103 Rincian Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021

Kode	Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
5.3.6.1	Arus Masuk Kas		
5.3.6.1.1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	82.658.014.233,00	58.862.792.257,00
5.3.6.1.2	Penerimaan Sisa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	6.328.014,00
5.3.6.1.3	Penerimaan Sisa Kas Dana Non Kapitasi dan Bendahara Penerimaan	2.847.100,00	0,00
Jumlah		82.660.861.333,00	58.869.120.271,00

5.5.6.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas tahun 2022 terdiri dari penerimaan perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp82.658.014.233,00. Rincian arus keluar kas disajikan pada *tabel 5.104* sebagai berikut.

Tabel 5.104 Rincian Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021

Kode	Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
5.4.4.2	Arus Keluar Kas		
5.4.4.2.1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	82.658.014.233,00	58.869.120.271,00
Jumlah		82.658.014.233,00	58.869.120.271,00

5.5.7 KENAIKAN/PENURUNAN KAS

Dalam tahun anggaran 2022 dan 2021 terjadi kenaikan/penurunan kas masing-masing sebesar Rp145.955.950.772,12 dan Rp28.459.654.388,71 seperti disajikan pada *tabel 5.105* sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Kenaikan/Penurunan Kas Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	558.248.357.683,38	329.792.097.475,53
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(348.381.909.461,26)	(254.984.436.356,82)



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	(63.913.344.550,00)	(46.348.006.730,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	2.847.100,00	-
Kenaikan/(Penurunan) Kas	145.955.950.772,12	28.459.654.388,71

5.5.8 SALDO AWAL KAS DI KAS DAERAH, BLUD, KAPITASI DAN BOS

Saldo awal kas di Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan BOS per 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp41.676.369.271,11 yang merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2021 seperti disajikan pada *tabel 5.106* berikut ini :

Tabel 5.106 Rincian Saldo Awal Kas Tahun Anggaran 2022

Uraian	1 Januari 2022 (Rp)
Saldo Akhir Kas Daerah	31.675.743.861,78
Saldo Akhir Kas BLUD	8.235.389.913,72
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi	436.133.789,40
Saldo Akhir Kas BOS	1.329.101.706,21
Saldo Awal Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan BOS	41.676.369.271,11

5.5.9 SALDO AKHIR DANA NON KAPITASI

Saldo akhir kas Dana Non Kapitasi tahun anggaran 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp2.847.100,00

5.5.10 SALDO AKHIR KAS DI KAS DAERAH, BLUD, KAPITASI DAN BOS

Saldo akhir kas di Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan BOS tahun anggaran 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp187.632.320.043,23 dan Rp41.676.369.271,11 seperti disajikan pada *tabel 5.107* sebagai berikut.

**Tabel 5.107 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan BOS
Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

No	Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
5.3.9.1	Saldo Akhir Kas Daerah	183.214.068.746,13	31.675.743.861,78
5.3.9.2	Saldo Akhir Kas BLUD	3.686.008.700,15	8.235.389.913,72
5.3.9.3	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi	203.184.392,80	436.133.789,40
5.3.9.4	Saldo Akhir Kas BOS	529.058.204,15	1.329.101.706,21
	Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan BOS	187.632.320.043,23	41.676.369.271,11

5.5.11 SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir kas tahun anggaran 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp187.632.320.043,23 dan Rp41.679.216.371,11 seperti disajikan pada *tabel 5.108* sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

Tabel 5.108 Rincian Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan BOS	187,632,320,043.23	41.676.369.371,11
Saldo Akhir Kas	187,632,320,043.23	41.679.216.371,11

5.6 PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan perubahan ekuitas akhir Tahun 2022 senilai Rp4.404.930.358.391,81 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp4.024.488.961.364,36 merupakan ekuitas akhir tahun 2021.

5.6.2 Surplus / Defisit – LO

Penambahan /pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp350.316.598.099,53

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar atas penyesuaian dan koreksi kurang selama Tahun 2022 sebesar Rp4.607.540.163,65 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar disajikan pada *tabel 5.109*, *tabel 5.110* dan *tabel 5.111* sebagai berikut.

Tabel 5.109 Dampak Kumulatif Perubahan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
		(Rp)	(Rp)
5.6.3.1	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	43.275.452,31
5.6.3.2	Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap dan Amortisasi	(4.063.554.218,80)	29.501.783.489,71
5.6.3.3	Koreksi Ekuitas Lainnya	(543.985.944,85)	9.638.711.173,89
	Jumlah	(4.607.540.163,65)	39.183.770.115,91

Tabel 5.110 Dampak Kumulatif Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap dan Amortisasi Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi TA 2022
		(Rp)
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	(10.394.176.371,39)
2.	Dinas Kesehatan	11.482.951.240,91
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	10.282.181,22
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(7.367.978.817,13)
5.	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.793.704.836,00
6.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	37.185.983,00



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

No	Uraian	Realisasi TA 2022
		(Rp)
7.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	2.502.449,00
8.	Dinas Perhubungan	(5.594.694,46)
9.	Dinas Lingkungan Hidup	(28.377.978,00)
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.657.007,00
11.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	12.169.500,00
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.669.500,00
13.	Dinas Sosial	990.508,00
14.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	66.632.524,99
15.	Dinas Koperasi UKM dan Perindag	941.250.280,00
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	304.096.098,00
17.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	98.219.365,00
18.	Satuan Polis Pamong Praja	89.254.000,00
19.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(36.609.988,00)
20.	Sekretariat Daerah	(4.125.408.920,01)
21.	Sekretariat DPRD	1.487.267.337,84
22.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.026.870.781,55
23.	Inspektorat	222.744.383,67
24.	Kecamatan Penajam	(468.080.808,99)
25.	Kecamatan Waru	529.930.662,00
26.	Kecamatan Babulu	449.653.379,00
27.	Kecamatan Sepaku	(334.229.234,00)
28.	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	22.770.000,00
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	377.504.816,00
30.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	75.287.369,00
31.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	(153.460.915,00)
32.	Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian	89.262.098,00
33.	Dinas Pertanian	(1.813.479.787,00)
34.	Dinas Ketahanan Pangan	209.432.157,00
35.	Dinas Perikanan	22.246.034,00
36.	Badan Pendapatan Daerah	291.308.804,00
	Jumlah	(4.063.554.218,80)

Tabel 5.111 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi TA 2022
		(Rp)
1.	Aset Baru Ditemukan	6,00
	- Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1,00
	- Kecamatan Penajam	4,00
	- Kecamatan Sepaku	1,00
2.	Reklas dari Ekstracomtabel ke aset tetap	339.736.011,45



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

No	Uraian	Realisasi TA 2022
		(Rp)
	- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	331.096.311,45
	- Dinas Kesehatan	8.639.700,00
3.	Penyesuaian Penyisihan Piutang	1.323.961.170,04
	- RSUD	227.835.123,07
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	49.124,37
	- Badan Pendapatan Daerah	1.096.076.922,60
4.	Aset di Hibahkan	(1.185.187.500,00)
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	(385.000.000,00)
	- Kecamatan Waru	(800.187.500,00)
5.	Koreksi Kurang Nilai Piutang Dengan Dokumen	(82.282.540,00)
	- Badan Pendapatan Daerah	(82.282.540,00)
6.	Koreksi Nilai Ivestasi Perumda Air Minum Danum Taka	(940.213.092,34)
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	(940.213.092,34)
	Jumlah	(543.985.944,85)

1. Aset Baru Ditemukan

Rincian Aset baru ditemukan sebesar Rp6,00 merupakan aset yang baru ditemukan dan dicatat pada Tahun 2022 disajikan pada *lampiran 5.35*

2. Reklas dari Ekstracomtabel ke Aset Tetap

Rincian reklas dari extracomtabel ke aset tetap sebesar Rp339.736.011,45 disajikan pada *lampiran 5.36*

3. Penyesuaian Penyisihan Piutang

Rincian penyisihan piutang sebesar Rp1.323.961.170,04 disajikan pada *lampiran 5.37*

4. Aset di Hibahkan

Rincian aset di hibahkan sebesar Rp1.185.187.500,00 disajikan pada *lampiran 5.38*

5. Koreksi Kurang Nilai Piutang Dengan Dokumen

Koreksi kurang nilai piutang dengan dokumen sebesar Rp82.282.540,00 merupakan perlunasan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh wajib pajak dengan menunjukkan bukti dokumen pembayaran.

6. Koreksi Nilai Ivestasi Perumda Air Minum Danum Taka

Koreksi kurang nilai investasi Perumda Air Minum Danum Taka sebesar Rp940.213.092,34 merupakan koreksi kurang ekuitas laporan keuangan Perumda Air Minum Danum Taka dari Unaudited 2021 ke Audited 2021 sebesar Rp1.019.444.992,34 dan koreksi tambah ekuitas terhadap laporan keuangan Audited 2022 Perumda Air Minum Danum Taka berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp4.835.150.417.608,97



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

5.7 INFORMASI NONKEUANGAN

5.7.1 Aset Milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang disewakan, pinjam pakai dan Hibah ke Instansi Vertikal, Pihak Ketiga, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat

5.7.1.1 Tanah

Terdiri dari Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipinjamkaikan kepada Instansi vertikal, Pihak ketiga dan masyarakat guna meningkatkan pembangunan dan perkembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun rincian Tanah yang dipinjamkaikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Instansi vertikal dapat dirinci pada lampiran berikut pada *Lampiran 5.39*

5.7.1.2 Peralatan dan Mesin

Terdiri dari Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipinjam pakaikan kepada pejabat Instansi Vertikal dan organisasi masyarakat guna kelancaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Rincian peralatan dan mesin berupa kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipinjamkaikan kepada Instansi Vertikal dan Organisasi disajikan pada *Lampiran 5.40*

5.7.1.3 Gedung dan Bangunan

Terdiri dari Gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipinjamkaikan kepada Instansi Vertikal, Pihak ketiga dan masyarakat guna meningkatkan pembangunan dan perkembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun rincian Gedung berupa Bangunan milik pemerintah yang di pinjamkaikan kepada instansi vertikal dan organisasi dapat dirinci pada *lampiran 5.41*

5.7.1.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

Terdiri dari jalan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipinjamkaikan kepada Instansi Vertikal, Pihak ketiga dan masyarakat guna meningkatkan kelancaran pembangunan dan perkembangan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun rincian jalan yang dipinjamkaikan berupa jalan milik pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipinjamkaikan kepada instansi vertikal dan pihak ketiga dapat dilihat pada *lampiran 5.42*

5.7.1.5 Aset yang Disewakan

Terdiri dari tanah dan gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang disewakan kepada Instansi vertikal, Pihak ketiga dan masyarakat guna meningkatkan pembangunan dan perkembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun rincian tanah dan gedung yang disewakan dapat dilihat pada *lampiran 5.43*



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

5.7.1.6 Daftar Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Memiliki dan Belum Memiliki Bukti Kepemilikan Yang Sah

Masih terdapat beberapa Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah, tetapi proses penyelesaian untuk mendapatkan bukti kepemilikan atas aset Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap dilakukan sampai dengan saat ini, berikut Rekap Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut :

- a. Rekap Aset Tanah yang memiliki Bukti Kepemilikan /Sertifikat dapat dilihat pada *Lampiran 5.44.*
- b. Rekap Aset tanah yang memiliki bukti kepemilikan berupa segel/SKT/Hibah/Penguasaan Lahan dapat dilihat pada *Lampiran 5.45.*
- c. Rekap Aset Tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan dapat dilihat pada *Lampiran 5.46.*

5.8 PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun Anggaran 2022 yang diselesaikan pada tanggal 4 Mei 2023



BAB VI

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA DAN PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

6.1 Pengungkapan Penting Lainnya

Merupakan kejadian-kejadian penting yang terjadi selama periode TA 2022, dimana kejadian tersebut sangat mempengaruhi dalam pelaporan keuangan baik SKPD terkait maupun Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara antara lain :

- Terkait Pemanfaatan Gedung Asrama Haji/Mess PKK sebagai Hotel oleh PT. Momik Perkasa Indonesia, Plt. Bupati telah menetapkan Keputusan Nomor 028/1575/TU-Pimp/04/BKAD tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Formulasi/Besaran Sewa Tanah dan Bangunan Asrama Haji/Mess PKK dengan besaran sewa senilai Rp645.300.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum menerima sewa tanah dan bangunan senilai tersebut diatas. Adapun permasalahan yang terjadi dimana Pemanfaatan Gedung tersebut telah mendahului terbitnya Surat Perjanjian Kerja Sama, Pemkab Penajam Paser Utara telah mengirimkan
 1. Surat teguran Adiministrasi SP1 kepada PT. Momik Perkasa Indonesia tanggal 1 Februari 2023 Nomor 028/256/umum&keuangan
 2. Surat Bupati kepada PT. Momik Perkasa Indonesia No 028/389/TU-Pimp/Umum&Keuangan tanggal 02 Maret 2023 tentang penghentian sementara seluruh kegiatan aktivitas dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 3. Surat Asisten Administrasi Umum kepada Kasatpol PP No 330/425/TU-Pimp/Um&Keu tanggal 14 Maret 2023 tentang permohonan bantuan pengawasan Aktifitas PT. Momik Perkasa Indonesia.
- Pada tanggal 14 Desember 2018 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyerahkan Bukti Asli Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang, dan Jaminan Kesungguhan antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diwakilkan oleh Ir. Wahyudi Nuryadi, M.Si (Kepala Dinas Lingkungan Hidup) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang pada saat itu diwakilkan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur berupa :
 - a. Bukti Asli Bilyet Deposito Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang dan Jaminan Kesungguhan
 - b. Buku tabungan asli Jaminan Kesungguhan
 - c. Rekapitulasi Rekening giro dengan rincian :

Jaminan kesungguhan dengan total nilai Rp14.331.388,00 terdiri dari :

 1. PT. Labangka Mitra Sejati Rp 3.066.336,00
 2. Perusda Benuo Taka Rp 3.563.355,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

3. PT. Benuo Taka Bara Makmur	Rp	3.218.610,00
4. KSU Pelangi Taka	Rp	3.223.037,00
5. Yuyung	Rp	627.150,00
6. Hasnah	Rp	632.900,00

Jaminan Reklamasi dengan total nilai Rp2.235.971.024,00

1. PT. Penajam Prima Coal (Pantai Lango)	Rp	204.506.162,00
2. PT. Penajam Prima Coal (Buluminung)	Rp	921.339.374,00
3. PT. Sarana Daya Utama	Rp	300.000.000,00
4. Perusda Benuo Taka	Rp	85.435.800,00
5. PT. Cahayaku Bara Sejahtera	Rp	300.000.000,00
6. PT. Harapan Kota Tepian	Rp	53.214.844,00
7. PT. Paser Prima Coal Indonesia	Rp	118.260.000,00
8. PT. Bara Utama Jaya	Rp	53.214.844,00
9. PT. Rabani Corporindo	Rp	200.000.000,00

Jaminan pasca tambang senilai Rp2.685.192.747,00

1. PT. Penajam Prima Coal (Pantai Lango)	Rp	190.301.867,00
2. PT. Penajam Prima Coal (Buluminung)	Rp	2.394.890.880,00
3. PT. Rabani Corporindo	Rp	100.000.000,00

Rekening giro penempatan jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang berdasarkan data yang diserahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara dan belum di validasi oleh pihak bank. Adapun total penempatan di bank sebagai berikut:

1. Bank Kaltim Cabang Penajam No Rek 0130140236 an Dinas Pertambangan Kab Penajam Paser Utara senilai Rp7.945.800.801,70
2. BNI Cabang Penajam No Rekening 1333669997 atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara senilai Rp1.170.410.440,00

Dengan Total rekening giro sebesar Rp9.116.211.241,70

Pada tanggal 1 Desember 2022, diterima surat dari KCP BNI PPU yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah terkait tanggapan surat konfirmasi saldo rekening dengan Nomor surat 500/136/Perekonomian/XI/2022 tanggal 22 November 2022, perihal informasi saldo per 30 November 2022 atas rekening nomor 1333669997 yaitu senilai Rp1.851.719.818,00. Dan ditanggal 7 Desember 2022, Sekretaris Daerah bersurat kepada Bankaltimtara dengan Nomor surat: 500/142/Perekonomian/XII/2022 perihal Penerbitan Rekening Koran Nomor 0131402236 atas nama Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan jawaban surat dari Bankaltim berupa penyampaian rekening koran pada tanggal 6 Februari 2022 dengan saldo per 1 Februari 2020 senilai Rp8.715.504.142,00



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten PPU bersurat kepada Kadis PMPTSP Prov Kaltim dengan Nomor surat: 503/159/TU-Pimp/030/Perekonomian/II/2023 tanggal 30 Januari 2023, perihal dana jaminan usaha pertambangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemkab PPU telah menyerahkan bukti asli rekening dan berkas lainnya terkait jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang dan jaminan kesungguhan kepada Dinas ESDM Prov Kaltim dan sejak penyerahan tersebut Pemkab PPU tidak melakukan pencatatan dana jaminan dimaksud dalam sistem pelaporan keuangan daerah;
- b. Bahwa rekening jaminan usaha pertambangan yang masih terdaftar pada Bank Kaltimtaras Nomor 0131402236 atas nama Dinas Pertambangan Kab PPU dan Bank BNI Nomor 1333669997 atas nama Pemkab PPU disebabkan karena Dinas ESDM Prov Kaltim tidak melakukan perubahan/balik nama rekening sehingga masih tercatat dengan nama sebagaimana tercantum;
- c. Mengenai Tindak Lanjut LHP BPK atas LK Pemprov Kaltim Tahun 2021 terkait Jaminan usaha pertambangan yang tidak sesuai ketentuan maka kami menyampaikan agar Dinas PMPTSP Provinsi Kaltim berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Kaltim terkait persoalan dimaksud.

Berdasarkan surat Kepala Dinas PMPTSP Prov Kaltim kepada Sekretaris Kab PPU Nomor 503/251/DPMPTSP-IV/II/2023 tanggal 9 Februari 2023, perihal: pendampingan koordinasi. Sehubungan dengan beralihnya kewenangan pengelolaan usaha pertambangan ke pemerintah pusat terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 sesuai UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ini disampaikan bahwa masih terdapat jaminan usaha pertambangan dalam bentuk rekening giro yang tercatat pada Pemprov dan Pemkab berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Kaltim diantaranya adalah pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp6.170.915.623,50 pada rekening giro Bank Kaltimtaras dan Bank BNI. Sehingga dilakukan koordinasi dengan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara dan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM pada tanggal 28 Februari 2023 bersama beberapa Pemerintah Daerah yang terkait di Provinsi Kalimantan Timur.

Atas tindak lanjut hal tersebut diatas Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nomor surat 003/372/DPMPTSP-IV/III/2023 perihal: undangan rapat verifikasi data jaminan usaha pertambangan tanggal 6 Maret 2023 yang dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan c.q Kabag SDA Sekretariat Daerah, Kepala BKAD (berhalangan hadir), Pihak BPD Kaltimtaras Cabang Penajam, dan pihak BNI Cabang Penajam.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Berdasarkan penjelasan kronologi serah terima Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang, dan Jaminan kesungguhan sampai dengan perkembangan saat ini dan atas terbitnya UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kewenangan pengelolaan usaha pertambangan telah beralih ke pemerintah pusat terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020, dengan demikian dinyatakan bahwa Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang dan Jaminan Kesungguhan bukan lagi kewenangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Proses pengelolalaannya maupun pencatatannya di Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

6.2 Entitas Pelaporan

Pada Tahun 2022 di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 36 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 12 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan, 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perhubungan, 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Olahraga, 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 3 Unit Pada Dinas Pertanian dan 1 Unit pada Dinas UKM Perindustrian dan Perdagangan.

- Pada Tahun 2022 tidak terdapat pemekaran SKPD Baru;
- APBD Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih sangat dipengaruhi pada asumsi-asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB, Pendapatan Daerah, dan Belanja Daerah; dan
- Selain hal tersebut tidak ada kejadian luar biasa yang signifikan baik bencana sosial yang di luar kemampuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

6.3 Ketentuan Peraturan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20) yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 10 April 2001;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 2) yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 25 Januari 2022;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 32) yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 18 Oktober 2022;
- d. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2022 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 3 yang ditetapkan dan diundangkan pada 25 Januari 2022;



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- e. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2022 Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 23 yang ditetapkan dan diundangkan tanggal pada 27 Juni 2022;

6.4 Kebijakan Penanganan Dampak Inflasi pada APBD TA 2022

Kebijakan perubahan penjabaran APBD dan Penanganan Dampak Inflasi APBD TA 2022 diatur dalam peraturan-peraturan antara lain:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- b. Belanja wajib untuk perlindungan sosial terkait Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK 07?2022 Tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi adalah Pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan, penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah untuk kemudian daerah wajib melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau Laporan Realisasi Anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau telah melakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2022;
- c. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD tahun Anggaran 2022 mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid 2019 meliputi antara lain: dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*, dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* untuk pos komando tingkat kelurahan, insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi *Corona Virus disease 2019* dan belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

6.5 Permasalahan Hukum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Hingga akhir tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki sejumlah perkara hukum, baik tingkat pertama, ataupun sedang dalam upaya hukum banding dan/atau kasasi di tingkat Mahkamah Agung, antara lain:

- a. Perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/PN.Bpp dengan pokok perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan akibat patahnya pipa bawah laut milik PT Pertamina RU (*Refinery Unit*) V yang mengakibatkan pencemaran pada area seluas 7.000 Ha. Penggugat dalam perkara ini adalah Paradarma Rupang, dkk dengan pihak yang Tergugat diantaranya Gubernur Kaltim (T-I), Bupati Penajam Paser Utara (T-II), Wali Kota Balikpapan (T-III), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (T-IV), Menteri Perhubungan (T-V), serta Menteri Kelautan dan Perikanan (T-VI). Status perkara hukum ini berada dalam upaya hukum Kasasi oleh Penggugat;
- b. Perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Bpp dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan atau kepemilikan tanah berdasarkan Surat Pernyataan Hak Tanah Perwatasan Tanggal 27 Januari 1982 seluas ±35.200 m2 yang terletak di RT. 3 Teluk Tebang Kelurahan Jenebora Kecamatan Balikpapan Seberang”. Penggugat dalam perkara ini adalah PT Pertamina Balikpapan. Terdapat sebelas subjek hukum yang menjadi Tergugat dan salah satunya adalah Lurah Jenebora selaku Turut Tergugat selain Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dan PT Balikpapan Oil Terminal. Status perkara hukum ini berada dalam upaya kasasi oleh Tergugat;
- c. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PN/Bpp dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan atau kepemilikan tanah berdasarkan Surat Pernyataan Hak Tanah Perwatasan Tanggal 08 September L9BZ seluas t28.000 m2 yang terletak di RT. 3 Teluk Tebang Kelurahan Jenebora Kecamatan Balikpapan Seberang. Penggugat dalam perkara ini adalah PT Pertamina Balikpapan. Terdapat empat belas subjek hukum yang menjadi Tergugat dan salah satunya adalah Lurah Jenebora selaku Turut Tergugat selain Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, dan PT Balikpapan Oil Terminal. Status perkara hukum ini berada dalam upaya kasasi oleh Penggugat;
- d. Perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atas tanah seluas 378 Ha untuk pembangunan Bendungan Sepaku-Semoy yang terletak di Desa Tengin Baru, Desa Sukomulyo dan Desa Argo Mulyo. Penggugat dalam perkara ini adalah Adji Pangeran Hario bin Adji Mohamad Parikesit. Beberapa subjek hukum dari Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi Tergugat adalah Camat Sepaku, Kade Tengin Baru, Kades Sukomulyo, dan Kades Argomulyo. Status perkara hukum ini Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 196K/PDT/2022, tanggal 23 Februari 2022 (telah berkekuatan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- hukum tetap/*inkracht*) serta amar putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi semula Penggugat;
- e. Perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atas tanah yang terkena proyek jalan *coastal road* tahun 2016 (*multi years*) seluas 7.100 M2 yang terletak di RT. 1 Kelurahan Sungai Parit. Peggugat dalam perkara ini adalah H. Zainal Abidin. Subjek hukum yang digugat atau sebagai pihak Tergugat adalah Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Lurah Sungai Parit, dan Camat Penajam. Status perkara hukum ini adalah Putusan Banding menguatkan putusan PN Penajam Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnj, tanggal 21 Oktober 2021, yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontevankelijke*) dengan status Putusan Banding Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 212/PDT/2021/PT SMR, tanggal 12 Januari 2022 (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht* serta Amar Putusan: Menguatkan putusan PN Penajam Nomor 6/Pdt.G/2021/Pnj, tanggal 21 Oktober 2021 (yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 - f. Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN/Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan tuntutan untuk melakukan pembebasan atas tanah milik Penggugat berdasarkan SHM No. 159 tahun 1987. Penggugat dalam perkara ini adalah Ramlie, dkk dengan pihak Tergugat adalah Perumda Air Minum Danum Taka selaku Tergugat I dan Bupati Penajam Paser Utara selaku Tergugat II. Status perkara hukum ini Putusan Kasasi Nomor 3337 K/Pdt/2022 (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) dan Amar Putusan: Menolak permohonan Kasasi dari Tergugat I;
 - g. Perkara Nomor 14/Pdt.G/2021IPN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan atau kepemilikan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diklaim sebagai tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Izin District Keradjaan Koetai di Balikpapan Nomor 572 / 1932 tertanggal 15 Maret L932 yang didaftarkan sebagai Hak Kepemilikan Tanah Nomor Reg.No. 22/7956.Pihak penggugat dalam perkara ini adalah Rostini, Bobby Mahmud, dan H. Daeng Aji M. Yunus HK (Penggugat Intervensi). Pihak yang menjadi Tergugat adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Status perkara hukum ini adalah Gugatan dicabut karena dalam tahap mediasi para penggugat tidak dapat menunjukkan bukti penguasaan/kepemilikan yang sah atas tanah serta tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah yang diklaim.
 - h. Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN/ Pnjm dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan atau kepemilikan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diklaim sebagai tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan jual Beli/Ganti Rugi Tanah Perbatasan tertanggal 15 Maret 2001. Penggugat dalam perkara ini adalah Tn. Muhammad Yusuf alias M. Yusuf bin Sadide dengan pihak yang Tergugat adalah Stasiun TVRI Kaltim, Kepala Desa Gunung Intan, dan Pemerintah



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Kabupaten Penajam Paser Utara. Status perkara hukum ini sedang dalam tahap Pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht* dengan Amar Putusan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- i. Perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pnjm dengan pokok perkara “Gugatan atas dasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penguasaan konsesi Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara seluas 3.964,9 Ha yang terletak di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku. Pihak Penggugat dalam perkara ini adalah PT Pasir Prima Coal Indonesia dengan pihak Tergugat adalah PT Mandiri Sejahtera Energindo, Jono, S.Sos, M.H., dan Bupati Penajam Paser Utara. Status perkara ini sedang dalam tahap Pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Kasasi oleh Tergugat I;
- j. Perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Melawan Hukum atas pemutusan kontrak kerja PT.Putera Dua Pitue sebagaimana surat perjanjian kerja Nomor: 027/004/BPBD-RR/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 tentang Paket Pekerjaan Kontruksi, Rehabilitasi, dan Rekontruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (dana hibah Pemerintah Pusat melalui BNPB untuk Rehabiltasi Pasca Bencana Tahun 2020). Pihak Penggugat dalam perkara ini adalah PT.Putera Dua Pitue dengan Pihak Tergugat Bupati Penajam Paser Utara dan Badan Penanggulangan Bencana. Status Perkara Gugatan dicabut karena Penggugat melakukan perbaikan gugatan;
- k. Perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pemutusan kontrak kerja PT. Putra Dua Pitue sebagaimana surat perjanjian Kerja Nomor: 027/004/BPBD-RR/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (dana hibah Pemerintah Pusat melalui BNPB untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2020). Pihak Penggugat PT. Putra Dua Pitue dengan Pihak Tergugat Bupati Penajam Paser Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPBD. Status Perkara Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnj, tanggal 18 Juli 2022 (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*). Amar Putusan Menyatakan Pengadilan Negeri Penajam tidak berwenang mengadili perkara ini.
- l. Perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah dan pembangunan SDN 020 Penajam yang berlokasi di Jl. Pondok Uma RT.04 Kelurahan Saloloang, yang diklaim masuk ke sebagian tanah milik Para Penggugat berdasarkan SHM No. 162 Tahun 1997 a.n. Marsude K (Orang Tua Para Penggugat). Pihak Penggugat Mardiana, Marhaenah, Maya Segara, Mardiani, Marhayati, Muhrainah, Ahmadiansyah, Muhammad Diansyah dan Herlinawati dengan Pihak Tergugat Kepala SDN 020 Penajam dan Bupati Penajam Paser Utara. Status Perkara Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pnj, tanggal 6 Februari 2022. Amar



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Putusan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard*. Penggugat menyatakan Banding dan telah menyampaikan Permohonan Banding pada tanggal 22 Februari 2023.

- m. Perkara Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atas tanah yang terkena proyek jalan coastal road tahun 2016 (multi years) seluas 7.100 M2 yang terletak di RT. 1 Kelurahan Sungai Parit. Pihak Penggugat H. Zainal Abidin dengan Pihak Tergugat Hasanuddin, Bakri, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, Lurah Sungai Parit dan Camat Penajam. Status Perkara Putusan Gugatan dicabut karena Tergugat atas nama Bakri diinformasikan telah meninggal dunia.
- n. Perkara Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Wanprestasi atas Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 1 November 2021 terkait *Purchase Order* (pesanan pembelian) dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Seragam Siswa Baru TK/PAUD, SD/MI, SMP dan SMA/SMK beserta atributnya TA. 2021 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilaksanakan oleh Tergugat I selaku kontraktor. Tergugat I tidak dapat melaksanakan realisasi pembayaran sisa *Purchase Order* yang ada sebagaimana tertuang dalam “Surat Perjanjian Kerja” tanggal 01 November 2021, dan telah lewat masa jatuh temponya sebesar Rp. 5.578.742.000,- (*lima milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*). Pihak Penggugat Feri Widiyanto untuk dan atas nama CV Saritama dengan Pihak Tergugat CV Mega Jaya dan Bupati Penajam Paser Utara Cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kab. Penajam Paser Utara. Status Perkara Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Pnj, tanggal 29 Desember 2022. Amar Putusan Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian (*akta van dading*) yang telah disetujui tersebut.
- o. Pokok Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan Perizinan serta penerimaan lainnya di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara. Perkiraan Kerugian Keuangan Negara Rp. 5.700.000.000,00 (*lima miliar tujuh ratus juta rupiah*). Pihak Terdakwa Abdul Gafur Mas’ud selaku Bupati Penajam Paser Utara Periode 2018 s.d. 2023, Terdakwa Nur Afifah Balgis selaku Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Balikpapan, Terdakwa Muliadi selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa Edi Hasgoro selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten PPU, Terdakwa Jusman selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten PPU dan Terdakwa Ahmad Zuhdi alias Yudi dengan Status Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr, tanggal 26 September 2022. Terdakwa Abdul Gafur Mas’ud dan Nur Afifah Balgis). Amar Putusan Menyatakan Terdakwa I. Abdul Gafur Mas’ud dan Terdakwa II. Nur Afifah Balgis



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Abdul Gafur Mas'ud dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Nur Afifah Balgis dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. Abdul Gafur Mas'ud berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 5.700.000. 000,00 (*lima miliar tujuh ratus juta rupiah*) dikurangi dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (yang telah disita oleh Penyidik pada saat tertangkap tangan pada tanggal 12 Januari 2022), dikurangi uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (pengembalian dari saksi Andi Arief dan Jemmy Setiawan), dikurangi uang sebesar Rp. 420.800.000,00 (uang yang berada dalam rekening penampungan KPK yang berasal dari rekening Mandiri Nomor Rekening 1480015776548 atas nama Terdakwa II. Nur Afifah Balgis) = Rp. 4.179.200.000,00 (*empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) dikurangi dengan hasil lelang atas aset berupa sebidang tanah beserta sertifikatnya sebagaimana barang bukti Nomer 447, dan barang barang yang dibeli oleh Terdakwa II. Nur Afifah Balgis berupa 1 (satu) buah Hermes Fragrance – Eau Des Merveilles, 1 (satu) buah Shirt merk Zara Size M dan 1 (satu) buah Hat-Bob Dior sebagaimana barang bukti Nomer 366, barang bukti nomer 367 dan barang bukti nomer 368, jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. Abdul Gafur Mas'ud berupa Pencabutan Hak Dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan terhitung sejak Terdakwa I. Abdul Gafur Mas'ud selesai menjalani pidana pokoknya. Status Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr, tanggal 26 September 2022. Terdakwa Muliadi, Edi Hasmoro dan Jusman. Amar Putusan Menyatakan Terdakwa I. Muliadi, Terdakwa II. Edi Hasmoro, dan Terdakwa III. Jusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muliadi berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Edi Hasmoro berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. Jusman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

(tiga ratus juta rupiah) subsidi air 4 (empat) bulan kurungan, Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. Muliadi untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 410.500.000,00 (empat ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II. Edi Hasmoro untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 557.000.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa III. Jusman untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (delapan) bulan. Status Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr, tanggal 31 Mei 2022. Terdakwa Ahmad Zuhdi alias Yudi. Amar Putusan Menyatakan Terdakwa Ahmad Zuhdi Alias Yudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

- p. Pokok Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018. Perkiraan Kerugian Keuangan Negara Rp. 536.276.974,00 (Lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah). Pihak Salman Bin Baharuddin dalam kedudukan sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara. Status Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr, tanggal 31 Agustus 2022. Amar Putusan Menyatakan terdakwa Salman Bin Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan primer, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Salman Bin Baharuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

pidana kurungan selama, 2 (dua) bulan, Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Salman Bin Baharuddin untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sebesar Rp. 536.276.974,- (*Lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. Status Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor 29/PID.TPK/2022/PT SMR, tanggal 28 Oktober 2022. Amar Putusan Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 31 Agustus 2022 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/ PN.Smr yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut Menyatakan terdakwa Salman Bin Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan primer, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Salman Bin Baharuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Salman Bin Baharuddin untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sebesar Rp. 536.276.974,- (*Lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi atas Putusan Banding.

- q. Pokok Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019. Perkiraan Kerugian Keuangan Negara Rp. 1.575.287.359,00 (*satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*). Pihak Supardi, ST., MT., Bin (Alm) Marno Sugiono dalam kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 dan Briand Alfyandi, SE Anak Dari Tjong Bambang Sutrisno selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama. Status Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr, tanggal 11 Oktober 2022. Amar Putusan Menyatakan Terdakwa Supardi MS, ST., MT., Bin (Alm) Marno Sugiono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut, Menyatakan Terdakwa Supardi Ms, ST., MT., Bin (Alm) Marno Sugiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*korupsi secara bersama-sama*” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Status Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr, tanggal 1 November 2022. Amar Putusan Menyatakan Terdakwa Briand Alfyandi, SE Anak Dari Tjong Bambang Sutrisno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut, Menyatakan Terdakwa Briand Alfyandi, SE Anak Dari Tjong Bambang Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*korupsi secara bersama-sama*” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50,000,000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 194.035.000,00 (*seratus sembilan puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah*), dan oleh karena Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 194.035.000,00 (*seratus sembilan puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah*) yang dititipkan pada RPL 047 PDT Kejari Penajam Paser Utara No. Rekening Bank Mandiri 1490010698464, maka terhadap penitipan uang sejumlah Rp. 194.035.000,00 (*seratus sembilan puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah*) tersebut akan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang harus dibayar oleh Terdakwa, sehingga terhadap uang sejumlah Rp. 194.035.000,00 (*seratus sembilan puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah*) yang dititipkan pada RPL 047 PDT Kejari Penajam Paser Utara No. Rekening Bank Mandiri 1490010698464, ditetapkan dirampas untuk negara.



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- r. Pokok Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan lapangan sepakbola Desa Sebakung Jaya. Perkiraan Kerugian Keuangan Negara Rp. 571.000.000 (*lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah*). Pihak Terdakwa Muharis Bin. H. Muhammad Tohir selaku Kepala Desa Sebakung Jaya Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara periode tahun 2016 sampai tahun 2022 dan juga sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) tahun anggaran 2019 dan Terdakwa Hambali Bin selaku anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Terdaftar pada register Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda dengan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr, tanggal 1 November 2022 (terdakwa Muharis Bin. H. Muhammad Tohir). Penuntutan tanggal 13 Februari 2023. Terdaftar pada register Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda dengan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr, tanggal 1 November 2022 (terdakwa Hambali Bin Ukum). Tahap Persidangan: Penuntutan tanggal 13 Februari 2023.
- s. Pokok Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan dana dana bantuan pemerintah Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut di Desa Babulu Laut secara Pribadi tanpa melibatkan UPKK dan melakukan rekayasa bukti pengeluaran. Perkiraan Kerugian Keuangan Negara Rp.598.656.000,- (*lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*). Pihak Terdakwa Sipon Bin Ningram selaku Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Karya Bersama Desa Babulu Laut, Saksi Sarlin selaku Pengelola Keuangan dan Kegiatan pada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Karya Bersama Desa Babulu Laut, Saksi Syaiful Arjana selaku Petugas Penyuluh Lapangan Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu dan Saksi Gunawan, S.T. selaku Komisaris CV. Zahwara Jaya. Status Terdaftar pada register Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda dengan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, tanggal 3 Februari 2023. Tahap Persidangan: Keterangan Saksi dari Penuntut Umum, tanggal 1 Maret 2023. Pihak Tersangka Pokok Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Abdul Gafur Mas'ud selaku Bupati Penajam Paser Utara Periode 2018 s.d. 2023, Tersangka Heriyanto selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, Tersangka Karim Abidin selaku Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka dan Tersangka Baharun Genda selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Energi. Status Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- t. Pokok Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan, Operasional dan Kegiatan Pertambangan pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka. Pihak Saksi Drs. Alimuddin M.AP selaku Plt. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka. Status Penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Realisasi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.757.844.430.423,32 sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	125.386.713.912,32
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.599.731.712.080,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	32.726.004.431,00

- Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.542.125.982.201,20 sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai	Rp	511.854.352.851,60
b. Belanja Barang	Rp	482.164.061.155,34
c. Belanja Bunga	Rp	22.653.806.633,00
d. Belanja Subsidi	Rp	-
e. Belanja Hibah	Rp	26.723.150.276,00
f. Belanja Bantuan Sosial	Rp	10.013.670.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	0,00
h. Belanja Modal	Rp	342.529.909.461,26
i. Belanja Tidak Terduga	Rp	2.041.572.492,00
j. Transfer/Bantuan Keuangan	Rp	144.145.459.332,00

- Realisasi Pembiayaan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	41.679.216.371,11
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	69.765.344.550,00
c. Pembiayaan Netto	Rp	(28.086.128.178,89)

- SILPA pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 187.632.320.043,23 dengan rincian sebagai berikut :

a. Kas di Kas Daerah	Rp	183.214.068.746,13
b. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
c. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
d. Kas di BLUD	Rp	3.686.008.700,15
e. Kas Dana BOS	Rp	529.058.204,15
f. Kas di Bendahara Dana Kapitasi	Rp	203.184.392,80
g. Kas di Bendahara Dana Non Kapitasi	Rp	-

- Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	41,679.216.371,11
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan		
c. Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(41.679.216.371,11)
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp	187.632.320.043,23
e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	187.632.320.043,23



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- Laporan Arus Kas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	1.757.844.430.423,32
b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	1.199.596.072.739,94
c. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	Rp	0,00
d. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	Rp	348.381.909.461,26
e. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
f. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	63.913.344.550,00
g. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	82.660.861.333,00
h. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	82.658.014.233,00
i. Saldo Akhir Kas Daerah	Rp	183.214.068.746,13
j. Saldo Akhir Kas BLUD	Rp	3.686.008.700,15
k. Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi	Rp	203.184.392,80
l. Saldo Akhir Kas BOS	Rp	529.058.204,15

- Laporan Kegiatan Operasional Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	113.570.839.759,35
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.755.933.658.976,00
c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah	Rp	51.699.637.081,00
d. Beban Operasi	Rp	931.654.620.146,80
e. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	335.967.477.078,46
f. Beban Transfer	Rp	117.116.097.332,00
g. Beban Tidak Terduga	Rp	2.041.572.492,00
h. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	837.751.636.347,19
i. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(22.482.639.938,93)
j. Surplus/Defisit LO	Rp	815.268.996.408,26

- Total Aset Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Aset Lancar	Rp	263.879.345.374,16
b. Investasi Jangka Panjang	Rp	129.170.429.530,76
c. Aset Tetap	Rp	4.002.496.673.739,88
d. Aset Lainnya	Rp	634.926.166.335,80

- Total Kewajiban Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Kewajiban Jangka Pendek	Rp	71.240.565.648,32
b. Kewajiban Jangka Panjang	Rp	124.043.979.671,00

- Total Ekuitas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 adalah Rp4.835.188.069.661,28

- Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 :

a. Ekuitas Awal	Rp	4.835.150.417.608,97
b. Surplus Defisit-LO	Rp	815.268.996.408,26
c. Dampak Kumulatif	Rp	(4.569.888.111,34)
d. Ekuitas Akhir	Rp	4.835.188.069.661,28



BUPATI
Ir. H. HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	2021
2		3	4	5	6
PENDAPATAN	5.1.1	1.688.794.657.312,00	1.757.844.430.423,32	104,09%	1.222.723.310.615,79
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	38.474.739.374,00	46.010.036.795,00	119,59%	25.627.497.245,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	9.214.137.518,00	8.306.854.374,00	90,15%	6.726.318.073,00
Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.1.1.1.3	2.318.899.829,00	2.671.835.979,53	115,22%	2.487.623.482,61
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	43.769.455.544,00	68.397.986.763,79	156,27%	53.050.724.615,74
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		93.777.232.265,00	125.386.713.912,32	133,71%	87.892.163.416,35
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	872.065.039.678,00	951.130.704.178,00	109,07%	390.052.289.418,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.2	272.437.796.000,00	262.161.465.209,00	96,23%	271.407.999.000,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.3	41.119.905.000,00	34.399.833.646,00	83,66%	75.661.142.165,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1.4	90.558.318.000,00	45.943.929.789,00	50,73%	51.984.325.602,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.276.181.058.678,00	1.293.635.932.822,00	101,37%	789.105.756.185,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2				
Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	7.003.252.000,00	18.401.226.000,00	262,75%	55.643.691.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.2.2	27.029.362.000,00	27.029.362.000,00	100,00%	38.775.111.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya		34.032.614.000,00	45.430.588.000,00	133,49%	94.418.802.000,00
Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	146.172.416.000,00	147.916.241.258,00	101,19%	110.646.308.391,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	112.844.950.000,00	112.748.950.000,00	99,91%	110.996.484.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		259.017.366.000,00	260.665.191.258,00	100,64%	221.642.792.391,00
Total Pendapatan Transfer		1.569.231.038.678,00	1.599.731.712.080,00	101,94%	1.105.167.350.576,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	5.852.000.000,00	1.641.068.478,00	28,04%	2.661.500.000,00
Pendapatan lainnya	5.1.1.3.2	19.934.386.369,00	31.084.935.953,00	155,94%	27.002.296.623,44
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		25.786.386.369,00	32.726.004.431,00	126,91%	29.663.796.623,44
Jumlah Pendapatan		1.688.794.657.312,00	1.757.844.430.423,32	104,09%	1.222.723.310.615,79
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	541.230.638.823,00	511.854.352.851,60	94,57%	380.071.503.726,00
Belanja Barang	5.1.2.1.2	502.454.813.902,00	482.164.061.155,34	95,96%	382.521.030.936,26
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	22.654.756.633,00	22.653.806.633,00	100,00%	16.637.316.584,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	31.209.557.676,00	26.723.150.276,00	85,62%	8.375.936.894,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	10.771.160.000,00	10.013.670.000,00	92,97%	2.692.443.365,00
Jumlah Belanja Operasi		1.108.320.927.034,00	1.053.409.040.915,94	95,05%	790.298.231.505,26
BELANJA MODAL	5.1.2.2				
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	8.431.445.371,00	7.503.359.371,00	88,99%	292.827.035,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	51.185.360.360,00	46.866.781.838,72	91,56%	48.618.407.921,82
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	58.449.742.193,00	53.251.596.734,72	91,11%	29.110.006.350,00
Belanja Jalan, Iriqasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	259.192.806.262,00	231.938.512.822,82	89,48%	152.007.787.009,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	3.894.318.975,00	2.969.658.694,00	76,26%	5.355.408.041,00
Jumlah Belanja Modal		381.153.673.161,00	342.529.909.461,26	89,87%	235.384.436.356,82
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	18.365.066.073,00	2.041.572.492,00	11,12%	6.108.404.841,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		18.365.066.073,00	2.041.572.492,00	11,12%	6.108.404.841,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.1	-	-	0,00%	5.000.000.000
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	5.1.2.4.2	152.868.862.864,00	144.145.459.332,00	94,29%	91.521.729.694,00
Jumlah Belanja Transfer		152.868.862.864,00	144.145.459.332,00	94,29%	96.521.729.694,00
Jumlah Belanja		1.660.708.529.132,00	1.542.125.982.201,20	92,86%	1.128.312.802.397,08
Surplus/ (Defisit)		28.086.128.180,00	215.718.448.222,12	768,06%	94.410.508.218,71
PEMBIAYAAN	5.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	41.679.216.371,00	41.679.216.371,11	100,00%	13.216.714.882,40
Penggunaan SILPA	5.1.3.1.1	41.679.216.371,00	41.679.216.371,11	100,00%	13.216.714.882,40
Jumlah Penerimaan		41.679.216.371,00	41.679.216.371,11	100,00%	13.216.714.882,40

Uraian	Ref	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	2021
2		3	4	5	6
PENGELUARAN DAERAH	5.1.3.2	69.765.344.551,00	69.765.344.550,00	100,00%	65.948.006.730,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	5.852.000.000,00	5.852.000.000,00	100,00%	19.600.000.000,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.3.2.2	63.913.344.551,00	63.913.344.550,00	100,00%	46.348.006.730,00
Jumlah Pengeluaran		69.765.344.551,00	69.765.344.550,00	100,00%	65.948.006.730,00
Pembiayaan Neto	5.1.4	(28.086.128.180,00)	(28.086.128.178,89)	100,00%	(52.731.291.847,60)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.4.1	-	187.632.320.043,23	0,00%	41.679.216.371,11

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI

Dr. H. HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	%
ASET	5.3.1				
ASET LANCAR	5.3.1.1				
Kas dan Setara Kas					
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	183.214.068.746,13	31.675.743.861,78	151.538.324.884,35	478,40
Kas di BLUD	5.3.1.1.2	3.686.008.700,15	8.235.389.913,72	(4.549.381.213,57)	(55,24)
Kas Dana BOS	5.3.1.1.3	529.058.204,15	1.329.101.706,21	(800.043.502,06)	(60,19)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.4	203.184.392,80	436.133.789,40	(232.949.396,60)	(53,41)
Kas Lainnya	5.3.1.1.5		2.847.100,00	(2.847.100,00)	(100,00)
Piutang Pajak	5.3.1.1.6	12.690.536.782,00	11.832.771.677,00	857.765.105,00	7,25
Piutang Retribusi	5.3.1.1.7	3.773.654.048,79	3.026.708.233,79	746.945.815,00	24,68
Piutang Lain Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.8	2.545.541.091,10	23.147.347.099,00	(20.601.806.007,90)	(89,00)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.9	34.636.410.000,00	10.510.565.000,00	24.125.845.000,00	229,54
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.10	(701.828.668,86)	(1.900.382.185,08)	1.198.553.516,22	(63,07)
Persediaan	5.3.1.1.11	23.075.200.744,57	28.133.344.543,31	(5.058.143.798,74)	(17,98)
Belanja Dibayar dimuka	5.3.1.1.12	227.511.333,33	227.511.333,33	-	-
A Jumlah Aset Lancar		263.879.345.374,16	116.657.082.072,46	147.222.263.301,70	126,20
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2				
INVESTASI NON PERMANEN	5.3.1.2.1				
Investasi Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	7.313.000.000,00	7.313.000.000,00	-	-
Penyisihan Dana Bergulir		(2.913.541.556,47)	(2.940.471.167,50)	26.929.611,03	(0,92)
Investasi Dana Bergulir Netto		4.399.458.443,53	4.372.528.832,50	26.929.611,03	0,62
Investasi Non Permanen Lainnya					
B Jumlah Investasi Non Permanen		4.399.458.443,53	4.372.528.832,50	26.929.611,03	0,62
INVESTASI PERMANEN	5.3.1.2.2				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	124.770.971.087,23	123.369.129.932,34	1.401.841.154,89	1,14
C Jumlah Investasi Permanen		124.770.971.087,23	123.369.129.932,34	1.401.841.154,89	1,14
D Jumlah Investasi Jangka Panjang (B+C)		129.170.429.530,76	127.741.658.764,84	1.428.770.765,92	1,12
ASET TETAP	5.3.1.3				
Tanah	5.3.1.3.1	581.954.473.044,38	579.591.561.447,38	2.362.911.597,00	0,41
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	933.878.243.491,16	922.482.310.840,33	11.395.932.650,83	1,24
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.599.499.170.634,31	1.543.627.195.598,65	55.871.975.035,66	3,62
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	3.915.577.119.712,50	3.761.375.106.297,03	154.202.013.415,47	4,10
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	61.416.164.143,01	59.099.988.778,01	2.316.175.365,00	3,92
Kontruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	331.507.269.818,00	387.798.140.420,24	(56.290.870.602,24)	(14,52)
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(3.421.373.419.155,79)	(3.082.886.881.770,43)	(338.486.537.385,36)	10,98
E Jumlah Aset Tetap		4.002.459.021.687,57	4.171.087.421.611,21	(168.628.399.923,64)	(4,04)
ASET LAINNYA	5.3.1.4				
Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.1	87.501.772.592,93	86.424.383.693,93	1.077.388.899,00	1,25
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(86.062.577.749,33)	(84.518.083.837,43)	(1.544.493.911,90)	1,83
Aset Tak Berwujud Netto		1.439.194.843,60	1.906.299.856,50	(467.105.012,90)	(24,50)
Aset Lain-lain	5.3.1.4.2	633.486.971.492,20	178.427.335.326,89	455.059.636.165,31	255,04
G Jumlah Aset Lainnya		634.926.166.335,80	180.333.635.183,39	454.592.531.152,41	252,08
H Jumlah Aset (A+D+E+F+G)		5.030.434.962.928,29	4.595.819.797.631,90	434.615.165.296,39	9,46
KEWAJIBAN	5.3.1.5				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.1.5.1				
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.1.5.1.1	55.130.675.640,00	63.913.344.550,00	(8.782.668.910,00)	(13,74)
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.1.5.1.2	94.000.000,00	60.000.000,00	34.000.000,00	56,67
Utang Belanja	5.3.1.5.1.3	16.015.890.008,32	328.182.836.406,54	(312.166.946.398,22)	(95,12)
I Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		71.240.565.648,32	392.156.180.956,54	(320.915.615.308,22)	(81,83)

Uraian		Ref	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		5.3.1.5.2				
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		5.3.1.5.2.1	124.043.979.671,00	179.174.655.311,00	(55.130.675.640,00)	(30,77)
J	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		124.043.979.671,00	179.174.655.311,00	(55.130.675.640,00)	(30,77)
K	Jumlah Kewajiban (I+J)		195.284.545.319,32	571.330.836.267,54	(376.046.290.948,22)	(65,82)
EKUITAS		5.3.1.6				
Ekuitas		5.3.1.6.1	4.835.150.417.608,97	4.024.488.961.364,36	810.661.456.244,61	20,14
L	Jumlah Ekuitas		4.835.150.417.608,97	4.024.488.961.364,36	810.661.456.244,61	20,14
M	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana (K+L)		5.030.434.962.928,29	4.595.819.797.631,90	434.615.165.296,39	9,46

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI

Dr. H. HAMDAM

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 Nomor : 13 Tahun 2022
 Tanggal : 22 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir Tahun	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun ini	Koreksi Laporan	Jumlah Modal (Investasi) yang diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12	13	14 = 9 + 11 + 12 - 13
I Investasi Permanen													
1	2015	Bankaltim	Perda No.12 Tahun 2014	Saham	57.600.000.000,00	57.600.000.000,00	-	57.600.000.000,00					57.600.000.000,00
2	2021	Perumda Benuo Taka	Perda No. 7 Tahun 2020	Uang Tunai	32.924.046.357,37	32.924.046.357,37	12.500.000.000,00	45.424.046.357,37		1.419.818.574,00	148.835.329,63		46.992.700.261,00
	2021	Perumda Benuo Taka Energi	Perda No. 6 Tahun 2020	Uang Tunai	-	-	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00		(2.464.152.959,00)			1.135.847.041,00
3	2021	Perumda Air Minum Danum Taka	Perda No.19 Tahun 2019	Uang Tunai	15.596.014.546,00	15.596.014.546,00	3.500.000.000,00	19.096.014.546,00		(1.455.431.915,66)			17.640.582.630,34
JUMLAH (I)					106.120.060.903,37	106.120.060.903,37	19.600.000.000,00	125.720.060.903,37	-	(2.499.766.300,66)		-	123.369.129.932,34
II Investasi Non Permanen													
1	2005	Penjaminan Kredit Kop & UKM			2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	(826.060.848,00)	1.673.939.152,00					1.673.939.152,00
2	2005	Penjaminan Kredit Alsintan			4.813.000.000,00	4.813.000.000,00	(2.114.410.319,50)	2.698.589.680,50					2.698.589.680,50
3													
JUMLAH (II)					7.313.000.000,00	7.313.000.000,00	(2.940.471.167,50)	4.372.528.832,50	-	-		-	4.372.528.832,50
JUMLAH (I+II)					113.433.060.903,37	113.433.060.903,37	16.659.528.832,50	130.092.589.735,87	-	(2.499.766.300,66)		-	127.741.658.764,84

Pt. Bupati Penajam Paser Utara

Ttd

HAMDAM

Lampiran XIII : Peraturan Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor : 13 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.045.258.727.641,63	54.943.220.921,09	9.146.996.971,80	1.091.054.951.590,92
2	DINAS KESEHATAN	167.212.750.085,57	25.805.062.586,00	9.453.434.755,85	183.564.377.915,72
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	188.264.994.590,65	23.626.652.205,67	1.487.530.276,00	210.404.116.520,32
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.080.768.513.266,83	612.723.834.578,80	372.514.530.810,00	4.320.977.817.035,63
5	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	80.164.950.165,20	46.925.907.385,00	6.823.094.190,00	120.267.763.360,20
6	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	21.122.346.803,66	365.385.000,00	57.628.000,00	21.430.103.803,66
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.025.573.970,99	180.416.500,00	-	6.205.990.470,99
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33.667.701.078,00	436.700.000,00	77.317.800,00	34.027.083.278,00
9	DINAS SOSIAL	1.732.343.304,45	138.029.100,00	-	1.870.372.404,45
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.380.395.634,74	87.794.900,00	83.395.900,00	3.384.794.634,74
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.981.409.750,00	1.863.177.950,00	101.384.850,00	5.743.202.850,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.030.123.120,33	253.166.000,00	14.653.571,00	4.268.635.549,33
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27.803.774.720,43	1.256.547.000,00	749.312.475,00	28.311.009.245,43
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7.482.092.795,00	423.830.000,00	1,00	7.905.922.794,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.714.857.007,00	218.086.000,00	167.166.500,00	2.765.776.507,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	285.390.211.699,79	1.574.210.100,00	1.876.044.803,08	285.088.376.996,71
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	13.003.274.799,53	146.171.900,00	547.605.000,00	12.601.841.699,53
18	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	124.563.637.895,00	1.948.293.000,00	2.807.307.000,00	123.704.623.895,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.477.451.940,67	366.335.200,00	96.235.700,00	3.747.551.440,67
20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4.731.573.358,00	1.943.145.303,08	2.000.000,00	6.672.718.661,08
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	2.540.834.917,00	11.062.243.905,74	544.216.066,67	13.058.862.756,07
22	DINAS PERIKANAN	21.210.592.012,66	-	299.140.500,00	20.911.451.512,66
23	DINAS PERTANIAN	41.573.211.053,42	12.061.583.997,00	1.161.525.000,00	52.473.270.050,42
24	SEKRETARIAT DAERAH	469.265.444.055,26	5.892.353.035,52	24.166.049.100,46	450.991.747.990,32
25	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	292.204.300,00	-	-	292.204.300,00
26	SEKRETARIAT DPRD	49.641.754.515,00	21.971.091.507,40	1.550.364.750,40	70.062.481.272,00
27	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.375.235.040,92	82.840.120,00	-	8.458.075.160,92
28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	28.050.532.954,12	1.189.599.575,00	1.254.748.466,80	27.985.384.062,32
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.420.122.379,43	293.279.000,00	1.454.301.500,43	4.259.099.879,00
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.437.469.700,00	506.728.200,00	6.204.000,00	2.937.993.900,00
31	INSPEKTORAT DAERAH	3.438.995.543,65	515.331.550,00	112.335.400,00	3.841.991.693,65
32	KECAMATAN PENAJAM	59.286.270.068,68	16.533.447.318,67	403.748.550,00	75.415.968.837,35
33	KECAMATAN WARU	6.801.915.287,00	13.385.434.500,00	135.582.000,00	20.051.767.787,00
34	KECAMATAN BABULU	9.614.667.667,00	39.282.700,00	-	9.653.950.367,00
35	KECAMATAN SEPAKU	12.351.899.419,03	4.770.303.738,00	75.860.703,81	17.046.342.453,22
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.255.118.842,00	281.561.864,33	-	2.536.680.706,33
	JUMLAH	6.827.332.971.382,64	863.811.046.641,30	437.169.714.642,30	253.974.303.381,64

Plt. Bupati Penajam Paser Utara

Ttd

H A M D A M

Lampiran XIV : Peraturan Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor : 13 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap Per 31 Des 2020	Mutasi		Nilai Aset Tetap Per 31 Des 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	570.034.690.853	32.867.095.809	23.310.225.215	579.591.561.447
2	Peralatan dan Mesin	862.578.507.989	70.530.542.535	10.626.739.684	922.482.310.840
3	Gedung dan Bangunan	1.418.355.571.275	181.745.368.174	56.473.743.850	1.543.627.195.599
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.296.915.779.943	503.141.488.350	38.682.161.996	3.761.375.106.297
5	Aset Tetap Lainnya	55.269.310.676	7.205.104.638	3.374.426.536	59.099.988.778
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	624.179.110.646	65.680.317.773	302.061.287.999	387.798.140.420
Jumlah		6.827.332.971.383	861.169.917.279	434.528.585.280	7.253.974.303.382

Plt. Bupati Penajam Paser Utara

Ttd

H A M D A M